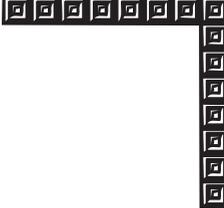
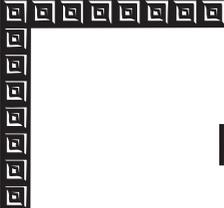


PROFIL GENDER GAYO LUES 2019



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA)
PROVINSI ACEH
BEKERJASAMA DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK- PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
GAYO LUES
2019



PROFIL GENDER GAYO LUES TAHUN 2019

Tim Penulis : Dra. Mustabsyirah Husein, M.Ag

Dr. Rasyidah, M.Ag

Azmil Umur, MA

Dr. Zulfatmi, M.Ag

Sakdiah, M.Ag

Penyunting : Arif Ramdan S

Tata Letak : Hendra Lesmana

Desain Grafis : M. Safri Irwanda

Diterbitkan oleh:

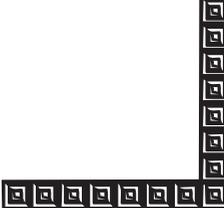
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Aceh**

Jalan Tgk. Batee Timoh No. 2 Jeunglingke Kec. Syiah Kuala,
Kota Banda Aceh

Telp/Fax : (0651) 33095 – 21420

E- mail : dinaspppa@acehprov.go.id

Website : dinaspppa.acehprov.go.id



KATA SAMBUTAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Arah Kebijakan dan strategi pengarusutamaan Nasional dalam Rancangan Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019, meliputi tiga hal yaitu: Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, Pengarusutamaan Tata Kelola yang Baik, dan Pengarusutamaan Gender. Sasaran utama Pengarusutamaan Gender adalah (1). Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG), (2). menurunnya Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG), (3). Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) secara periodik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian Pembangunan manusia di suatu wilayah dari 3 (tiga) dimensi yaitu: Kesehatan, Pendidikan dan Standar Hidup Layak. Sejak tahun 2015 perhitungan IPM mengalami perubahan metode, perubahan ini berdampak pada perubahan penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG diformulasikan sebagai rasio IPM Perempuan dan IPM laki-laki. Penghitungan IPM terpilah gender ini, membuat analisis kualitas pembangunan baik pada laki-laki maupun perempuan dapat dilakukan secara parsial. Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100 (seratus), maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. Pemerintah menargetkan IDG meningkat setiap tahunnya.

Penghitungan ketiga indeks tersebut dilakukan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). IPG dan IDG merupakan indikator komposit yang kompleks dan cukup menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, serta partisipasi aktif dalam bidang

ekonomi, politik dan Pengambilan keputusan. Untuk itu manakala terdapat angka IPG atau IDG yang masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya maka pemerintah setempat diharapkan dapat mengamati dan mengidentifikasi indikator tunggal/pembentuk mana yang masih rendah. Strategi bersama sektor terkait harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dan berupaya meningkatkan IPG dan IDG wilayahnya. Profil Gender Gayo Lues menjadi bahan pertimbangan yang penting bagi pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan yang responsive gender. Pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan IPM dan IPG Gayo Lues, dan berkontribusi bagi peningkatan IDG dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Ar-Raniry sebagai tim penyusun Buku Profil Gender Gayo Lues . Terimakasih juga kepada Tim dari DP3AP2KB Gayo Lues, Bappeda Gayo Lues, BPKSDM Gayo Lues, Dinas Kesehatan, P2TP2A Gayo Lues, Unit IV PPA Kepolisian Gayo Lues, dan semua pihak yang telah sangat membantu penyediaan data untuk Profil ini. Semoga profil ini bermanfaat bagi pengguna di lingkungan pemerintahan dan yang berkepentingan terhadap publikasi ini.

Banda Aceh, Desember 2019, Kepala

Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (DPPPA)



Nevi Ariyani, SE

KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN PROFIL GENDER GAYO LUES

Assalamu'alaikum warahmatullah wa barakatuh.

Penyusunan buku Profil Gender Gayo Lues tahun 2019, berusaha memberikan informasi mengenai pembangunan manusia berbasis gender. Buku ini berisi data-data statistik dan ulasan tentang perkembangan pencapaian indeks pembangunan gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, dan Indeks Pemberdayaan gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada sektor ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Indikator gender tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan gender. Hal ini sejalan dengan Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Tim penyusun menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 Kabupaten Gayo Lues dan data-data terkait lainnya dalam menyusun profil ini. Namun keterbatasan tersedianya data yang dibutuhkan memungkinkan terjadi kesulitan dalam menganalisis hasil. Oleh karenanya penyusun mengharapkan adanya penelitian/pengkajian lanjutan untuk tersedianya kelengkapan data terpilah, untuk menghindari kesulitan analisis dan agar lebih akuratnya dalam analisis hasil.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh atas kepercayaannya kepada Pusat Studi Wanita (PSW) UIN ar-Raniry untuk menyusun Buku Profil Gender Kabupaten Gayo Lues. Terimakasih juga kepada Tim dari DP3AP2KB Gayo Lues, Bappeda Gayo Lues, BPKSDM Gayo Lues, Dinas Kesehatan, P2TP2A Gayo Lues, Unit IV PPA Kepolisian Gayo Lues, dan semua pihak yang telah sangat membantu penyediaan data untuk Profil ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku ini. Semoga dapat memberikan mamfaat bagi para pihak.

Banda Aceh, Desember 2019

Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Ar-Raniry
Koordinator Tim,



Dr. Rasyidah M. Ag

DAFTAR ISI

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH.....	i
KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN PROFIL GENDER GAYO LUES	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Signifikansi	4
1.4 Metodologi Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM.....	8
2.1 Sejarah Pembentukan	8
2.2 Letak Geografis dan Batas Wilayah	9
2.3 Ekonomi dan Sosial Budaya	10
2.4 Demografi	12
2.5 Perkembangan IPM, IPG dan IDG	16

BAB III GENDER DAN PENDIDIKAN	23
3.1 Status Pendidikan.....	24
3.2 Angka Partisipasi Sekolah	26
3.3 Angka Partisipasi Murni (APM).	33
3.4 Harapan Lama Sekolah (HLS)	35
3.5 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	36
3.6 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	38
3.7 Angka Melek Huruf (AMH).....	39
3.8 Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah.....	40
3.9 Rasio Guru dan Siswa	41
3.10 Kualifikasi Akademik Guru	42
3.11 Status Kepegawaian Guru.....	44
BAB IV GENDER DAN KESEHATAN	46
4.1 Angka Kesakitan.....	47
4.2 Penderita Sakit	49
4.3 Alasan Tidak Berobat.....	50
4.4 Lama Berobat.....	55
BAB V GENDER DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN	65
5.1 Perempuan di Legislatif	66
5.2 Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	70
BAB VI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	73
6.1 Kekerasan Terhadap Perempuan	73
BAB VII KETAHANAN KELUARGA	77
7.1 Konsep Keluarga.	77
7.2 Ketahanan Keluarga.....	77
7.3 Dimensi, Variabel dan Indikator Ketahanan Keluarga	

Kabupaten Gayo Lues.....	82
BAB VIII REKOMENDASI	103
Gender dan Pendidikan	103
Gender dan Kesehatan	103
Gender dan Pengambilan Keputusan	104
Kekerasan Terhadap Perempuan	104
Gender dan Ketahanan Keluarga	104
Data Terpilah	105
DAFTAR RUJUKAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten di Provinsi Aceh 2014-2018	19
Tabel 3.1 Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gayo Lues, 2018	24
Tabel.3.2 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Gayo Lues, 2018.....	26
Tabel 3.3 Jumlah Siswa Baru yang Masuk SD Negeri dan Swasta menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gayo Lues, 2019 ..	28
Tabel 3.4 Jumlah Siswa Baru yang Masuk SMP Negeri dan Swasta menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gayo Lues, 2019 ..	30
Tabel 3.5 Jumlah Siswa Baru yang Masuk SMA Negeri dan Swasta menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gayo Lues, 2019 ..	31
Tabel 3.6 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gayo Lues, 2018	34
Tabel 3.7 Rasio siswa dan Guru tersertifikasi dan guru secara umum di SD,SMP dan SMA Kabupaten Gayo Lues,2019.....	41
Tabel 3. 8 Kualifikasi Akademik Guru Laki-laki dan Perempuan di jenjang SD, SMP dan SMA Kabupaten Gayo Lues,2019 .	42
Tabel 3.9 Persentase Guru Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Status Kepegawaian di Jenjang SD, SMP dan SMA Kabupaten Gayo Lues, 2019.....	44
Tabel.5.1 Jumlah Anggota DPRK Gayo Lues Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2018.....	66

Tabel 5.2 Rekapitulasi Pejabat Struktural Eselon II s/d V Dirinci Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017	71
Tabel 7.1 Jarak Kecamatan di Gayo Lues dengan Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi	81
Tabel.7.2 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Berstatus Kawin yang Pasangannya Biasa Tinggal di Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin , 2018	88
Tabel 7.3 Banyaknya Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, 2018	89
Tabel 7.4 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, 2018.....	92

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Piramida Perkiraan Penduduk Kabupaten Gayo Lues Menurut Usia, Juni 2018 13
- Gambar 2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Kab. Gayo Lues, 2007-2018..... 14
- Gambar 2.3 Perkiraan Penduduk Kabupaten Gayo Lues Dirinci Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan, Juni 2018..... 15
- Gambar 2.4 Jarak kecamatan di Gayo Lues ke Pusat Pemerintahan 16
- Gambar 2.5 Perbandingan IPM IPG dan IDG Gayo Lues 17
- Gambar 2.6 Perbandingan IPM Laki-Laki dan Perempuan Gayo Lues tahun 2015 dan 2017 18
- Gambar 3.1 Perbandingan Persentase Penduduk dalam Usia Pendidikan Antara Jenis Kelamin Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Gayo Lues, 2018..... 25
- Gambar. 3.2 Perbandingan Persentase Partisipasi Laki-laki dan Perempuan dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Gayo Lues, 2018..... 27
- Gambar 3.3 Perbandingan Siswa Laki-Laki dan Perempuan yang Memasuki SD Negeri dan Swasta di Kabupaten Gayo Lues, 2019..... 29
- Gambar 3.4 Perbandingan Siswa Laki-laki dan Perempuan yang Masuk SMP Negeri dan Swasta Di Kabupaten Gayo Lues, 2019. 30
- Gambar 3.5 Perbandingan Siswa Laki-laki dan Perempuan yang Masuk SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Gayo Lues,2019 .. 32
- Gambar 3.6 Pergeseran Perbandingan Persentase Siswa Laki-laki dan

Perempuan yang Masuk SD, SMP dan SMA di Kabupaten Gayo Lues,2019	33
Gambar 3.7 APM Laki-laki dan Perempuan pada Jenjang SD, SMP, dan SMA Sederajat di Kabupaten Gayo Lues, 2018.....	35
Gambar 3.8 Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gayo Lues,2018.....	36
Gambar.3.9 Rata-rata Lama Sekolah Menurut jenis Kelamin di Kabupaten Gayo Lues, 2018.....	37
Gambar 3. 10 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah/STTB yang Dimiliki di Kabupaten Gayo Lues, 2018.....	38
Gambar 3.11 Persentase Penduduk Berumur 15 tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin, Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Gayo Lues,2018.....	39
Gambar.3.12 Persentase Penduduk 0-6 tahun Menurut Jenis Kelamin dan Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah di Kabupaten Gayo Lues, 2018.....	40
Gambar 3.13 Kesenjangan persentase kualifikasi guru laki-laki dengan guru perempuan	43
Gambar 3.14 Perbandingan Persentase Guru PNS Laki-laki dan Perempuan di SD, SMP dan SMA Kabupaten Gayo Lues, 2019.....	45
Gambar 4.1 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin, 2018	47
Gambar 4.2 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Terganggu Aktivasnya Menurut Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin, 2018	48

- Gambar 4.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin, 2018..... 49
- Gambar 4.4 Persentase Penduduk yang Sakit tetapi Tidak Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2018 50
- Gambar 4.5 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues, Jenis Kelamin, dan Tempat Berobat Jalan, 2018 52
- Gambar 4.6 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues, Jenis Kelamin, dan Tempat Berobat Jalan, 2018 52
- Gambar 4.7 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues, Jenis Kelamin, dan Tempat Berobat Jalan, 2018 53
- Gambar 4.8 Pesentase Penduduk Yang Berobat Jalan dan Tempat Berobat..... 54
- Gambar 4.9 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin, 2018 55
- Gambar 4.10 Persentase Penduduk yang Tidak Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin, 2018 56
- Gambar 4.11 Persentase penduduk yang menggunakan Jaminan Kesehatan dan tidak, Berdasarkan jenis Kelamin..... 57
- Gambar 4.12 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin, 2018 57
- Gambar 4.13 Persentase Penduduk yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues, Jenis Kelamin, dan Tempat Rawat Inap, 2018..... 58
- Gambar 4.14 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan

Kesehatan untuk Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin, 2018
59

- Gambar 4.15 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten Gayo Lues, Jenis Kelamin, Jumlah Hari Rawat Inap dan Rata-Rata Lama Rawat Inap (hari), 2018..... 60
- Gambar 4.16 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten Gayo Lues, Jenis Kelamin, Jumlah Hari Rawat Inap dan Rata-Rata Lama Rawat Inap 7-29 hari, 2018..... 61
- Gambar 4. 17 Rata-Rata Lama Rawat Inap (hari), 2018 62
- Gambar 4.18 Situasi Penduduk dan Layanan Kesehatan Gayo Lues
63
- Gambar 5.1 Perbandingan Anggota DPRK Gayo Lues Periode 2014 dan 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin..... 67
- Gambar 5.2 Persentase Anleg Perempuan di DPRA dan DPRK berdasarkan Kabupaten/Kota tahun pemilihan 2014 dan 2019..... 68
- Gambar 5.3 Persentase Pejabat Struktural Eselon II s/d V Dirinci Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017 71
- Gambar 6.1 Kasus Kekerasan Yang Ditangani Oleh Lembaga Layanan Kabupaten Gayo Lues..... 74
- Gambar 6.2 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Gayo Lues 75
- Gambar 7.2 Dimensi dan Variabel Pengukur Tingkat Ketahanan Keluarga 83
- Gambar 7.3 Banyaknya Akta Kelahiran Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Gayo Lues, 2018..... 87
- Gambar 7.4 Jumlah Bayi BLBR Menurut Kecamatan di Gayo Lues Tahun 2018 93
- Gambar 7.5 Persentase Kepemilikan Rumah Kabupaten Gayo Lues, 2016-2018..... 95

Gambar 7.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas Kabupaten Gayo Lues, 2016-2018.....	96
Gambar 7.7 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tiap Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, 2018.....	97
Gambar 7.8 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Partisipas Sekolah di Kabupaten Gayo Lues, 2018.....	99

DAFTAR SINGKATAN

Akses	Peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya alam, sosial, politik, ekonomi, maupun waktu. Dalam lingkup lebih kecil tentu akses terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang di Aceh dikenal dengan SKPA dan SKPK.
Analisis Gender	Proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor yang mempengaruhi. Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan program dan kegiatan sehingga untuk melakukan analisis gender diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan. Data gender ini kemudian disusun menjadi indikator gender.
Bias Gender	Pandangan dan sikap yang lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin daripada jenis kelamin lainnya sebagai akibat pengaturan dan kepercayaan budaya yang lebih berpihak kepada jenis kelamin tertentu. Misalnya, lebih berpihak kepada laki-laki daripada kepada perempuan atau sebaliknya.

Buta Gender	Suatu tindakan atau cara pandang yang dibuat tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kepentingan laki-laki dan perempuan. Dalam kaitannya dengan anggaran responsif gender, istilah ini diarahkan pada kebijakan yang tidak memperhatikan dampaknya terhadap kegiatan kultural dan kegiatan reproduksi, yang pada gilirannya tidak memperhatikan biaya untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Sering disebut pula jika orang yang buta gender adalah orang yang tidak bisa membedakan antara gender dengan kodrat (seks).
Data Gender	Data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
Data Terpilah	Data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
Gender	Pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Istilah “gender” digunakan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kesetaraan Gender	Kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
Keadilan Gender	Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta dalam memperoleh penguasaan terhadap sumberdaya seperti dalam mendapatkan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit dan lain-lain.
Kesenjangan Gender	Sering juga disebut dengan istilah gender gap, adalah sebagai bentuk ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
Kontrol	Penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.
Netral Gender	Suatu pandangan atau Kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan dengan segala status sosialnya, masalah dan kebutuhannya, dianggap sama. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Partisipasi Keikutsertaan atau peran serta seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.

Pengarutamaan Gender	Strategi yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.
Responsif Gender	Perhatian dan kepedulian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
Sex Ratio	Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah atau negara pada suatu waktu tertentu. Jika diperoleh rasio jenis kelamin sama dengan 102, maka bisa dikatakan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Sensitif Gender Kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil-hasil pembangunan serta relasi antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia	<p>Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), Pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living).</p>
Indeks Pemberdayaan Gender	<p>Indeks yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan dengan mengukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan.</p>

Kekerasan Terhadap Perempuan	Setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan. Atau dapat juga diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, psikologis dan seksual dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik dalam maupun di luar lingkup rumah tangga.
Gender Focal Point	Aparatur pada sebuah lembaga/organisasi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing. Biasanya Focal Point PUG pada setiap SKPA/SKPK di provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai konsekuensi tuntutan pembangunan yang menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu *mainstream* pembangunan, maka profil gender menjadi sangat penting. Sebagai konsep dari kajian sosial, “gender” merupakan abstraksi dari gambaran realitas yang menunjukkan adanya perbedaan peran, kedudukan dan fungsi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Selanjutnya, dari gambaran realitas, konsep gender menguat menjadi kajian di Ilmu Sosial. Beberapa buku teori Sosial telah memuat “gender” sebagai salah teori yang diuraikan. Seiring dengan itu diterbitkan juga berbagai kebijakan terkait gender dalam pembangunan. Maka pelaksana pembangunan dituntut untuk memahami konsep ini agar lebih adil. Namun demikian implementasi konsep gender dalam pembangunan menjadi tidak sederhana, salah satunya karena tidak tersedianya data terpilah berdasarkan jenis kelamin.

Tantangan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 diantaranya berkaitan dengan upaya pembangunan kesetaraan gender. Tantangan utama dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah dalam meningkatkan pemahaman, komitmen dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di pusat dan di daerah.

Pengarusutamaan gender adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. (Inpres No.9.tahun 2000). Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) merupakan arah tujuan dari penerapan strategi ini. Kesetaraan adalah: semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh stereotype, peran gender yang kaku. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan) (Unesco, 2002). Adapun keadilan gender adalah keadilan dalam memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka. Hal ini mencakup perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda tetapi diperhitungkan ekuivalen dalam hal hak, kewajiban, kepentingan dan kesempatannya.

Setidaknya ada lima alasan mengapa PUG penting dijalankan, yaitu:

1. Masih ada kesenjangan hasil capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki di hampir segala bidang pembangunan. Pembangunan yang berhasil baik adalah pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas masyarakatnya secara merata. Peningkatan kualitas yang merata, akan mendorong percepatan gerak pembangunan. Sebaliknya jika sebagian sumber daya selalu tertinggal, maka gerak pembangunan menjadi lamban.
2. Pengarusutamaan Gender meningkatkan akuntabilitas pemerintah serta memperkuat kehidupan sosial, politik dan ekonomi suatu bangsa.
3. Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan, program, kegiatan yang adil dan responsif gender kepada rakyatnya, perempuan dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan dan situasi berbeda, mempertimbangkan perbedaan ini dalam intervensi pembangunan, memberi peluang yang lebih besar bagi efektifitas dan efisiensi hasil pembangunan.
4. Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat

yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki.

5. PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat. Hal ini menegaskan wujud komitmen pemerintah untuk berlaku adil kepada seluruh rakyat Indonesia.

Kesetaraan hak laki-laki dan perempuan telah disuarakan sejak tahun 1984 melalui UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Namun khusus PUG baru dimulai secara formal dan menyeluruh setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender. Secara umum inpres ini menginstruksikan kepada kementerian negara dan kepala daerah untuk menerapkan PUG dalam pembangunan.

Secara lebih teknis implementasi PUG di provinsi dan kabupaten/kota diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang telah mendapatkan perubahan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Melalui Permendagri ini maka pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan PUG dengan cara: menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender tersebut dilakukan melalui analisis gender² (Pasal 4 Permendagri 67 tahun 2011).

Agar hal ini terwujud maka ketersediaan data yang menggambarkan situasi dan kondisi laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan sangat dibutuhkan. Sehingga diketahui capaian pembangunan laki-laki dan perempuan dan strategi intervensi yang perlu dilakukan. Profil gender menjadi salah satu cara yang mendukung hal ini. Selain menyediakan data terpilah profil gender juga membahasakan data dengan perspektif gender dengan harapan perencana dan pelaksana pembangunan mengetahui kesenjangan yang masih ada dan merencanakan tindakan untuk mencegahnya. Hal ini lah

2 Analisis Gender akan di jelaskan pada sub pembahasan terpisah

yang diharapkan dari pemanfaatan profil gender yang tersedia ini.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan “Profil Gender Gayo Lues Tahun 2019” dimaksudkan untuk melihat capaian pembangunan Gayo Lues yang berbasis data pilah sehingga diharapkan dapat menjadi informasi penting baik dalam agenda evaluasi maupun umpan balik (feed back) proses perencanaan pembangunan daerah.

Dengan maksud tersebut maka tujuan khusus penyusunan buku Profil Gender ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi masalah dan isu kesenjangan gender yang terjadi pada pada pembangunan di gayo Lues.
2. menguraikan capaian pembangunan yang secara spesifik melihat tingkat partisipasi dan kontrol laki-laki dan perempuan didalamnya dengan dukungan data terpilah.
3. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Gayo Lues dan stakeholder lainnya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan yang responsif bagi laki-laki dan perempuan di masa mendatang yang berbasis pada temuan-temuan penting dalam Profil Gender Gayo Lues 2019.

1.3 Signifikansi

Penyusunan “Profil Gender Gayo Lues Tahun 2019” ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan dan peningkatan kualitas Pengarusutamaan Gender (PUG) di Gayo Lues. Dengan tersedianya data profil gender ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi tingkat capaian, hambatan dan tantangan di masa mendatang. Data yang akurat dan mutakhir merupakan informasi dasar yang sangat menentukan penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang lebih baik. Profil Gender ini menjadi sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten gayo Lues khususnya bagi internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gayo Lues sebagai salah satu *leading* sektor dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

1.4 Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penyusunan “Profil Gender Gayo Lues Tahun 2019” menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Fokus penelitian kuantitatif diidentifikasi sebagai proses kerja yang berlangsung secara ringkas, terbatas dan memilah-milah permasalahan menjadi bagian-bagian yang dapat diukur atau dinyatakan dalam angka-angka.

Penelitian kuantitatif menggunakan instrumen (alat pengumpul data) yang menghasilkan data numerical (angka). Dipilihnya pendekatan kuantitatif dalam penyusunan Profil Gender ini disebabkan karena masalah yang akan diteliti sudah bisa diprediksi atau sudah jelas.

2. Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Ruang lingkup dalam Profil Gender Gayo Lues adalah bidang politik, Pendidikan, Kesehatan, Kekerasan Terhadap Perempuan, ketahanan keluarga. Dikarenakan buku ini merupakan Profil Gender Gayo Lues, maka lokasi penelitian adalah seluruh kecamatan di Gayo Lues.

3. Sumber dan Cara Pengumpulan Data

Penyusunan “Profil Gender Gayo Lues Tahun 2019” ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder berupa dokumen resmi pemerintah baik pada level nasional maupun daerah. Dokumen dimaksud seperti beberapa dokumen yang langsung diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 dan Gayo Lues Dalam Angka Aceh 2018. Selain itu juga beberapa dokumen yang diterbitkan oleh SKPK Gayo Lues sesuai dengan kebutuhan data yang ingin disajikan dalam penyusunan buku ini. Pengumpul data atau enumerator adalah SDM Gayo Lues yang diantaranya berasal dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPP PA- PP dan KB.

Belum semua data yang tersedia sudah dipilah berdasarkan jenis kelamin sehingga tim penyusun berusaha memilah kembali berdasarkan aspek-aspek yang sudah disepakati untuk dianalisis. Oleh karena itu, sejumlah data yang diperoleh kemudian dipilah berdasarkan kategorisasi dan ditampilkan dalam tabel dan atau grafik untuk lebih mudah dipahami oleh pembaca.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik statistik guna mereduksi dan mengelompokkan data, menentukan hubungan serta mengidentifikasi perbedaan antara kelompok data. Kontrol, instrumen dan analisis statistik digunakan untuk menghasilkan temuan-temuan penelitian secara akurat. Dengan demikian kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian kuantitatif dapat diperlakukan secara umum.

Tim penyusun berusaha sungguh-sungguh untuk menyajikan data secara terpilah berbasis jenis kelamin, kecuali dalam beberapa bentuk data yang harus disajikan secara umum. tetapi tetap diperlukan sebagai basis informasi penting yang nantinya punya korelasi dengan isu-isu gender. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang mengacu pada analisis gender dengan lebih menonjolkan aspek komposisi data terpilah laki-laki dan perempuan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Buku Profil Gender Aceh Gayo Lues Tahun 2019 ini disusun dalam beberapa bab untuk membantu pembaca dalam menemukan informasi yang dibutuhkan secara cepat. Pembahasannya dipisah berdasarkan bidang pembangunan yang dianalisis, yang secara lengkap akan diuraikan sebagai berikut.

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang didalamnya berisikan pembahasan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Signifikasi dari buku Profil Gender ini, Metodologi Penelitian yang menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, ruang lingkup, sumber dan cara pengumpulan data, dan analisis data. Dibagian akhir bab 1 akan diuraikan mengenai Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan bab tentang Gambaran Umum Gayo Lues. Pada bab ini diuraikan mengenai informasi Geografis dan Demografis Aceh, Konteks Sosial Budaya dan keagamaan, Perkembangan IPM, IPG dan IDG.

Bab III merupakan bab tentang Gender dan Pendidikan yang didalamnya akan membahas tentang Status Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Murni (APM), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Pendidikan Tertinggi yang ditamatak, Angka

Melek Huruf (AMH), Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah, Rasio Guru dan Siswa, dan Kualifikasi Akademik Guru.

BAB IV merupakan bab tentang Gender dan Kesehatan tentang penduduk dengan keluhan kesehatan, layanan obat jalan, layanan rawat inap, rata rata lama rawat inap, dan penggunaan jaminan kesehatan.

Bab V merupakan bab tentang pengambilan keputusan, meliputi data anggota legislative DPRK Gayo Lues, dan Pengambil kebijakan berdasarkan eselon.

Bab VI merupakan bab tentang kekerasan terhadap perempuan yang akan membahas tentang data kekerasan dan keberfungsian lembaga layanan.

Bab VII berisi tentang Ketahanan Keluarga yang diulas dari variable dan indicator ketahanan keluarga. Landasan yuridis, hokum, ekonomi, dan lainnya.

Bab VIII merupakan bab Rekomendasi yang akan merangkum temuan-temuan penting dari tiap-tiap bab sebelumnya dan memberikan rekomendasi untuk mempercepat peningkatan indeks pembangunan gender di Provinsi Aceh.

Selain penyusunan substansi pada bab-bab sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, buku profil gender ini juga dilengkapi dengan Kata Sambutan dari Kepala DPPPAA Provinsi Aceh dan Kata Pengantar dari Tim Penulis. Untuk memudahkan pembaca, buku ini juga dilengkapi dengan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan dan daftar pustaka. Di bagian akhir buku juga dilengkapi dengan profil penulis sebagai informasi tambahan bagi pembaca.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Pembentukan

Gayo Lues merupakan kabupaten yang terletak di dataran tinggi Provinsi Aceh. Gayo berasal dari bahasa Aceh kuno yang diadopsi dari bahasa sansekerta yang artinya Gunung dan Lues berarti Luas dalam bahasa setempat. Maka dapat di simpulkan Gayo Lues berarti gunung luas atau pegunungan yang luas yang terletak di gugusan bukit barisan.

Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan Dasar Hukum UU No.4 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002. Kabupaten ini berada di gugusan pegunungan Bukit Barisan. Sebagian besar wilayahnya merupakan areal Taman Nasional Gunung Leuser yang telah dicanangkan sebagai warisan dunia. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang paling terisolasi di Aceh. Selain itu, daerah ini merupakan asal Tari Saman yang pada Desember 2012 telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO di Bali.

Pada mulanya daerah Gayo dan Alas membentuk pemerintahan sendiri terpisah dari Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karena itu terbentuklah Kabupaten Aceh Tenggara (UU No. 4/1974). Namun karena daerah Gayo mengalami kesulitan, mereka pun membentuk kabupaten tersendiri yang dinamakan Kabupaten Gayo Lues (UU No. 4/2002). Pusat pemerintahan dari kabupaten ini dikendalikan dari Desa Cinta Maju sedangkan pusat perekonomian tetap di ibu kota Blangkejeren. Adapun pejabat Bupati ditetapkan Ir. Muhammad Ali Kasim, M.M.

2.2 Letak Geografis dan Batas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Gayo Lues berada pada 96o 43' 24" – 97o 55' 24" BT dan 3o 40' 26" – 4o 16' 55" LU. Kabupaten Gayo Lues disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Langkat (Prov. Sumut). Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Selatan. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, dan Aceh Timur, Kabupaten Nagan Raya serta di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Aceh Barat Daya.

Wilayah Kabupaten Gayo Lues terletak di ketinggian 100-3000 meter di atas permukaan laut (m dpl), 56,08 persen wilayahnya berada di ketinggian 1000-2000 meter di atas permukaan laut dan 43,93 persen wilayahnya berada di kemiringan di atas 40 persen yang berupa pegunungan. Sebagian kawasan merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser.

Di sekeliling Kabupaten Seribu Bukit ini, ada hutan yang luasnya mencapai 554,991 hektar, terdiri hutan lindung, Taman Nasional Gunung Leuser, hingga hutan produksi. Bentang alamnya yang indah menjadi daya tarik wisatawan untuk datang, baik lokal maupun mancanegara. Tak ketinggalan juga para peneliti yang mendatangi Negeri Di atas Awan ini, julukan Gayo Lues.

Datang ke Gayo Lues, kita akan disuguhi pemandangan perbukitan yang masuk gugusan bukit barisan dengan bentangan hutan. Pemandangan luar biasa ini bisa dilihat di sepanjang jalan penghubung dari Kabupaten Aceh Tengah atau dari Kabupaten Aceh Tenggara. Pemandangan hutan alami, semakin terlihat indah yang berpadu dengan aliran air sungai yang berliku, dingin, dan bersih.

Gayo Lues merupakan hulu dari tiga daerah aliran sungai (DAS) terpanjang di Aceh, yaitu DAS Alas-Singkil, DAS Tamiang, dan DAS Tripa. Aliran sungai ini menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan yang menyukai wisata sungai dan arung jeram.

Hampan sawah yang langsung berbatasan dengan perbukitan dan hutan pinus menambah keindahan Gayo Lues yang sungguh alami. Petani yang menanam padi bergotong royong, masih ditemukan di sini, kebiasaan turun ke sawah yang perlahan mulai sulit ditemukan di beberapa daerah.

Wilayahnya yang berada di ketinggian 500 – 2.000 meter diatas permukaan laut (m dpl), dikelilingi hutan Kawasan Suaka Alam Ekosistem Leuser (KEL), hutan terluas di Asia Tenggara dengan beragam flora dan fauna yang merupakan paru- paru dunia.

Ibukota kecamatan terjauh dari ibukota Kabupaten Gayo Lues adalah Rerebe yang menjadi ibukota Kecamatan Tripejaya, sejauh 55 Km. Sedangkan ibukota kecamatan terdekat dari ibukota Kabupaten Gayo Lues adalah Badak Bur Jume sebagai ibukota Kecamatan Dabun Gelang, sejauh 2 Km.

Luas wilayah Kabupaten Gayo Lues adalah 5.549,91 km² dengan Kecamatan Pining sebagai kecamatan terluas yakni dengan presentase 24,33 persen wilayah Gayo Lues. Sedangkan Kecamatan Blangkejeran dengan luas terkecil yaitu dengan luas 2,99 persen wilayah Gayo Lues.

2.3 Ekonomi dan Sosial Budaya

Kabupaten yang berpenduduk multi etnis ini sedang berbenah diri untuk mengejar ketertinggalannya dalam pembangunan. Potensi pertanian menjadi prioritas utama pengembangan pertanian. Beberapa komoditas potensial yang dimiliki kabupaten ini adalah: cabe merah besar di kecamatan Blang Pegayon dan Puteri Betung, Serai Wangi, yang dikembangkan di sela-sela pepohonan pinus di hampir seluruh wilayah Gayo Lues, Nilam, yang banyak ditanam di daerah Terangun, Tembakau Virginia di Kecamatan Pantan Cuaca, Kakao di kecamatan Puteri Betung, Kopi Gayo di Kecamatan Pantan Cuaca, Durian di Kecamatan Pining dan jagung di kecamatan blang kejeran.

Masyarakat Gayo lues mempunyai adat istiadat yang khas. Kental dengan nuansa Islami. Berbagai ungkapan, tersurat dalam pepatah- pepatah bijak dengan makna yang dalam dan banyak ditemukan dalam kebudayaan Gayo. Salah satunya adalah ungkapan: Asal Linge Awal Serule, petuah bijak yang meng isyaratkan jati diri. Ungkapan tersebut berarti kalau suku Gayo berasal dari Linge dan berawal dari Selure. Ungkapan Asal Linge Awal Selure juga adalah sebuah semboyan. Dalam kesenian Saman di setiap pembukaannya selalu menyebutkan Asal Linge Awal Selure. Ini dimaksudkan sebagai sebuah idenidentitas diri masyarakat Gayo.

Meskipun masing - masing suku mempunyai budaya, bahasa dan pola pikir masing-masing, namun suku Gayo dengan nilai khas sosial budaya mendominasi pola hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat

Kabupaten Gayo Lues terdapat sistem nilai budaya Sarak dan Jema Opat.

Sarak dimaksud adalah kampung, dimana daerah pemerintahan terkecil. Sarak ini diperintah oleh Jema Opat, yaitu : Sudere, Urang Tue, Pegawe dan Pengulute. Keempat unsur jema opat ini mempunyai fungsi masing-masing sebagai berikut : (1) Sudere adalah rakyat banyak, fungsinya genap mufakat. Golongan ini dapat disamakan dengan badan pekerja dan bersatu padu melaksanakan segala tugas untuk kepentingan bersama; (2) Urang Tue adalah perwakilan yang anggotanya diambil dari orang-orang tua yang memiliki banyak pengalaman, fungsinya musidik sasat, yaitu meneliti segala pekerjaan yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama dan juga sebagai penasehat adat; (3) Pegawe adalah golongan masyarakat yang anggotanya diambil dari para ahli dalam pertukangan dan pengetahuan lainnya, fungsinya muperlusunet, yaitu mereka mengetahui apa yang harus dikerjakan untuk kesejahteraan bersama; dan (4) Pengulute adalah pemimpin kampung yang diangkat berdasarkan pemilihan secara langsung, yang berfungsi sebagai musuket sifet, yaitu sebagai pemimpin masyarakat secara adil, tidak berat sebelah.

Kabupaten Gayo Lues tidak lepas dari Tari Saman yang kerap ditampilkan untuk merayakan peristiwa- peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman menggunakan bahasa Gayo. Selain itu biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tari saman merupakan salah satu media untuk pencapaian pesan (dakwah). Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan dan kebersamaan. Dan tepatnya pada tanggal 24 November 2011 di Bali, Organisasi Dunia Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa- Bangsa (UNESCO) mengakui dan mengukuhkan Tarian Saman (Saman Dance) sebagai warisan budaya dunia tidak benda (Intangible Heritage).

Adapun potensi pariwisata paling besar yang bisa dikembangkan di Gayo Lues, adalah pariwisata alam dan pariwisata budaya. Pariwisata Alam sangat didukung oleh keberadaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan kawasan hutan.

Di dalam kawasan TNGL sebagai paru-paru dunia dengan keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa didapatkan suasana hutan tropis dengan hawa yang sejuk, sungai bebas pencemaran dengan debit stabil

dan bervariasi sehingga menjanjikan untuk track arung jeram.

2.4 Demografi

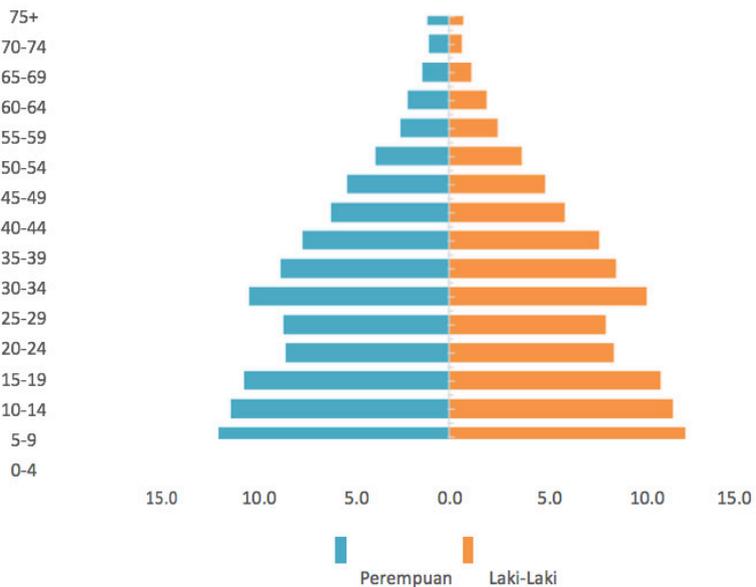
Demografi atau kependudukan meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Demografi sangat bermanfaat untuk mempelajari kuantitas, komposisi, dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu serta perubahan perubahannya, menjelaskan pertumbuhan masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk pada masa datang, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dan bermacam macam aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan keamanan serta untuk mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konsekuensi pertumbuhan atau perkembangan aspek tertentu yang ingin dilihat dari kondisi masyarakat. (diolah dari berbagai sumber online).

Penduduk kabupaten Gayo Lues berasal dari berbagai etnik dan suku. suku Gayo, Aceh, Melayu, Tionghoa, Alas, Minang, Batak Toba, Mandailing, Karo, Sunda, Singkil, Pakpak, Devayan, Jawa dan lain-lain. Adanya latar belakang etnis yang beragam memiliki dua dimensi. Dimensi pertama jika dapat dikembangkan akan menjadi masyarakat yang tangguh dan toleran tetapi juga berarti pemerintah mengalami kesulitan dalam hal pemerintahan. Bahkan, tidak jarang terjadi perbedaan antara kelompok yang berakar pada perbedaan etnis akan menyebabkan pemerintah kesulitan dalam memetakan atau memformulasikan suatu kebijakan, dalam hal ini kebijakan PUG yang substansinya sangat dipengaruhi oleh berbagai latar belakang pendidikan, budaya bahkan agama. (Indonesia Investmen Newsletter, diakses pada 27/11/2019).

Secara kuantitas, BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Gayo Lues

memperkirakan. Jumlah penduduk Kabupaten Gayo Lues pada pertengahan tahun 2018 berjumlah 92.602 jiwa yang terdiri dari 46.099 laki-laki dan 46.503 perempuan dengan rasio jenis kelamin 99. Wilayah yang terbanyak jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Blangkejeren yakni sebanyak 28.440 jiwa, dan yang terkecil jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Pantan Cuaca yakni 4.050 jiwa. Sementara jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2018 sebanyak 48.005 jiwa dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 78,28 dan Tingkat Pengangguran sebesar 2,52.

Gambar 2.1 Piramida Perkiraan Penduduk Kabupaten Gayo Lues Menurut Usia, Juni 2018



Sumber : BPS Gayo Lues

Selanjutnya akan diketengahkan gambar yang menjelaskan angkatan kerja di Gayo Lues

Gambar 2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Kab. Gayo Lues, 2007-2018



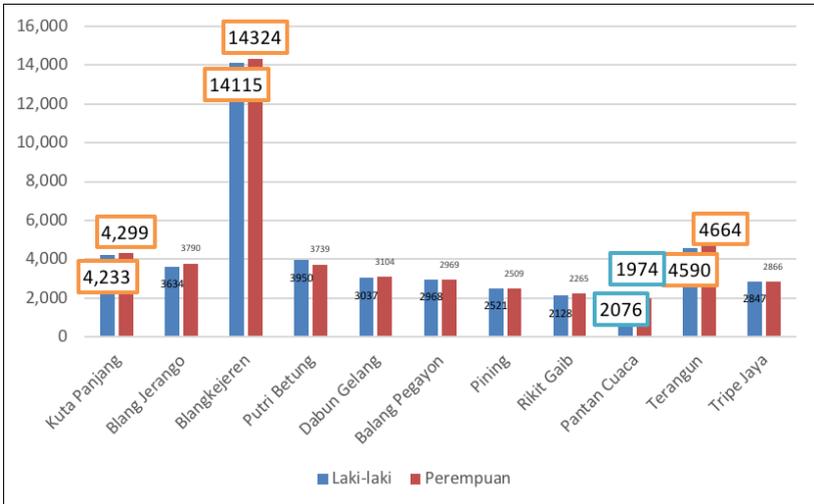
Sumber : BPS Gayo Lues

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan seiring dengan menurunnya angka pengangguran. Angka pengangguran menurun drastis sejak tahun 2011 6,93% menjadi 2,97 % di 2012 dan puncak penurunan di 2014 yaitu 0,37%. Namun tahun 2015 sedikit mengalami peningkatan menjadi 2,24%, turun sedikit di 2017 dan kembali naik sedikit di tahun 2018 menjadi 2,52%.

Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dan puncaknya pada tahun 2015 yang mencapai 79,09%, menurun sedikit di tahun 2017 lalu kembali naik di tahun 2018 menjadi 78,28%. Namun secara umum angka partisipasi ini tampak meningkat secara konsisten sejak tahun 2012 sampai 2015, meski turun sedikit di 2017, namun kembali meningkat di tahun 2018.

Gambar berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kecamatan Ada 11 kecamatan di Gayo Lues dengan jumlah penduduk yang sangat bervariasi. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.3 Perkiraan Penduduk Kabupaten Gayo Lues Dirinci Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan, Juni 2018

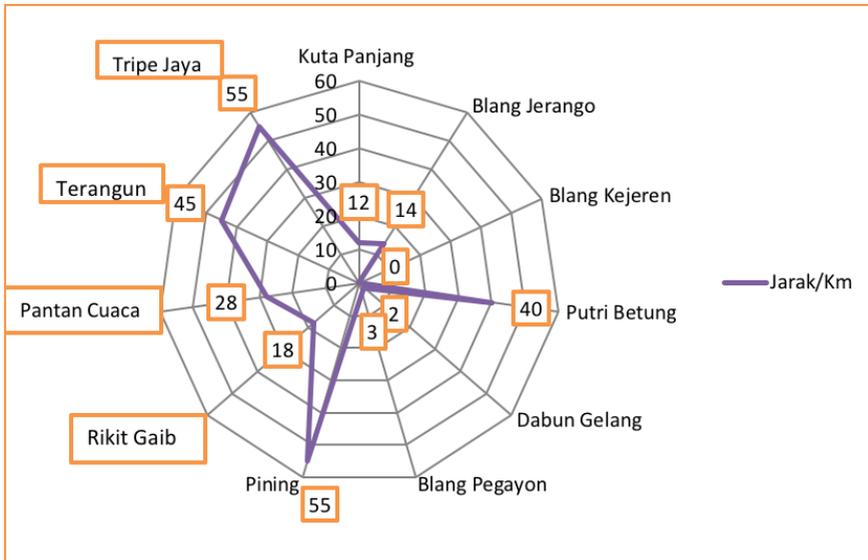


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2018

Dari gambar di atas diketahui bahwa sebaran jumlah penduduk Kabupaten Gayo Lues terpusat di Kecamatan Blangkejeren. 27.956 jiwa penduduk Gayo Lues menetap di Kecamatan Blang Kejeren, yaitu 31% dari total penduduk kabupaten Gayo Lues. Blang Kejeren adalah kecamatan dengan luas wilayah paling kecil dibanding kecamatan yang lain, namun menjadi kecamatan terpadat karena menjadi pusat pemerintahan. Kecamatan terpadat kedua adalah Kecamatan Terangun dengan jumlah penduduk 9097 jiwa, diikuti Kecamatan Kuta Panjang dengan penduduk 8387 jiwa. Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Pantan Cuaca dengan jumlah penduduk 3.981 jiwa.

Sebaran jumlah penduduk ini terkait juga dengan jarak kecamatan dengan pusat pemerintahan. Gambar berikut akan mengetengahkan jarak antara masing masing kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten yaitu Blang Kejeren.

Gambar 2.4 Jarak kecamatan di Gayo Lues ke Pusat Pemerintahan



Sumber: Gayo Lues Dalam Angka 2018

Dari gambar di atas diketahui ada dua kabupaten paling jauh dari pusat pemerintahan yaitu kabupaten Pining dan Tripe Jaya yaitu 55 Km dari pusat pemerintahan. Lalu diikuti dengan Terangun 45 Km dan Putri Betung 40 Km. Dan kecamatan yang paling dekat dan berada di sekitar pusat pemerintahan adalah Blangkejeren, Dabun Gelang dan Blang Pegayon. Blangkejeren selaku kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan menjadi daerah yang paling padat.

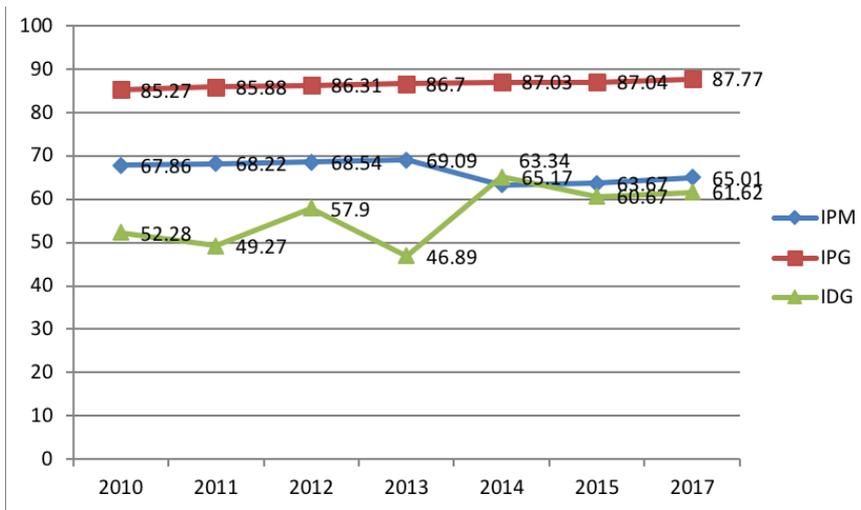
2.5 Perkembangan IPM, IPG dan IDG

Kualitas pembangunan manusia di Gayo Lues dapat diketahui dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: 1) Umur panjang

dan hidup sehat, 2) Pengetahuan, dan 3) Standar hidup layak. Adapun IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara IDG mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. IPG dan IDG menjadi alat monitoring yang penting untuk mengukur hasil pembangunan dari segi kesetaraan dan keadilan gender.

Gambar berikut adalah capaian IPM, IPG dan IDG Gayo Lues Sejak 7 tahun terakhir.

Gambar 2.5 Perbandingan IPM IPG dan IDG Gayo Lues

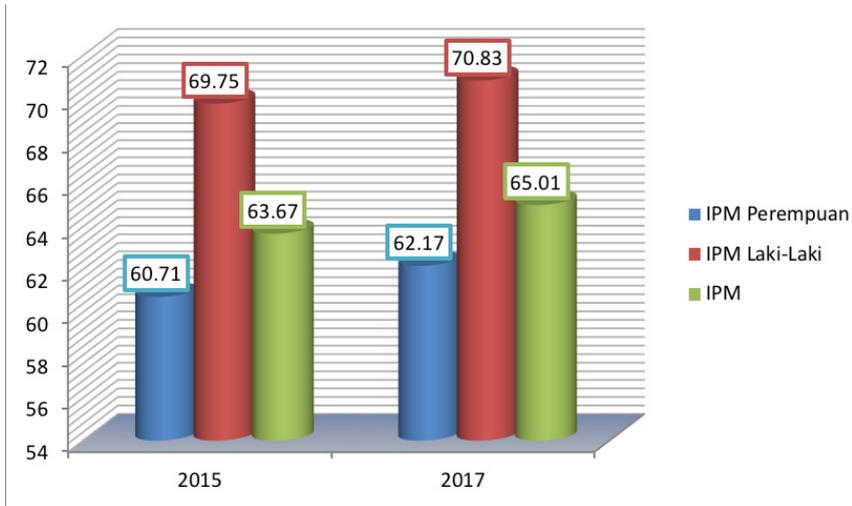


Sumber: Data diolah dari Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2018

Gambar di atas menunjukkan bahwa indeks pemberdayaan gender cenderung meningkat. Akan tetapi indeks pemberdayaan manusia (IPM) mengalami penurunan yang drastis di tahun 2014. Meski perlahan naik kembali namun belum mencapai jumlah yang tinggi seperti sebelum turun di 2013 yaitu 69,09. Sementara IDG cenderung rendah nilainya dibanding IPM dan IDG Gayo Lues. Selain itu IDG juga menunjukkan kecenderungan yang tidak stabil dari tahun ke tahun. IDG memang secara umum di tingkat nasional relative

lebih rendah. Pada nilai IPM juga terjadi kesenjangan jika dibandingkan IPM laki laki dan perempuan. Gambar berikut akan menengentahkan hal ini.

Gambar 2.6 Perbandingan IPM Laki-Laki dan Perempuan Gayo Lues tahun 2015 dan 2017



Sumber: data diolah dari PMBG 2015 dan 2018

Gambar di atas menunjukkan angka kesenjangan yang mencolok dari IPM laki laki dan perempuan. Dapat disebutkan SDM perempuan Gayo Lues tertinggal dibanding SDM laki-laki. Ketertinggalanya sama, baik pada tahun 2015 juga pada tahun 2019. Ketika IPM Gayo Lues meningkat di tahun 2017 menjadi 65,01, IPM laki-laki dan perempuan juga meningkat tetapi angka kesenjangan tetap bertahan. Mengingat jauhnya selisih IPM laki dan perempuan di Gayo Lues, maka pemerintah Gayo Lues sudah seharusnya menerapkan langkah langkah khusus sementara (*affirmative action*) sehingga pembangunan bisa membaik dan angka kesenjangan menurun.

Jika dilihat perbandingan pencapaian IPM Gayo Lues dengan kabupaten kota lainnya juga nasional, maka akan terlihat posisi kabupaten Gayo Lues yang tertinggal.

Tabel 2.1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten di Provinsi Aceh 2014-2018

No	Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018
1	Simeulue	62,18	63,16	63,82	64,41	64,74
2	Aceh Singkil	65,27	66,05	66,96	67,37	68,02
3	Aceh Selatan	62,35	63,28	64,13	65,03	65,92
4	Aceh Tenggara	65,90	66,77	67,48	68,09	68,67
5	Aceh Timur	63,57	64,55	65,42	66,32	66,82
6	Aceh Tengah	70,96	71,51	72,04	72,19	72,64
7	Aceh Barat	67,31	68,41	69,26	70,20	70,47
8	Aceh Besar	71,06	71,70	71,75	72,00	72,73
9	Pidie	67,87	68,68	69,06	69,52	69,93
10	Bireuen	68,71	69,77	70,21	71,11	71,37
11	Aceh Utara	65,93	66,85	67,19	67,67	68,36
12	Aceh Barat Daya	63,08	63,77	64,57	65,09	65,67
13	Gayo Lues	63,34	63,67	64,26	65,01	65,88
14	Aceh Tamiang	66,09	67,03	67,41	67,99	68,45
15	Nagan Raya	65,58	66,73	67,32	67,78	68,15
16	Aceh Jaya	67,30	67,53	67,70	68,07	68,83
17	Bener Meriah	70,00	70,62	71,42	71,89	72,14
18	Pidie Jaya	69,89	70,49	71,13	71,73	72,12
19	Kota Banda Aceh	82,22	83,25	83,73	83,95	84,37
20	Kota Sabang	71,50	72,51	73,36	74,10	74,82
21	Kota Langsa	73,81	74,74	75,41	75,89	76,34
22	Kota Lhokseumawe	74,44	75,11	75,78	76,34	76,62
23	Kota Subulussalam	60,39	61,32	62,18	62,88	63,48
	Aceh	68,81	69,45	70,00	70,60	71,19

Secara nasional, sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia sudah mencapai kategori pembangunan manusia “sedang” pada tahun 2016. Terdapat 312 kabupaten/kota atau sekitar 60,70 persen yang telah mencapai kategori ini. Sekitar 28,21 persen kabupaten/kota sudah berada pada level

“tinggi” dan sisanya sebagian kecil berada pada level “sangat tinggi” dan “rendah”. (Profil Gender Aceh 2017).

Posisi Kabupaten Gayo Lues masih jauh dibandingkan Kabupaten/ Kota lainnya di Aceh. Gayo Lues 65,88 setingkat di atas Aceh Barat Daya (65,67) disusul Simeulue (64,74). Dengan kata lain masuk tiga besar IPM terendah sehingga hal yang harus diperhatikan adalah dimensi yang melekat pada pengukuran IPM tersebut baik pendidikan, kesehatan maupun standard hidup layak.

Memang kurang tepat membandingkan Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten- Kabupaten lainnya di Aceh, selain Aceh sendiri yang sempat didera konflik berkepanjangan dan tsunami 2004 silam, Kabupaten ini juga termasuk salah satu Kabupaten pemekaran termuda. Tentu juga tidak mudah untuk meningkatkan kualitas hidup melalui dimensi-dimensi tersebut.

Diperlukan sikap realistik dan upaya-upaya keras yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai sektor (multi-sektor) dan berbagai peran (multi-aktor) mengingat kompleksitas dan keterkaitan berbagai aspek tersebut dalam kehidupan yang nyata melalui kebijakan- kebijakan dan terobosan strategis.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan UNDP dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1995, persisnya lima tahun setelah IPM diluncurkan. IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Diharapkan dari angka IPG ini mampu memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender.

Pembangunan manusia secara kuantitatif dapat digambarkan dari angka IPM. Namun demikian, angka IPM ini belum mampu menjelaskan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan. Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap kemampuan dasar antara laki-laki dan

perempuan dijelaskan dengan melihat rasio antara IPG dengan IPM. Semakin tinggi rasionya maka semakin rendah gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan, sebaliknya semakin rendah rasio maka semakin tinggi gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan.

Merujuk pada “Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016” posisi Aceh menunjukkan capaian pada angka 92,07. Tetapi kembali ke rasio, bahwa secara kuantitatif IPM Kabupaten Gayo Lues masih menempati urutan katagori rendah, tetapi tidak secara otomatis bahwa IPG juga rendah.

Meskipun IPM laki-laki dan perempuan di suatu wilayah sudah berada pada level yang tinggi, jika tidak setara maka akan memberikan IPG yang lebih rendah. Demikian pula sebaliknya. IPG yang lebih tinggi dapat terjadi pada wilayah yang memiliki IPM laki-laki dan perempuan yang lebih rendah namun setara. Penyebabnya adalah gap antara IPM laki-laki dan perempuan.

Posisi Aceh sendiri sebenarnya sudah melampaui pencapaian nasional (91,03) dimana IPG Aceh pada tahun 2015 mencapai 92,07. Angka ini juga berada pada urutan nomor empat tertinggi dari sepuluh provinsi di tingkat Sumatera. Tingkat pencapaian level provinsi tersebut tentu tidak terlepas dari pencapaian kabupaten/kota di Aceh. Semakin tinggi pencapaian kabupaten/kota maka semakin tinggi pula angka IPG yang diperoleh Aceh pada level provinsi.

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), UNDP juga mengenalkan ukuran komposit lainnya yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Kedua ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

Tetapi dari aspek kualitas, masih terdapat banyak hal yang perlu

ditingkatkan terkait dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk mengkaji lebih jauh peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, peran dalam politik dan ekonomi maka dapat digunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan.

IDG Kabupaten Gayo Lues berada pada posisi yang cukup (sedang), apalagi dengan anggregat (kesenjangan) jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif tidak terlalu tinggi. Namun, perlu terus dilakukan monitoring dan evaluasi. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi partisipasi perempuan dalam parlemen, proporsi tenaga profesional perempuan, dan kontribusi perempuan dalam perekonomian. Indikator-indikator tersebut tidak dapat ditingkatkan dalam jangka pendek. Selain faktor kapabilitas perempuan, faktor lain yang diduga juga memiliki peran penting adalah persepsi dan budaya masyarakat terhadap keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Berbagai program sosialisasi, advokasi dan fasilitasi untuk mendorong peningkatan peran perempuan dapat dijadikan sebagai pilihan yang baik.

BAB III

GENDER DAN PENDIDIKAN

Pendidikan memiliki peranan strategis dalam pembangunan. Pendidikan merupakan investasi untuk membentuk sumber daya manusia berkualitas. Pendidikan yang baik akan mampu melahirkan jiwa pembaharu, yaitu jiwa yang menjadi motor penggerak pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan.

Secara internasional tujuan pembangunan di bidang pendidikan tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan sustainable development goals (SDGs). Tujuan tersebut secara khusus terdapat pada tujuan keempat yaitu memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Artinya pembangunan pendidikan harus menjamin laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Terbukanya akses perempuan untuk bersekolah dapat menekan kesenjangan pendidikan antar jenis kelamin.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia no 34 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 48 dinyatakan bahwa perempuan berhak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pasal 60 ayat (1) menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.²

Kesetaran gender dalam pendidikan merupakan kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban, kedudukan, peranan dan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan dan pembangunan. Semua itu dilandasi atas dasar saling menghormati, saling menghargai,

² Undang-Undang Republik Indonesai no 34 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, h.12.

saling membantu, saling mengisi dan sebagainya dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³

Untuk melihat kesetaraan gender dalam pendidikan dapat dicermati pada tiga isu utama, yaitu (1)Pemerataan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang diukur pada indikator Status Pendidikan, Angka Patisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan Angka Melek Huruf (AMH). (2) Mutu pendidikan, yang diukur dari rasio jumlah guru dan siswa dan kualifikasi akademik guru. (3). Manajemen pendidikan, yang dapat diukur dari status kepegawaian guru.

3.1 Status Pendidikan

Status pendidikan suatu wilayah merupakan salah satu hal penting yang harus diketahui untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan wilayah tersebut. Dalam perspektif gender, persentase jumlah laki-laki dan perempuan yang terdata dalam status pendidikan tertentu membantu dalam analisis sejauh mana pembangunan dalam bidang pendidikan telah berperan dalam mewujudkan keadilan gender bagi kedua kelompok jenis kelamin tersebut. Tabel 3.1 akan menyajikan jumlah dan persentase penduduk Gayo Lues dalam usia menempuh pendidikan berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 3.1 Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gayo Lues, 2018

Kelompok Usia dalam Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah total	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-4	5.541	50,5%	5.419	49,4%	10.960	100%
5-9	5.320	50,5%	5.207	49,4%	10.527	100%
10-14	5.068	50,7%	4.918	49,2%	9.986	100%
15-19	3.900	50,1%	3.877	49,8%	7.777	100%
20-24	3.681	48,7%	3.863	51,2%	7.544	100%

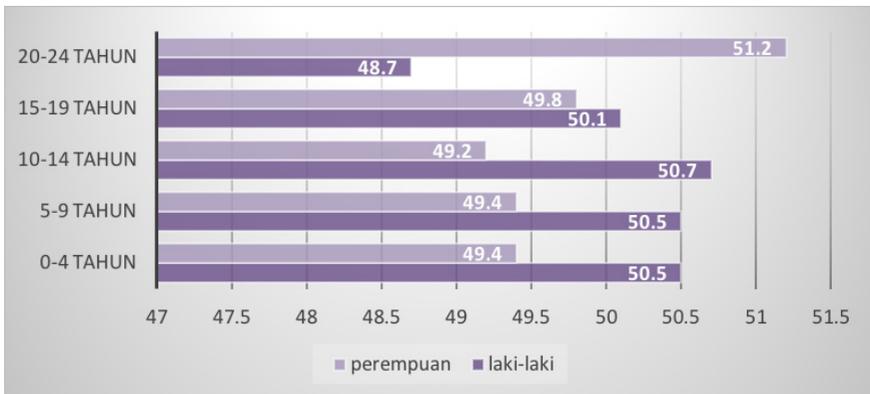
Sumber:BPS Gayo Lues dalam Angka, 2019

3 Warni Tune Sumar, Implementasi Kesetaran Gender dalam Bidang Pendidikan, Jurnal Musawa, vol7,no.1 juni2015, h.166.

Tabel diatas menjelaskan bahwa perbandingan persentase jumlah penduduk usia 0-4 tahun antar laki-laki dan perempuan adalah 50,5% dan 49,4%. Selisih angka antara kedua jenis kelamin ini sangat tipis. Demikian pula untuk penduduk Gayo Lues dalam kelompok usia 5-9 tahun, angka perbandingan persentasenya laki-laki 50,5% dan perempuan 49,4%. Untuk kelompok usia 10-14 tahun selisihnya juga tipis yaitu, laki-laki 50,7% dan perempuan 49,2%. Tidak jauh berbeda untuk kelompok usia 15-19 tahun, laki-laki berjumlah 50,1% perempuan berjumlah 49,8%. Namun berdasar data diatas terlihat selisih yang agak lebih besar adalah pada kelompok usia 20-24 tahun. Dalam kelompok ini persentase jumlah laki-laki lebih sedikit yaitu 48,7% dibanding jumlah perempuan yaitu 51,2%.

Data ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk gayo Lues dalam kelompok usia pendidikan antara usia PAUD, SD, SMP sampai dengan SMA lebih banyak laki-laki dibanding jumlah perempuan dengan selisih yang sangat tipis. Namun dalam kelompok usia pendidikan perguruan tinggi, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki, sekalipun selisihnya juga sangat tipis. Untuk lebih jelas gambaran tentang perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam usia pendidikan di Gayo Lues dapat diamati dalam gambar berikut ini:

Gambar 3.1 Perbandingan Persentase Penduduk dalam Usia Pendidikan Antara Jenis Kelamin Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Gayo Lues, 2018



Sumber: BPS Gayo Lues dalam Angka, 2019

Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Gayo Lues yang berjenis kelamin laki-laki dalam usia pendidikan dari PAUD, SD, SMP, dan SMA lebih banyak dari perempuan, sementara penduduk dalam usia jenjang pendidikan tinggi lebih didominasi perempuan. Artinya, di Kabupaten Gayo Lues penduduk dalam usia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah lebih banyak laki-laki dibanding perempuan, sementara dalam usia pendidikan tinggi atau usia produktif jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki.

3.2 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Angka partisipasi sekolah tahun 2018 di Kabupaten Gayo Lues sebagaimana ditunjukkan oleh table 3.2 berikut ini:

Tabel.3.2 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Gayo Lues, 2018

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Partisipasi Sekolah				Jumlah
	Tidak/ Belum Pernah sekolah	Masih Sekolah	Masih Perguruan Tinggi	Tidak Sekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	6,93	30,29	1,23	61,55	100,00
Perempuan	14,94	27,02	1,58	56,46	100,00
Laki-laki + Perempuan	10,93	28,66	1,40	59,01	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, Maret 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk Kabupaten Gayo Lues pada setiap status pendidikan menunjukkan angka yang variatif. Persentase laki-laki yang tidak/belum pernah sekolah 6,93%

sementara perempuan mencapai 14,94%. Dalam status ini jumlah perempuan melebihi dua kali jumlah laki-laki yang belum/tidak pernah sekolah. Berbeda dengan status berikutnya yaitu penduduk yang masih sekolah, laki-laki mencapai 30,29% dan perempuan berjumlah 27,02%. Dalam status ini laki-laki lebih banyak sekitar 2,8% daripada perempuan. Artinya angka partisipasi pendidikan pada jenjang sekolah lebih tinggi laki-laki dari perempuan dengan selisih sekitar 2,8%. Kenyataan ini menjadi berbeda kembali ketika status pendidikan penduduk dilihat dari partisipasi dalam pendidikan tinggi. Laki-laki yang masih menempuh pendidikan tinggi hanya 1,23% dan perempuan meningkat sedikit yaitu 1,58%. Ini menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antar jumlah laki-laki dan perempuan dalam partisipasi mereka pada jenjang pendidikan tinggi. Dalam status tidak sekolah lagi jumlah persentase laki-laki sekitar 61,55% dan perempuan 56,46%. Selisih banyaknya jumlah laki-laki dibanding perempuan sekitar 4%. Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) perempuan dibanding laki-laki di kabupaten Gayo Lues masih rendah. Untuk lebih jelas dapat dicermati dalam gambar berikut ini:

Gambar. 3.2 Perbandingan Persentase Partisipasi Laki-laki dan Perempuan dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Gayo Lues, 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, Maret 2018

Gambar diatas menjelaskan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk Gayo Lues antara laki-laki dan perempuan belum setara. Kecenderungannya adalah angka partisipasi sekolah laki-laki lebih tinggi

dibanding perempuan, walaupun perbandingannya tipis. Angka Partisipasi

Sekolah laki-laki pada jenjang pendidikan dasar dan menengah lebih banyak sekitar 3,27% dibanding perempuan. Sementara angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan tinggi perempuan lebih tinggi sekitar 0,35% dibanding laki-laki.

Untuk diketahui lebih detail status pendidikan masyarakat Gayo Lues, dapat dilihat dari partisipasi anak usia sekolah yang terdaftar di beberapa jenjang pendidikan. Dalam hal ini data tersedia adalah jumlah anak usia SD yang masuk SD baik negeri maupun swasta pada tahun 2019. Hal ini seperti tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Jumlah Siswa Baru yang Masuk SD Negeri dan Swasta menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gayo Lues, 2019

Jenis Kelamin	SD				Jumlah	
	Negeri		Swasta			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
Laki-Laki	820	52,1%	116	49,1%	936	51,7%
Perempuan	754	47,9%	120	50,8%	874	48,2%
Jumlah	1.574	100%	236	100%	1.810	100%

Sumber: data diolah dari : niep.data.kemdikbud, Kab.Gayo Lues 2019

Berdasarkan data dari table di atas dapat dikatakan bahwa persentase siswa laki-laki yang memasuki SD secara keseluruhan lebih banyak sekitar 3,5% dibanding siswa perempuan. Siswa laki-laki yang memasuki SD negeri sekitar 4,2% lebih banyak ketimbang siswa perempuan. Sementara di SD swasta sebaliknya, siswa perempuan lebih banyak sekitar 1,7% dibanding siswa laki-laki. Dengan demikian, di Kabupaten Gayo Lues partisipasi siswa laki-laki yang masuk SD lebih banyak dibandingkan dengan siswa perempuan.

Untuk lebih jelas informasi ini akan disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 3.3 Perbandingan Siswa Laki-Laki dan Perempuan yang Memasuki SD Negeri dan Swasta di Kabupaten Gayo Lues, 2019



Sumber: data diolah dari : niep.data.kemdikbud, Kab.Gayo Lues 2019

Dari gambar diatas jelas terlihat bahwa partisipasi siswa laki-laki memasuki SD Negeri di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2019 lebih tinggi dibanding siswa perempuan. Namun sebaliknya, partisipasi siswa perempuan memasuki SD swasta lebih tinggi dari siswa laki-laki. Sekalipun demikian selisih partisipasi memasuki SD secara keseluruhan antara laki-laki dan perempuan tidak tinggi hanya sekitar 3,5%. Artinya angka partisipasi penduduk Kabupaten Gayo Lues dalam usia Sekolah Dasar baik yang berstatus negeri maupun swasta, antara yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan hampir setara.

Angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Gayo Lues dalam jenjang pendidikan menengah antara laki-laki dan perempuan secara lebih rinci dapat pula dilihat dari persentase jumlah siswa laki-laki dan perempuan yang memasuki SMP baik yang berstatus negeri maupun swasta. Data tentang hal ini dapat dilihat dalam table 3.4

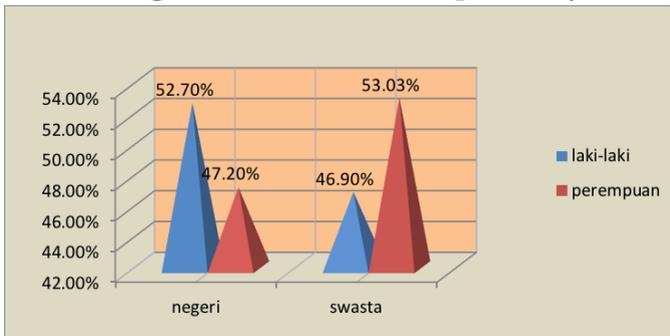
Tabel 3.4 Jumlah Siswa Baru yang Masuk SMP Negeri dan Swasta menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gayo Lues, 2019

Jenis Kelamin	SMP				Jumlah	
	Negeri		Swasta			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
Laki-Laki	428	52,7%	155	46,9%	583	51,09%
Perempuan	383	47,2%	175	53,03%	558	48,9%
Jumlah	811	100%	330	100%	1.141	100%

Sumber: data diolah dari niep.data.kemdikbud, Kab.Gayo Lues 2019

Tabel diatas menunjukkan persentase siswa baru laki-laki yang memasuki jenjang pendidikan SMP baik negeri maupun swasta di Kabupaten Gayo Lues sekitar 51,09%, sementara perempuan sekitar 48,9%. Pada SMP negeri siswa laki-laki lebih berminat memasukinya dengan selisih sekitar 5.5% dibanding perempuan. Sementara pada SMP swasta siswa perempuan lebih berminat memasukinya dengan selisih sekitar 6,13% dibanding siswa laki-laki. Secara keseluruhan persentase siswa laki-laki yang berpartisipasi memasuki jenjang pendidikan SMP lebih banyak sekitar 2,19% dibanding perempuan. Artinya tidak terjadi selisih yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan yang melanjutkan ke jenjang SMP di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2019. Namun jika diamati perbandingan pada SMP berstatus negeri atau swasta, maka terlihat perbedaan yang agak signifikan. Hal ini seperti terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.4 Perbandingan Siswa Laki-laki dan Perempuan yang Masuk SMP Negeri dan Swasta Di Kabupaten Gayo Lues, 2019



Sumber: data diolah dari niep.data.kemdikbud, Kab.Gayo Lues 2019

Gambar 3.4 menunjukkan partisipasi siswa laki-laki yang memasuki SMP negeri di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan siswa perempuan. Selisih persentase antara keduanya sekitar 5,5%. Berbeda dengan SMP swasta, pada tahun yang sama partisipasi siswa perempuan lebih tinggi dari siswa laki-laki, dimana selisih persentase antara keduanya sekitar 6,13%. Dengan demikian jika ditelaah perstatus SMP yang dimasuki, ternyata terlihat kesenjangan yang agak signifikan antara persentase laki-laki dan perempuan dalam memilih SMP yang dimasukinya.

Untuk melihat ada tidaknya kesinambungan kesenjangan antar jenis kelamin dalam memasuki jejang pendidikan selanjutnya terutama pada jenjang menengah, berikut ini dapat dilihat persentase siswa laki-laki dan perempuan yang masuk pada SMA, baik negeri maupun swasta di table 3.5.

Tabel 3.5 Jumlah Siswa Baru yang Masuk SMA Negeri dan Swasta menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gayo Lues, 2019

Jenis Kelamin	SMA				Jumlah	
	Negeri		Swasta			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
Laki-Laki	366	45,4%	45	50%	411	45,9%
Perempuan	439	54,5%	45	50%	484	54,1%
Jumlah	805	100%	90	100%	895	100%

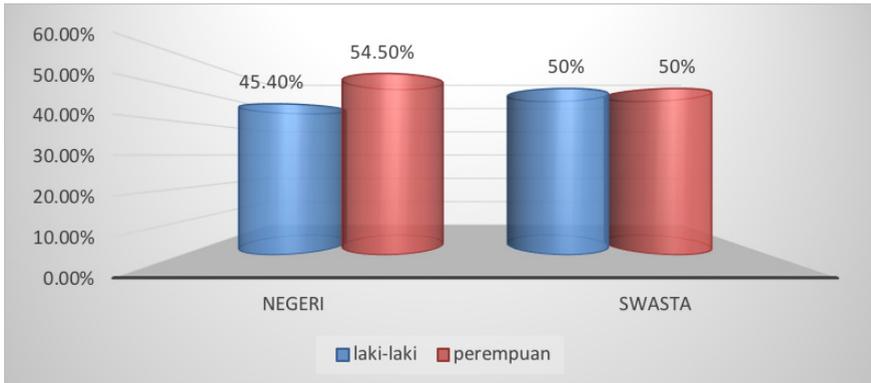
Sumber: data diolah dari niep.data.kemdikbud, Kab.Gayo Lues 2019

Tabel 3.5 menjelaskan bahwa secara keseluruhan partisipasi siswa laki-laki dalam melanjutkan pendidikan ke SMA baik negeri maupun swasta di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2019 lebih sedikit dari perempuan, persentase laki-laki adalah 45,9% dan perempuan 54,1%. Selisih antara laki-laki dan perempuan adalah 8,2%. Pada SMA negeri siswa laki-laki yang masuk SMA sekitar 45,4% sementara perempuan 54,5%. Selisih antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dinilai cukup signifikan mencapai 9,1%. Namun, pada SMA swasta terlihat siswa laki-laki dan perempuan seimbang, artinya tidak terjadi perbedaan jumlah, sehingga mencapai derajat kesetaraan yang sangat signifikan.

Gambar berikut ini akan menyajikan secara lebih jelas perbedaan persentase siswa laki-laki dan perempuan yang memasuki SMA negeri maupun

swasta di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2019.

Gambar 3.5 Perbandingan Siswa Laki-laki dan Perempuan yang Masuk SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Gayo Lues,2019

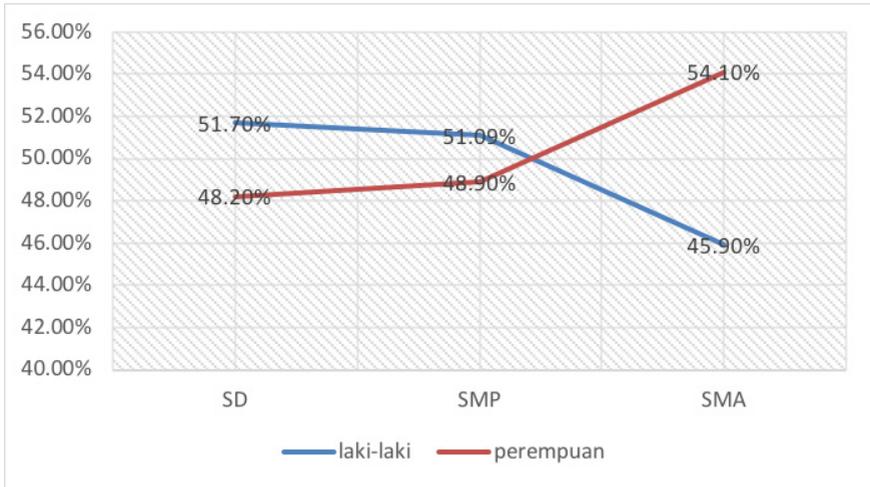


Sumber: data diolah dari niep.data.kemdikbud, Kab.Gayo Lues 2019

Gambar diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan siswa perempuan yang masuk SMA baik negeri maupun swasta lebih banyak jumlahnya dibanding siswa laki-laki dengan selisih sekitar 8,2%. Artinya, partisipasi siswa perempuan memasuki jenjang pendidikan SMA lebih tinggi dibanding siswa laki-laki. Padahal dari data pada jenjang sebelumnya perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan yang memasuki SD dan SMP baik yang berstatus negeri maupun swasta lebih tinggi siswa laki-laki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di Kabupaten Gayo Lues, pada tahun 2019 sebagian siswa laki-laki yang tamat pendidikan jenjang SMP tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/ sederajat. Kenyataan ini didapat dipicu oleh factor ekonomi, dimana remaja laki-laki yang berasal dari keluarga ekonomi lemah lebih memilih untuk menambah income keluarga daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Untuk melihat perbandingan siswa laki-laki dan perempuan yang masuk pada ketiga jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA, serta perubahan persentase antara siswa laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.6 Pergeseran Perbandingan Persentase Siswa Laki-laki dan Perempuan yang Masuk SD, SMP dan SMA di Kabupaten Gayo Lues, 2019



Sumber: data diolah dari niep.data.kemdikbud, Kab.Gayo Lues 2019

Persentase siswa laki-laki yang memasuki jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2019 lebih banyak dibanding siswa perempuan, namun pada jenjang pendidikan selanjutnya persentase siswa perempuan yang masuk SMA lebih banyak dari pada siswa laki-laki. Kenyataan ini selain disebabkan factor ekonomi keluarga, dimana remaja laki-laki dalam asumsi masyarakat Gayo Lues khususnya dan masyarakat Aceh secara umum lebih bertanggung jawab dalam meningkatkan income keluarga dibanding remaja perempuan, juga dipicu oleh kondisi psikologis bahwa perempuan lebih memiliki daya survival dalam menghadapi kesulitan dan tantangan dalam proses menempuh pendidikan.

3.3 Angka Partisipasi Murni (APM).

APM didefinisikan sebagai proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Misalnya APM SD sederajat berarti proporsi jumlah penduduk umur 7 sampai 12 tahun yang masih bersekolah SD terhadap jumlah penduduk umur 7 hingga 12 tahun. Adapun rasio APM merupakan persentase

APM perempuan terhadap AMP laki-laki. Jika nilai rasio APM sebesar 100% maka berarti APM perempuan sama dengan APM laki-laki, atau dengan kata lain kesetaraan gender sudah terwujud.

Tabel 3.6 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gayo Lues, 2018

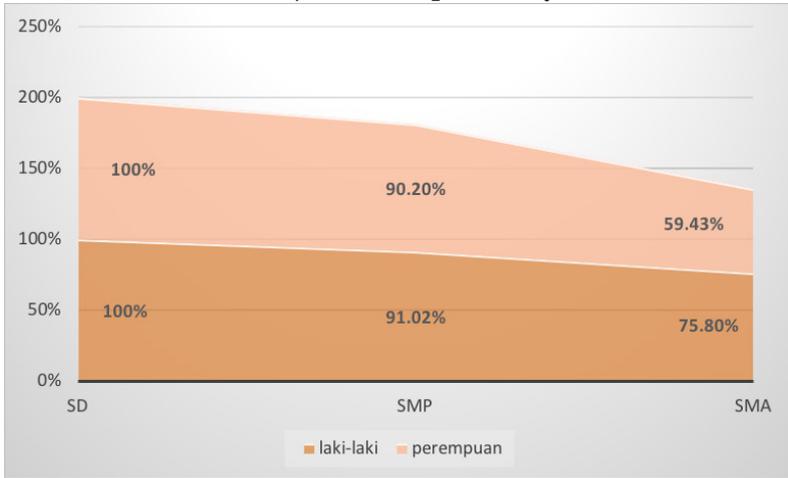
Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI	100,0	100,0	100,0
SMP/MTs	91,02	90,20	90,71
SMA/SMK/MA	75,80	59,43	70,17

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, Maret 2018

Dari table di atas dapat dinyatakan bahwa semua penduduk usia SD/ sederajat di Kabupaten Gayo Lues baik laki-laki maupun perempuan masih berstatus sebagai siswa yang masih sekolah di SD/ sederajat. Namun pada jenjang SMP/ sederajat, sebanyak 91,02% dari total penduduk laki-laki usia SMP/ sederajat yang masih berstatus sebagai siswa SMP/ sederajat. Berbeda sedikit dengan perempuan, sebanyak 90,20% dari total penduduk perempuan usia SMP/ sederajat yang berstatus sebagai siswa SMP/ sederajat. Sementara pada jenjang SMA/ sederajat, hanya 75,80% dari total penduduk laki-laki usia SMA/ sederajat yang masih berstatus sebagai siswa SMA/ sederajat. Bagi perempuan, hanya 59,43% dari total penduduk perempuan usia SMA/ sederajat yang masih berstatus sebagai siswa SMA/ Sederajat.

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) antara laki-laki dengan perempuan pada jenjang SD/ sederajat adalah 100%. Artinya tidak ada kesenjangan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam kesempatan akses pendidikan di jenjang SD/ sederajat di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2018. Selanjutnya rasio APM laki-laki terhadap perempuan di jenjang SMP/ sederajat selisih sekitar 0,51%, dan rasio APM laki-laki terhadap perempuan di jenjang SMA/ sederajat selisih sekitar 10,74%. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa APM laki-laki di Kabupaten Gayo Lues tahun 2018 lebih tinggi dari APM perempuan, dengan selisih yang signifikan terutama di jenjang SMA/ sederajat. Berikut ini diilustrasikan dalam gambar 3.7

Gambar 3.7 APM Laki-laki dan Perempuan pada Jenjang SD, SMP, dan SMA Sederajat di Kabupaten Gayo Lues, 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, Maret 2018

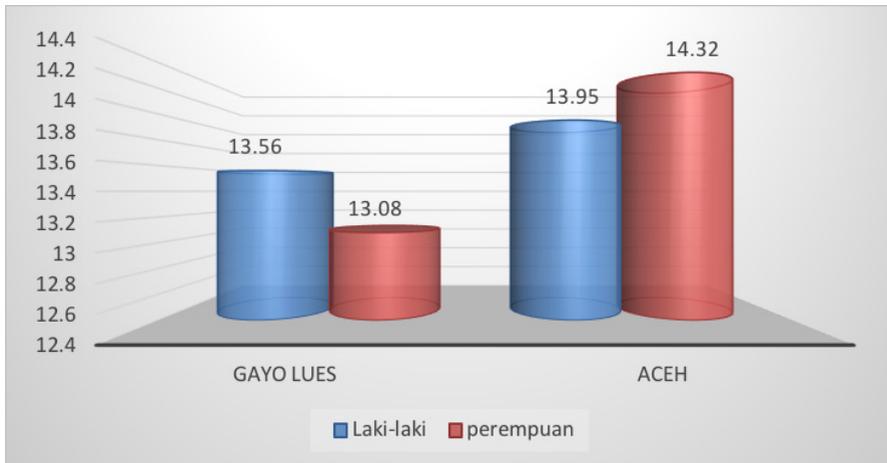
Gambar diatas mengilustrasikan bahwa pada jenjang SMA sederajat rasio APM perempuan terhadap laki-laki lebih rendah dengan selisih mencapai 10,74%. Artinya di Kabupaten Gayo Lues, angka partisipasi murni perempuan dalam pendidikan jenjang pendidikan SMA sederajat masih lebih rendah dibanding laki-laki. Kenyataan ini dipahami dapat disebabkan beberapa factor, antara lain sebagian masyarakat Kabupaten Gayo Lues masih beranggapan bahwa perempuan tidak mesti harus berpendidikan tinggi disebabkan peran mereka dalam mengurus rumah tangga lebih besar, dibanding harus mencari nafkah bagi keluarga.

3.4 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Secara Nasional, harapan lama sekolah baik total maupun terpisah gender mengalami peningkatan pada periode 2010-2017. Pada tahun 2017, perempuan dan laki-laki berpeluang untuk mengenyam pendidikan selama kurang lebih 12 tahun atau hingga kelas 12 SMA sederajat. Selama 8 tahun terakhir perempuan memiliki harapan untuk bersekolah yang sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki. Harapan lama sekolah perempuan sebesar 12,93 tahun, sebesar 0,15 tahun lebih lama dibanding laki-laki yang berada pada level 12,78 tahun.

Harapan lama sekolah laki-laki di Kabupaten Gayo Lues adalah 13,56 sementara perempuan 13,08. Selisih keduanya adalah 0,48 lebih tinggi laki-laki. Jika dibandingkan dengan Aceh, harapan lama sekolah laki-laki 13,95 dan perempuan 14,32. Selisih keduanya adalah 0,37. Lebih jelas dapat dilihat di gambar berikut:

Gambar 3.8 Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gayo Lues,2018



Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender,2018

Gambar ini menunjukkan harapan lama sekolah laki-laki di Gayo Lues lebih tinggi dari perempuan dengan selisih 0,48. Sebaliknya di Aceh lebih tinggi harapan lama sekolah perempuan dibanding laki-laki dengan selisih 0,37. Data ini menunjukkan bahwa tidak terjadi kesenjangan yang signifikan antara harapan lama sekolah laki-laki dengan perempuan di Gayo Lues. Kendati demikian masih tetap diperlukan kebijakan dalam pendidikan untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah baik laki-laki maupun perempuan di Gayo Lues khususnya dan di Aceh secara umum agar terwujud masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

3.5 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan trend meningkat. Pada tahun 2017 terjadi perbedaan

hampir satu tahun pencapaian indicator ini antar gender. Secara rata-rata laki-laki sudah mampu mengenyam pendidikan selama 8,56 tahun atau hingga kelas 8 Sekolah Menengah. Sedangkan perempuan berada satu tahun di bawahnya sebesar 7,65 tahun. Dalam tahun 2000 hingga 2017 trend menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan selalu berada di bawah capaian laki-laki. Pada tahun 2017 RLS perempuan mampu tumbuh 1,51% dibandingkan capaiannya pada tahun 2010 sedangkan laki-laki meningkat 1,13% saja.

Rata-rata lama sekolah laki-laki di Gayo Lues adalah 8,36 atau hingga kelas 8 sekolah menengah, perempuan 6,57 atau hingga kelas 6 sekolah dasar. Selisih rata-rata lama sekolah laki-laki dengan perempuan adalah 1,79 lebih tinggi laki-laki. Sementara rata-rata lama sekolah laki-laki di Aceh mencapai 9,36 atau sampai kelas 9 sekolah menengah, perempuan mencapai 8,62 atau hingga kelas 8 sekolah menengah. Selisih rata-rata lama sekolah laki-laki dengan perempuan adalah 0,74 tahun lebih tinggi laki-laki. Gambar berikut memperjelas perbandingan tersebut.

Gambar.3.9 Rata-rata Lama Sekolah Menurut jenis Kelamin di Kabupaten Gayo Lues, 2018



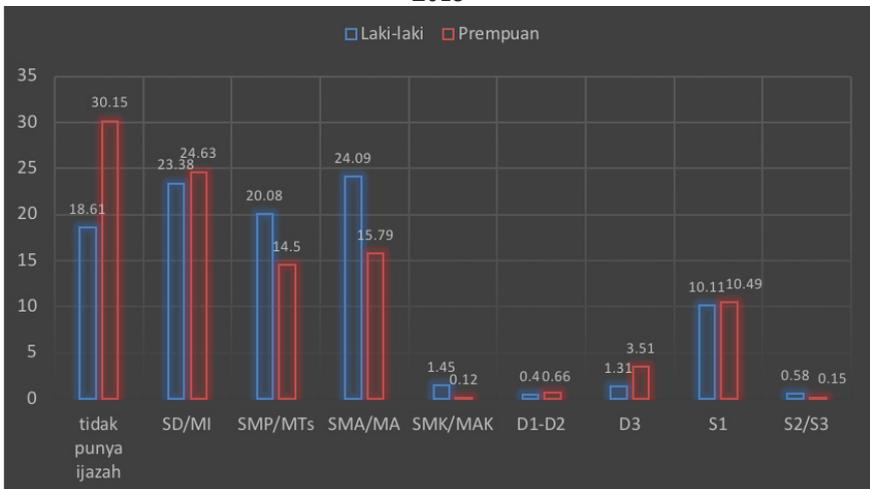
Sumber: Buku IPG, 2018

Selisih rata-rata lama sekolah laki-laki dibanding perempuan di Kabupaten Gayo Lues mencapai 1,79. Artinya, rata-rata lama sekolah perempuan hampir 2 tahun lebih rendah dari laki-laki. Jika laki-laki rata-rata lama sekolah 8,36 setara sampai kelas 8 sekolah menengah, maka perempuan hanya 6,57 setara kelas 6 sekolah dasar. Selisih rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan di Kabupaten Gayo Lues dinilai sangat kentara, sehingga diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis agar terwujud angka rata-rata lama sekolah yang terus meningkat dan seimbang antara laki-laki dan perempuan.

3.6 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pendidikan dapat dilihat dari semakin tingginya persentase penduduk 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan tinggi. Tabel 3.11 menyajikan persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Gambar 3. 10 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah/STTB yang Dimiliki di Kabupaten Gayo Lues, 2018



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh, 2018.

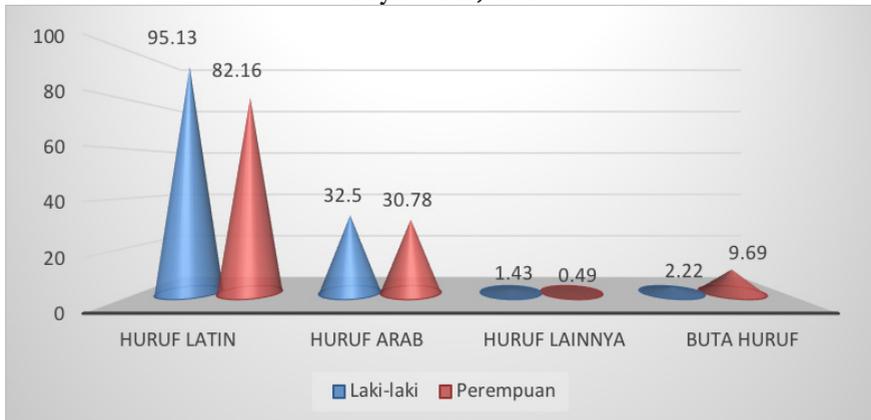
Gambar ini menjelaskan bahwa penduduk perempuan Kabupaten Gayo Lues yang tidak memiliki ijazah lebih tinggi dari laki-laki dengan selisih 11,54. Perempuan yang memiliki ijazah SD/MI lebih tinggi dari laki-laki

dengan selisih 1,25. Laki-laki yang memiliki ijazah SMP/MTs lebih tinggi dari perempuan dengan selisih 5,58. Laki-laki yang memiliki ijazah SMA/MA lebih tinggi dari perempuan dengan selisih 8,3. Laki-laki yang memiliki ijazah SMK/MAK lebih tinggi dari perempuan dengan selisih 1,33. Perempuan yang memiliki ijazah D1-D2 lebih tinggi dari laki-laki dengan selisih 0,26. Perempuan yang memiliki ijazah D3 lebih banyak dari laki-laki dengan selisih 2,2. Perempuan yang memiliki ijazah S1 lebih banyak dari laki-laki dengan selisih 0,39. Laki-laki yang memiliki ijazah S2-S3 lebih banyak dari perempuan dengan selisih 0,43. Tidak terlihat kesenjangan yang berarti antar laki-laki dan perempuan dalam kepemilikan ijazah di berbagai tingkatan pendidikan kecuali pada tingkat SMA/SMK.

3.7 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, secara nasional, penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf pada 2017 mencapai 4,08% dari total populasi penduduk usia diatas 10 tahun⁴.

Gambar 3.11 Persentase Penduduk Berumur 15 tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin, Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Gayo Lues,2018



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh, 2018.

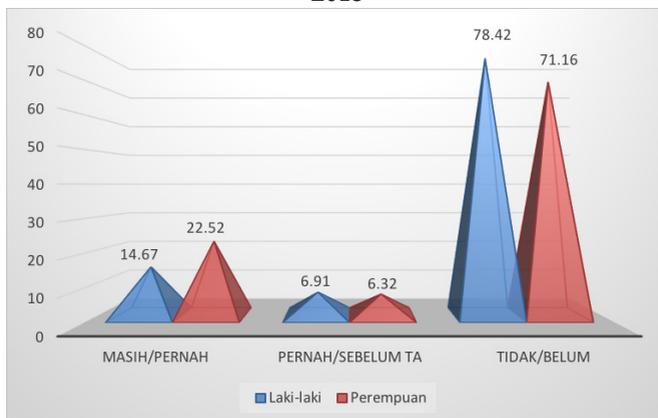
4 Badan Pusat Statistik (BPS),2018.

Gambar ini menunjukkan kemampuan membaca dan menulis huruf latin laki-laki lebih tinggi dari perempuan dengan selisih 12,97%. Angka ini menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemampuan membaca dan menulis huruf latin. Demikian pula kesenjangan juga terlihat pada variable buta huruf. Perempuan yang buta huruf di Kabupaten Gayo Lues lebih tinggi dari laki-laki dengan selisih 7,47. Angka ini juga menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam hal buta huruf. Artinya, persentase perempuan yang berusia 15 tahun ke atas yang buta huruf lebih banyak dari laki-laki. Dibutuhkan segera kebijakan dan strategi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, dan menurunkan angka buta huruf secara seimbang antara laki-laki dan perempuan agar tercipta masyarakat Kabupaten Gayo Lues yang adil dan sejahtera secara merata.

3.8 Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah

Tingginya keikutsertaan penduduk 0-6 tahun dalam pendidikan pra sekolah merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam bidang pendidikan. Keikutsertaan dalam akses pendidikan usia dini akan membantu keberhasilan pada jenjang selanjutnya. Berikut ini data yang menunjukkan partisipasi penduduk usia 0-6 tahun di Kabupaten Gayo Lues.

Gambar.3.12 Persentase Penduduk 0-6 tahun Menurut Jenis Kelamin dan Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah di Kabupaten Gayo Lues, 2018



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh, 2018.

Gambar di atas menunjukkan rendahnya tingkat keikutsertaan penduduk 0-6 tahun pada pendidikan pra sekolah. Dalam variable tidak/ belum pernah ikut serta dalam pra sekolah dan variable pernah/ sebelum tahun ajaran 2017/2018 tidak terjadi selisih yang tinggi antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam variable masih/pernah ikut serta dalam pendidikan pra sekolah terlihat perempuan lebih tinggi dari laki-laki dengan selisih 7,85. Artinya, Anak perempuan lebih banyak yang ikutserta di pendidikan pra sekolah disbanding laki-laki.

3.9 Rasio Guru dan Siswa

Rasio guru dan siswa adalah perbandingan antara jumlah siswa yang terdaftar di sekolah dan jumlah guru yang diperkerjakan oleh sekolah. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah siswa dalam kelas dengan jumlah guru yang menangani kelas tersebut. Rasio guru-siswa menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar serta melihat mutu pengajaran di kelas. The Global Economy melansir jumlah rasio siswa –guru 97 negara dan Indonesia berada di posisi 72 dari 97 negara. Artinya, Indonesia memiliki rasio guru-siswa yang tidak terlalu buruk dibandingkan dengan negara- negara lain. Sementara negara-negara yang dinilai memiliki rasio guru-siswa terbaik adalah San Marino 6 siswa perguru, Bermuda 7 siswa perguru, Liechtenstein 8 siswa perguru, Kuwait 9 siswa perguru, Swedia dan Polandia 10 siswa perguru.⁵

Berikut ini dapat dilihat rasio guru-siswa, baik jumlah guru yang telah tersertifikasi maupun jumlah guru secara keseluruhan(yang telah tersertifikasi dan belum tersertifikasi) di jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA di Kabupaten Gayo Lues dalam tahun 2019.

Tabel 3.7 Rasio siswa dan Guru tersertifikasi dan guru secara umum di SD,SMP dan SMA Kabupaten Gayo Lues,2019

Jenjang Pendidikan	Rasio Siswa / Guru sertifikasi	Rasio Siswa / Guru secara Umum
SD	18,78	13,76
SMP	11,57	10,82
SMA	11,76	11,56

Sumber: data diolah dari niep.data. kemdikbud, Gayo Lues,2019

5 <https://kumparan.com>. 28 Februari2019

Tabel diatas menjelaskan rasio guru tersertifikasi-siswa di jenjang SD adalah 18,78. Sementara pada jenjang SMP 11,57 dan pada jenjang SMA 11,76. Untuk rasio siswa-guru secara umum lebih meningkat menjadi 13,76 pada jenjang SD, 10,82 pada SMP dan 11,56 pada SMA. Selisih antara rasio siswa-guru sertifikasi dengan rasio siswa –guru secara umum pada jenjang SD mencapai 5,02. Pada SMP sekitar 0,75 dan pada SMA sekitar 0,2. Data ini menunjukkan bahwa guru SD di Kabupaten Gayo Lues.

Masih banyak yang belum tersertifikasi. Selain itu, dilihat dari rasio siswa–guru secara umum dapat diktakan rasio siswa –guru di Kabupaten Gayo Lues sudah mendekati standar ideal. Namun jika dilihat dari rasio siswa-guru tersertifikasi, maka rasio siswa –guru masih jauh dari angka ideal. Kendati demikian data ini tidak menggambarkan rasio siswa –guru persekolah, tetapi hanya rerata dari seluruh jenjang SD, SMP dan SMA di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2019. Data tentang rasio siswa-guru yang tersedia tidak terpilah sehingga sukar untuk dianalisis dengan perspektif gender.

3.10 Kualifikasi Akademik Guru

Kualifikasi akademik guru adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku⁶. Dalam Permendiknas no 16 tahun 2007, standar kualifikasi akademik guru jenjang SD, SMP dan SMA adalah minimal diploma IV atau sarjana (S1). Untuk melihat bagaimana kualifikasi akademik guru dan persentase guru laki-laki dan perempuan yang memiliki kualifikasi akademik tertentu dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. 8 Kualifikasi Akademik Guru Laki-laki dan Perempuan di jenjang SD, SMP dan SMA Kabupaten Gayo Lues,2019

Jenis Kelamin/ Persentase	SD				SMP				SMA			
	D1-D4	S1	S2	S3	D1-D4	S1	S2	S3	D1-D4	S1	S2	S3
Laki-laki	97	199	0	0	8	114	1	0	3	91	6	0
%	46,41	34,72	0	0	33,33	33,23	25	0	75	39,91	75	0

6 Kunandar, GuruProfesional, Jakarta:RajaGrafindo, 2007,h.51-52.

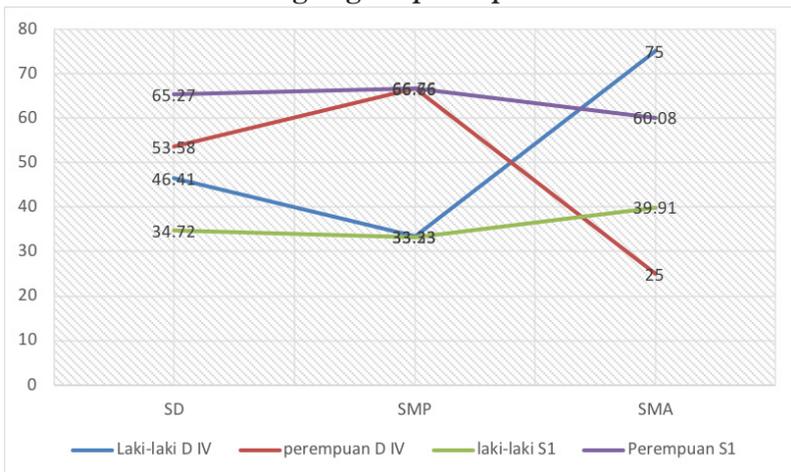
Jenis Kelamin/ Persentase	SD				SMP				SMA			
	D1-D4	S1	S2	S3	D1-D4	S1	S2	S3	D1-D4	S1	S2	S3
Perempuan	97	199	0	0	8	114	1	0	3	91	6	0
%	46,41	34,72	0	0	33,33	33,23	25	0	75	39,91	75	0

Sumber: data diolah dari niep.data.kemdikbud, gayo Lues,2019.

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum jumlah guru perempuan lebih banyak dari guru Laki-laki dengan selisih perbandingan yang sangat signifikan. Artinya profesi guru lebih didominasi oleh perempuan. Dilihat dari kualifikasinya, kecenderungannya adalah didominasi kualifikasi sarjana (s1) . Persentase perempuan lebih banyak baik pada pada semua kualifikasi dan semua jenjang kecuali kualifikasi diploma 1-4 dan strata-2 di jenjang SMA. Dilihat dari perspektif gender, data ini menunjukkan bahwa profesi mendidik tidak terlalu diminati oleh laki-laki di Kabupaten Gayo Lues. Untuk kajian selanjutnya, penting diketahui alasan laki-laki tidak terlalu meminati profesi mendidik.

Untuk melihat lebih jelas kesenjangan persentase kualifikasi guru laki-laki dengan guru perempuan dapat dilihat pada gambar ini:

Gambar 3.13 Kesenjangan persentase kualifikasi guru laki-laki dengan guru perempuan



Sumber: data diolah dari niep.data.kemdikbud, gayo Lues,2019.

3.11 Status Kepegawaian Guru

Di Indonesia, guru memiliki beberapa jenis status kepegawaian, diantaranya; Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru tidak tetap (GTT), Guru Tetap Yayasan (GTY), tenaga Honorer, Guru bantu Sekolah, dan lain-lain. Untuk mengetahui tentang persentase guru laki-laki dan perempuan dalam status kepegawaian di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.9 Persentase Guru Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Status Kepegawaian di Jenjang SD, SMP dan SMA Kabupaten Gayo Lues, 2019

Jenis Kelamin/Persentase	SD			
	PNS	Honorer	GTT	GTY
Laki-laki	188	15	0	18
%	37,90	50	0	26,08
Perempuan	308	15	0	51
%	62,09	50	0	73,91
Total	496	30	0	69

Jenis Kelamin/Persentase	SMP			
	PNS	Honorer	GTT	GTY
Laki-laki	40	17	0	14
%	33,61	35,41	0	36,81
Perempuan	119	31	0	24
%	74,84	64,58	0	63,15
Total	159	48	0	38

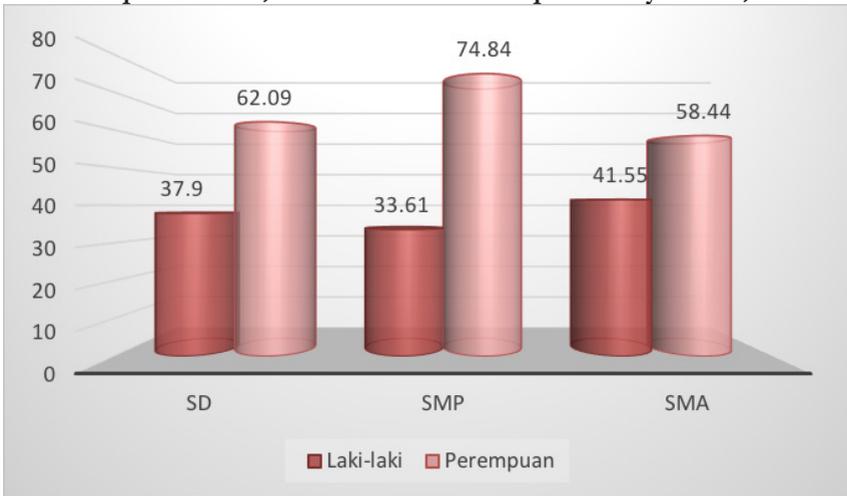
Jenis Kelamin/Persentase	SMA			
	PNS	Honorer	GTT	GTY
Laki-laki	64	14	0	1
%	41,55	38,88	0	50
Perempuan	90	22	0	1
%	58,44	61,11	0	50
Total	154	36	0	2

Ket: GTT: Guru Tidak Tetap, GTY:Guru Tetap Yayasan

Sumber: data diolah dari niep.data.kemdikbud, gayo Lues,2019.

Dari table diatas diketahui bahwa persentase kualifikasi guru PNS laki-laki dari jenjang SD sebanyak, 37,90%, SMP sekitar 33,61% dan jenjang SMA sekitar 41,55%. Sementara persentase perempuan pada kualifikasi S1 dari SD, SMP dan SMA secara berturut-turut adalah 62,09%; 74,84% dan 58,44%. Untuk mendapatkan perbandingan yang lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.14 Perbandingan Persentase Guru PNS Laki-laki dan Perempuan di SD, SMP dan SMA Kabupaten Gayo Lues, 2019



Sumber: data diolah dari niep.data.kemdikbud, gayo Lues,2019.

Gambar ini menunjukkan pada seluruh jenjang pendidikan guru PNS di Kabupaten Gayo Lues didominasi perempuan. Selisih perbandingan dengan guru PNS laki-laki sangat signifikan. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah strategis pemerintah dalam memotivasi bagi laki-laki untuk berperan serta sebagai guru agar tercipta keseimbangan persentase antara guru laki-laki dengan perempuan. Realitas persentase siswa laki-laki dengan perempuan yang menempuh pendidikan di berbagai jenjang hampir seimbang. Mereka membutuhkan figure dari orang dewasa yang tidak hanya berjenis kelamin perempuan tetapi juga laki-laki. Karen itu, demi terwujud keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan siswa secara psikis terutama dalam aspek maskulinitas dan feminitas maka keseimbangan jumlah guru perempuan dan laki-laki di berbagai lembaga pendidikan penting diperhatikan

BAB IV

GENDER DAN KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminasi, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Hal ini secara tegas disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam rangka menjalankan prinsip pembangunan kesehatan yang berkelanjutan, maka perlu disinergikan dengan pembangunan berkelanjutan atau lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDG's). Dalam kerangka SDG's isu kesehatan memiliki empat tujuan (goals) dari 17 goals yang ada yakni Goals kedua; Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan, Goals ketiga; Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, Goals kelima; Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan dan perempuan (2 Target Kesehatan), Goals Keenam; Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang (2 Target Kesehatan). Oleh karena itu, profil gender ini akan berkontribusi dalam penyediaan data dan informasi guna pencapaian tujuan dan indikator SDG's sebagaimana yang telah direncanakan. Tujuan dan Indikator SDGs ini juga akan berkorelasi dengan pembangunan manusia.

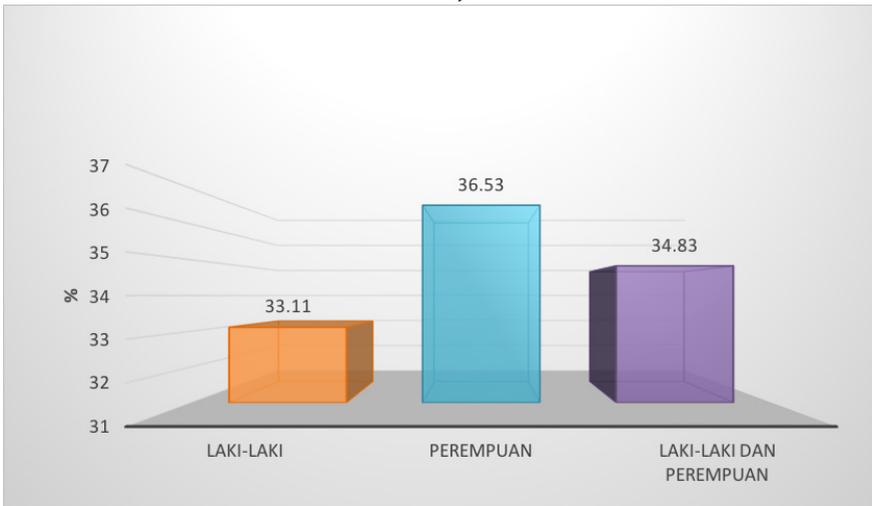
Pada bagian ini, kita akan membahas beberapa aspek diantaranya

4.1 Angka Kesakitan

1. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Selama Sebulan Terakhir Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin, 2018

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas atau keluhan lainnya. Untuk melihat kualitas kesehatan masyarakat, ada beberapa indikator yang dapat dilihat diantaranya, keluhan kesehatan. Gambar berikut menyetengahkan tentang keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Gayo Lues berdasarkan jenis kelamin.

Gambar 4.1 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin, 2018



Sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2018

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk Kabupaten Gayo Lues yang mempunyai keluhan selama sebulan terakhir laki laki yang mempunyai keluhan sebanyak 33,11%, perempuan mempunyai keluhan sebanyak 36,53%. Keluhan keseluruhan laki laki dan perempuan

berjumlah 34,83% dari total jumlah keseluruhan penduduk Gayo Lues. Persentasi penduduk Kabupaten Gayo Lues yang mempunyai keluhan selama sebulan lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki yaitu: 3.42%. Dalam persentasi ini sulit ditemukan data terpilah usia, sehingga menyulitkan informasi lanjutan dalam program pembangunan kesehatan lanjutan.

2. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Terganggu Aktifitasnya Menurut Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin, 2018

Gambar 4.2 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Terganggu Aktifitasnya Menurut Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin, 2018



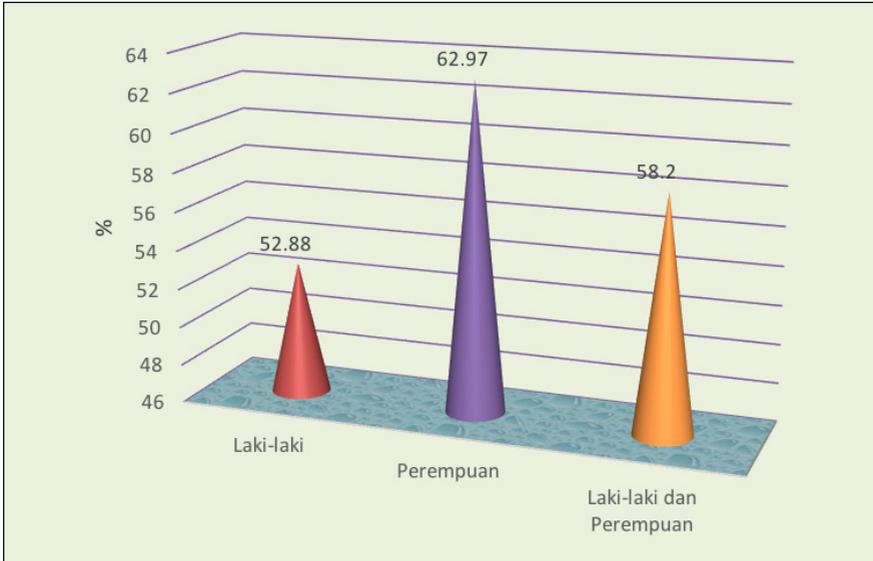
Sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2018

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa persentasi penduduk Kabupaten Gayo Lues yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya laki laki sebanyak 13.12%, perempuan sebanyak 13,63%. Keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya keseluruhan laki laki dan perempuan berjumlah 14,38%. Dari persentase jumlah laki-laki dan perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya selisih antara laki-laki dan perempuan sebanyak 0.51% dari total jumlah keseluruhan penduduk Gayo Luwes.

4.2 Penderita Sakit

1. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin, 2018

Gambar 4.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin, 2018



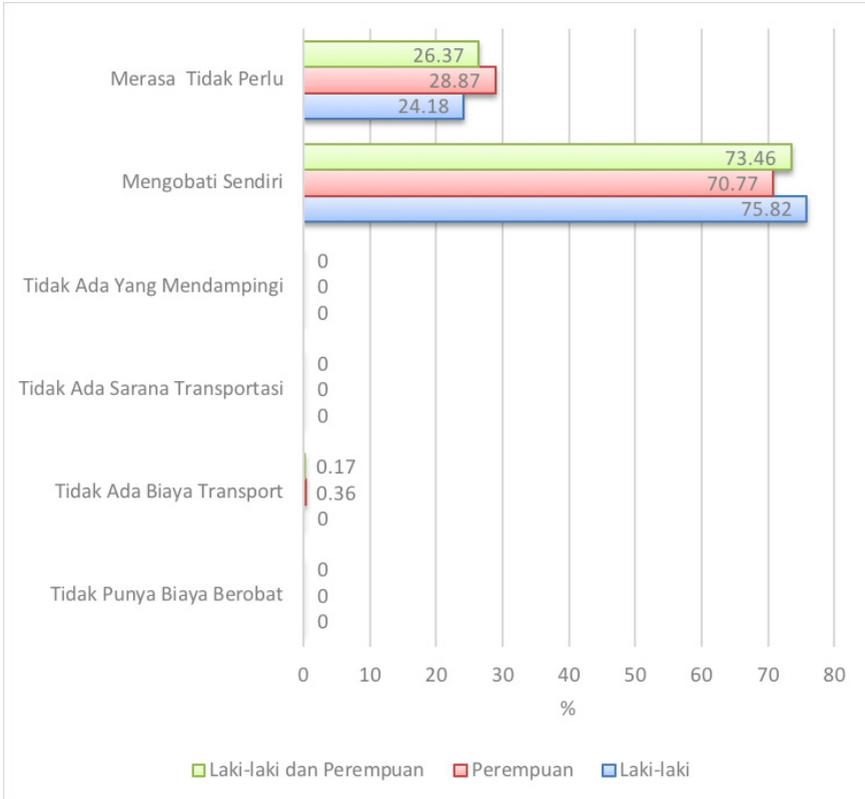
Sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2018

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk Kabupaten Gayo Lues yang berobat jalan selama satu bulan. Laki laki sebanyak 52,8%, perempuan sebanyak 62,97 %. Persentase penduduk Kabupaten Gayo Lues yang berobat jalan selama satu bulan laki laki dan perempuan berjumlah 58,2%, dari grafik diatas menunjukkan selisih laki-laki dan perempuan 10,17% lebih banyak perempuan, dari total jumlah keseluruhan penduduk Gayo Luwes. Dari grafik di atas menunjukkan persentase penduduk Kabupaten Gayo Lues yang berobat jalan selama satu bulan lebih banyak perempuan dari pada laki laki.

4.3 Alasan Tidak Berobat

1. Persentase Penduduk yang Sakit tetapi Tidak Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues, Jenis Kelamin, dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2018

Gambar 4.4 Persentase Penduduk yang Sakit tetapi Tidak Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2018



Sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2018

Gambar di atas menunjukkan bahwa ada tiga alasan bagi perempuan mengapa tidak berobat jalan yaitu karena mengobati sendiri, merasa tidak perlu dan tidak ada biaya transportasi. Bagi laki-laki alasannya adalah karena berobat sendiri dan merasa tidak perlu. Persentase alasan terbesar baik laki-

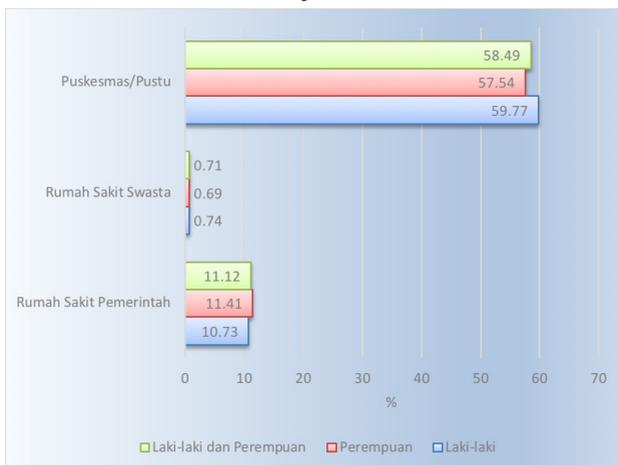
laki dan perempuan adalah karena berobat sendiri yaitu 73,46%. Ada empat dugaan yang bisa saja menjadi sebabnya, pertama terkait adanya kemampuan masyarakat menggunakan obat-obatan tradisional yang sudah mentradisi, kedua kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya penanganan medis bagi masalah kesehatan yang mereka alami, ketiga karena terbatasnya akses mereka terhadap layanan kesehatan, dan keempat karena kepedulian masyarakat terhadap masalah kesehatan rendah sehingga kesehatan tidak menjadi prioritas mereka dan dianggap cukup dengan obat generic atau pendekatan lainnya, lalu dianggap akan sembuh dengan sendirinya. Terkait akses, meski persentasenya tidak sampai 1%, ada penduduk perempuan yang menyebutkan salah satu alasan tidak berobat adalah karena tidak ada biaya transportasi. Hal ini juga terkait dengan jarak antara kecamatan dan desa dan juga jarak antara kecamatan dengan pusat pemerintahan kabupaten yang cukup jauh bagi beberapa kecamatan tertentu, sehingga dapat dimaklumi persoalan biaya transportasi menjadi salah satu kendala.

Diantara penduduk yang menjawab tidak perlu berobat adalah sebesar 26,37 %. Hal ini menegaskan tentang terbatas pengetahuan masyarakat terkait pentingnya penanganan medis bagi penyakitnya. Persentase perempuan yang tidak berobat karena merasa tidak perlu adalah 28,87 % dan laki laki-laki 24,18 %. Lebih banyak perempuan yang menganggap tidak perlu berobat. Sementara persentase laki laki lebih banyak dengan alasan mengobati sendiri yaitu 75,8% dan perempuan 70,77%.

3. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues, Jenis Kelamin, dan Tempat Berobat Jalan, 2018

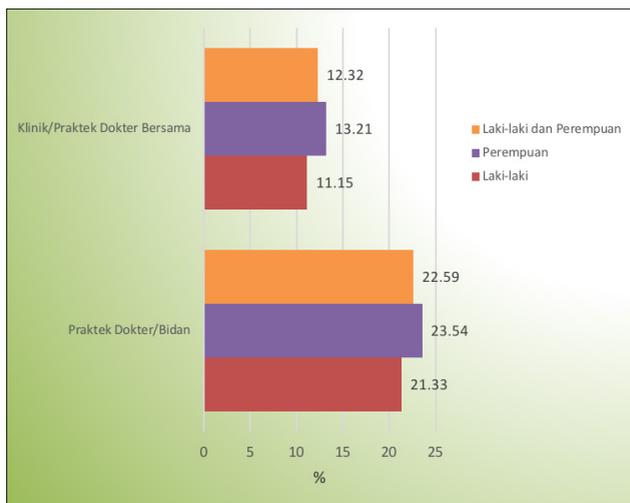
Salah satu indikator layanan yang penting bagi capaian pembangunan bidang kesehatan adalah jangkauan pelayanan yang diukur dengan jumlah penduduk yang dilayani. Tiga Gambar berikut akan mengetengahkan tentang persentase penduduk yang berobat jalan berdasarkan jenis kelamin dan tempat berobatnya

Gambar 4.5 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues, Jenis Kelamin, dan Tempat Berobat Jalan, 2018



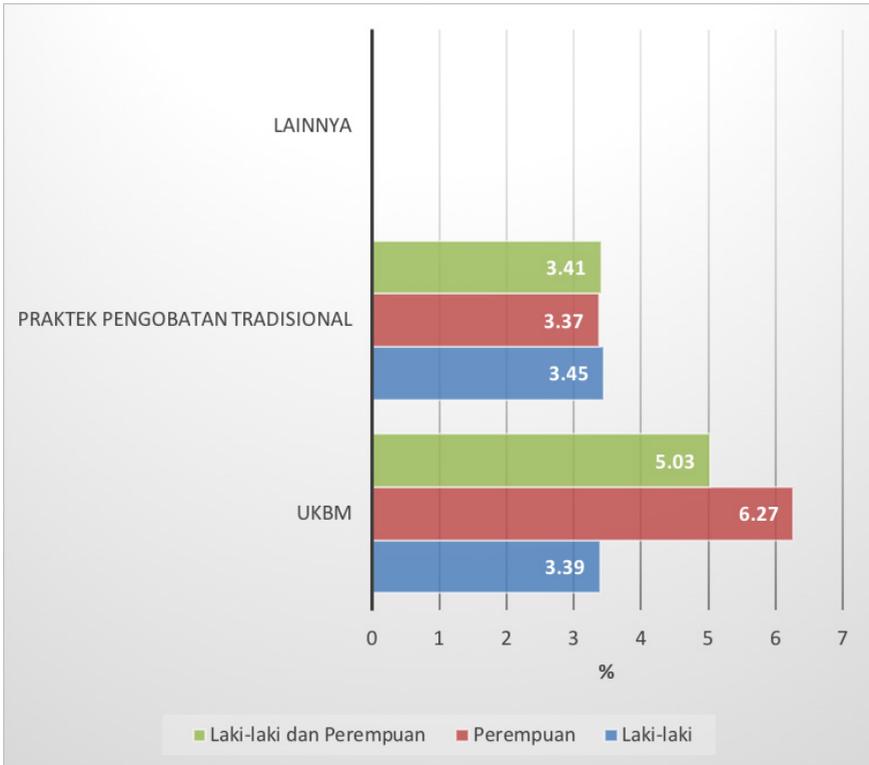
Sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2018

Gambar 4.6 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues, Jenis Kelamin, dan Tempat Berobat Jalan, 2018



Sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2018

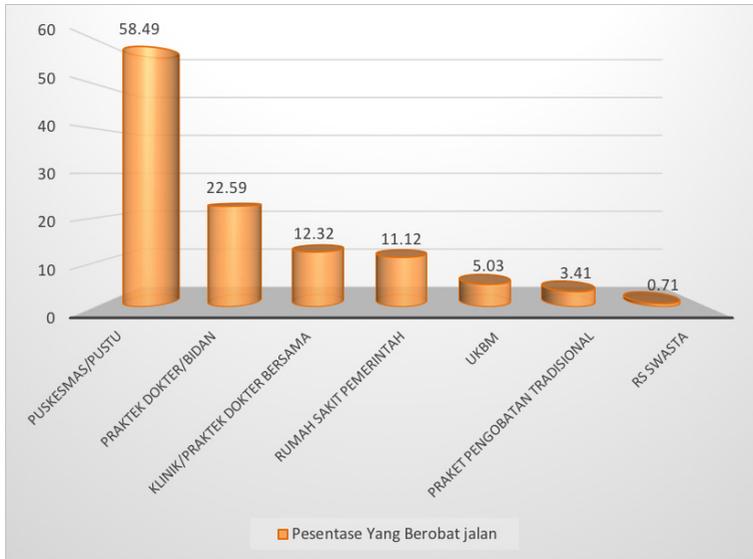
Gambar 4.7 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues, Jenis Kelamin, dan Tempat Berobat Jalan, 2018



Sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2018

Tiga gambar di atas menegaskan tentang ada tujuh tempat berobat jalan yang biasanya di akses oleh penduduk Gayo Lues untuk berobat jalan. Diantara yang paling sering adalah Puskesmas atau Pustu. Grafik Berikut akan menggambarkan tempat berobat yang paling sering diakses oleh penduduk baik laki-laki maupun perempuan.

Gambar 4.8 Pesentase Penduduk Yang Berobat Jalan dan Tempat Berobat



Sumber: Diolah dari Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2018

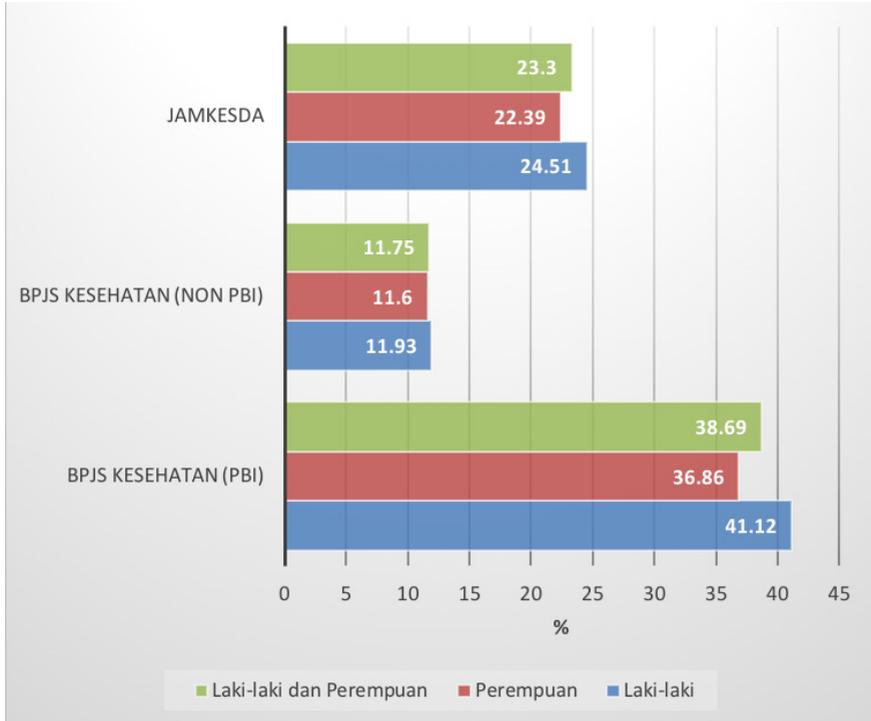
Gambar di atas menunjukkan bahwa yang paling banyak diakses masyarakat adalah Puskesmas/Pustu, dan laki laki menjadi pengakses yang paling banyak yaitu 59,77% dan perempuan 57,54%. Pada peringkat kedua yang paling banyak diakses masyarakat adalah Praktek dokter atau / Bidan yaitu 22,59 %. Pada praktek ini perempuan lebih banyak yaitu 23, 54 dibanding dengan laki laki yaitu 21,33%. Rumah sakit pemerintah berada pada posisi keempat yang menjadi tempat berobat jalan yang diakses masyarakat baik laki-laki dan perempuan. Hal ini karena berobat jalan bagi masyarakat cukup dengan puskesmas apa lagi bagi penduduk yang jaraknya jauh dari RS, lebih praktis ke Puskesmas atau Pustu yang lebih dekat dengan mereka. Bagi perempuan pengetahuan tentang layanan puskesmas biasanya lebih familiar bagi mereka sehingga dengan mudah mereka akses tanpa perlu khawatir atau pendamping. Sementara layanan Rumah Sakit, bagi sebagian perempuan masih menjadi hal yang kurang familiar, sehingga keeluasaan dan keberanian mereka untuk mengaksesnya jadi tergantung pada suami atau pihak lainnya.

Layanan kesehatan lainnya adalah diukur dengan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Berikut akan digambarkan penggunaannya oleh penduduk.

4.4 Lama Berobat

1. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin, 2018

Gambar 4.9 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin, 2018



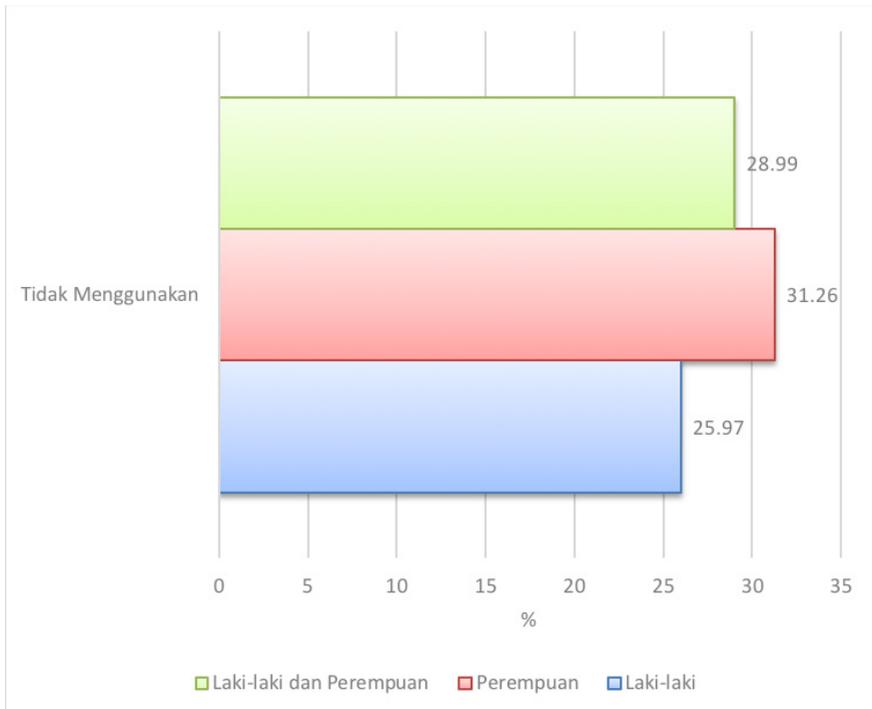
Sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2018

Persentase Penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat menggunakan Jamkesda adalah laki-laki sebanyak 24,51%, perempuan 22,39%, total keseluruhan laki-laki dan perempuan 23,3%, selisih antara laki-laki dan perempuan adalah 2.12%. Persentase Penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat menggunakan BPJS Kesehatan Non PBI adalah laki-laki sebanyak 11,93% dan perempuan sebanyak 11,75%. Total

keseluruhan laki-laki dan perempuan adalah 11,75%, selisih antara laki-laki dan perempuan adalah 0.18%. Penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat menggunakan BPJS Kesehatan (PBI) adalah laki-laki sebanyak 41, 12% dan perempuan sebanyak 36.69%.

Gambar berikut menunjukkan persentase penduduk yang tidak menggunakan jaminan kesehatan.

Gambar 4.10 Persentase Penduduk yang Tidak Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin, 2018

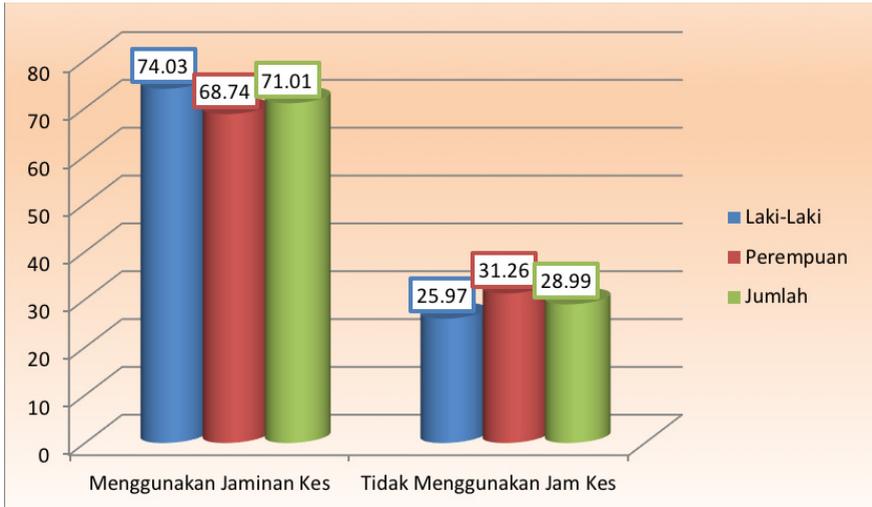


Sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2018

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan selama sebulan terakhir menurut Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin. Yang tidak menggunakan jaminan kesehatan, Laki laki sebanyak 25.97%, perempuan sebanyak 31,26 %.

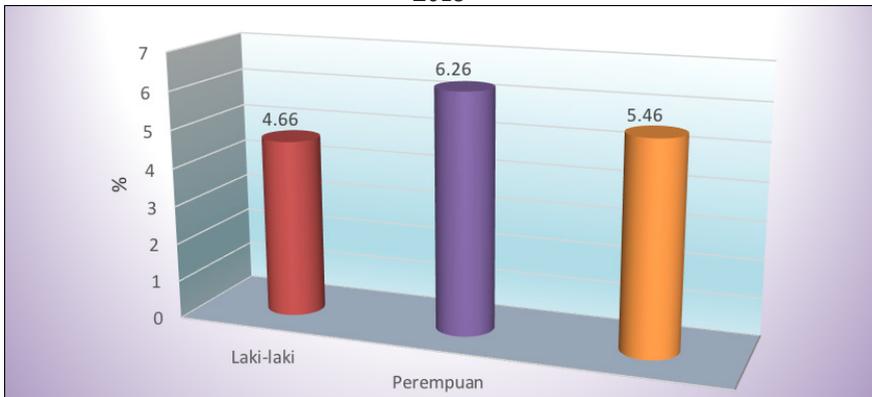
Ada banyak penduduk perempuan yang tidak menggunakan jaminan kesehatan ketika berobat. Perbandingannya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.11 Persentase penduduk yang menggunakan Jaminan Kesehatan dan tidak, Berdasarkan jenis Kelamin



4. Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin, 2018

Gambar 4.12 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin, 2018

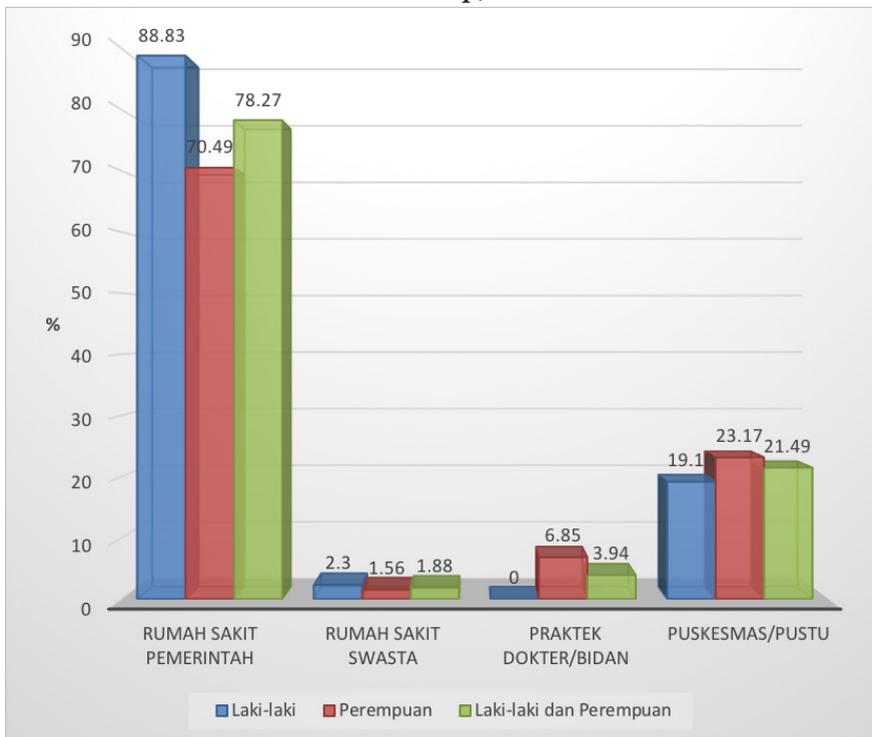


Sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2018

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa Persentase penduduk yang pernah rawat inap selama setahun terakhir menurut Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin adalah sejumlah 5,46% dari total penduduk. Laki laki sebanyak 4.66%, perempuan sebanyak 6,26%. Lebih banyak perempuan yang rawat inap dibanding dengan laki-laki.

Persentase Penduduk yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues, Jenis Kelamin, dan Tempat Rawat Inap, 2018

Gambar 4.13 Persentase Penduduk yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues, Jenis Kelamin, dan Tempat Rawat Inap, 2018



Sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2018

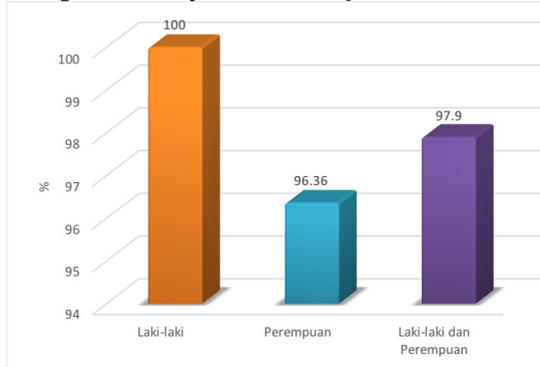
Dari grafik di atas menunjukkan Persentase Penduduk yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir di Kabupaten Gayo Lues, Menurut Jenis

Kelamin, dan Tempat Rawat Inap. Yang berobat rawat inap di Puskesmas / Pustu adalah Laki laki sebanyak 19,19%, perempuan sebanyak 23,17%. Total laki-lak- dan perempuan adalah 21,49%,. Selisih jumlah persentase antara laki-laki dan perempuan yang rawat inap di Pustu adalah 3.39%. Sementara yang berobat di Rumah Sakit Swasta laki laki sebanyak 2,3% dan perempuan sebanyak 1,56%. Sementara yang paling banyak menjadi tempat berobat untuk rawat inap adalah di Rumah Sakit Pemerintah dengan rincian 88,83%, perempuan 70,49% dengan selisih antara laki-laki dan perempuan adalah 18,34%. Selisih yang sangat besar antara laki dalam mengakses rawat inap ini. Adapun pada praktek Dokter/Bidan laki-laki 0%, perempuan 6,85%, total keseluruhan 3,94%. Praktek dokter/bidan hanya perempuan yang melakukan pengobatan.

Dengan demikian ada empat tempat layanan yang dimanfaatkan masyarakat untuk rawat inap. Pada Pustu dan praktek dokter/bidan lebih banyak pasien perempuan, bahkan pada praktek dokter/bidan tidak ada pasien rawat inap laki-laki selama satu tahun terakhir. Akan tetapi pada Rumah sakit baik swasta atau negeri, yang lebih banyak pasiennya adalah laki-laki disbanding perempuan.

5. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin, 2018

Gambar 4.14 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten Gayo Lues dan Jenis Kelamin, 2018

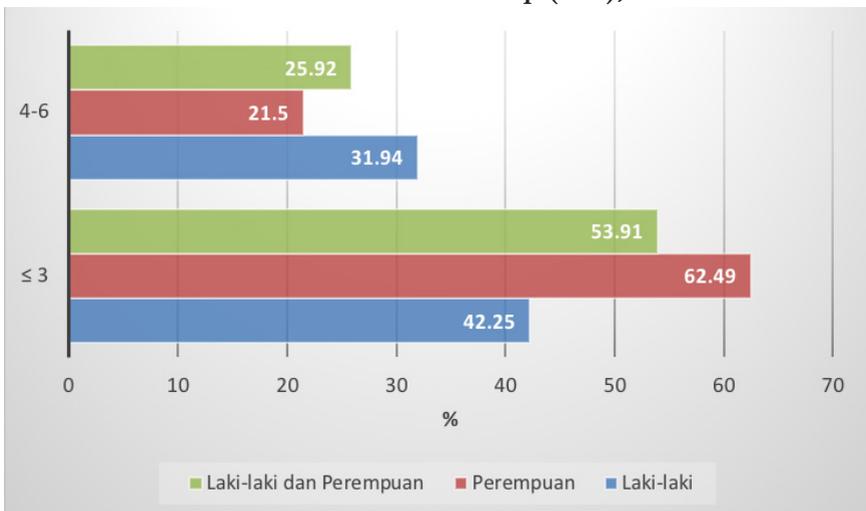


Sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2018

Grafik Persentase Penduduk yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir yang menggunakan jaminan kesehatan, laki –laki berjumlah 100%, perempuan berjumlah 96,36%, total keseluruhan laki-laki dan perempuan adalah 97,9%. Selisih antara laki-laki dan perempuan adalah 2,1%. Gambar ini menunjukkan bahwa penduduk gayo lues memanfaatkan Jaminan kesehatan dengan sangat baik. Akan tetapi dibanding dengan pasien laki-laki yang keseluruhannya telah menggunakan jaminan kesehatan, pasien perempuan masih ada yg tidak menggunakan jaminan kesehatan ini sejumlah 3,64% dari pasien perempuan yang mengakses layanan rawat inap ini. Merujuk gambar sebelumnya, hal ini terkait dengan tempat rawat inap pasien perempuan di praktek dokter/bidan yang umumnya tidak menyediakan layanan jaminan kesehatan.

6. Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten Gayo Lues, Jenis Kelamin, Jumlah Hari Rawat Inap dan Rata-Rata Lama Rawat Inap (hari), 2018

Gambar 4.15 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten Gayo Lues, Jenis Kelamin, Jumlah Hari Rawat Inap dan Rata-Rata Lama Rawat Inap (hari), 2018



Sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2018

Grafik Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten Gayo Lues, Jenis Kelamin, Jumlah Hari Rawat Inap dan Rata-

Rata Lama Rawat Inap (hari). Gambar menunjukkan yang rawat inap 4-6 hari laki-laki berjumlah 31,94%, perempuan berjumlah 21,5%, total laki-laki dan perempuan adalah 25,92%, selisih antara laki-laki dan perempuan adalah 10,4%. Yang rawat inap dibawah 3 hari adalah laki-laki berjumlah 42,25%, perempuan berjumlah 62,91%, total laki-laki dan perempuan adalah 53,91%, selisih antara laki-laki dan perempuan adalah 20.66%.

Data ini menunjukkan kecenderungan yg dirawat lebih lama 4-6 hari adalah laki-laki sementara yang dirawat di bawah 3 hari paling banyak perempuan. Salah satu penyebabnya adalah umumnya perempuan tidak mau dirawat lebih lama meski penyakitnya belum sepenuhnya pulih karena mengingat beban pekerjaan di rumah, perawatan dan pengasuhan anak, sementara tidak ada keluarga, bahkan suami tidak mampu menghandlenya. Sebaliknya pasien laki-laki lebih lebih merasa tenang di perawatan karena beban pengasuhan sepenuhnya di handle oleh istri dan keluarganya.²

Berikut juga menggambarkan jumlah hari dan rata rata lama rawat inap pada level 7-29 hari, yang merupakan batas terlama pasien yang pernah di rawat inap di Gayo Lues

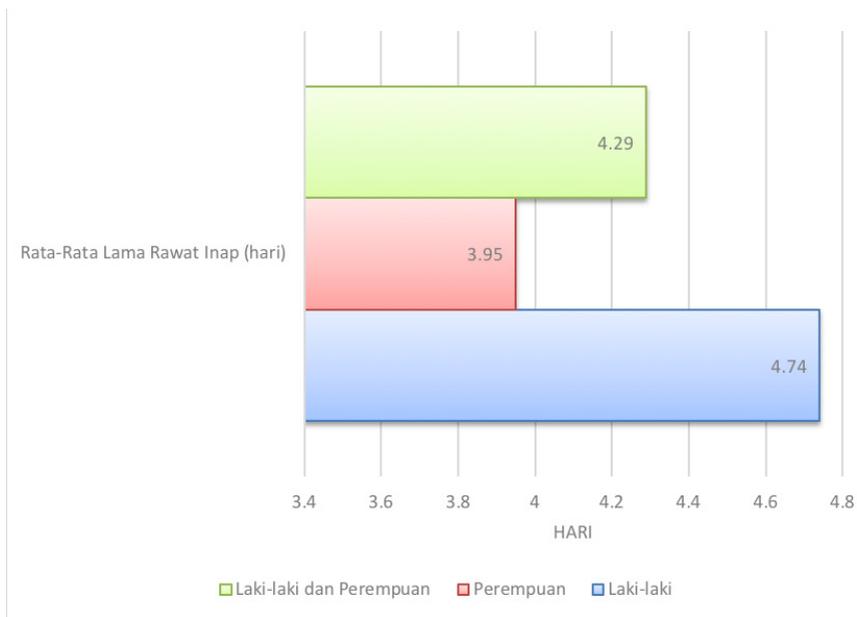
Gambar 4.16 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten Gayo Lues, Jenis Kelamin, Jumlah Hari Rawat Inap dan Rata-Rata Lama Rawat Inap 7-29 hari, 2018



Sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2018

Grafik Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten Gayo Lues, Jenis Kelamin, Jumlah Hari Rawat Inap dan Rata-Rata Lama Rawat Inap (hari), lebih dari 30 hari laki-laki 0% perempuan juga 0%. Rawat inap 7-29 hari laki-laki berjumlah 25, 81%, perempuan berjumlah 16,01%, total laki-laki dan perempuan adalah 20,17%, selisih laki-laki dan perempuan adalah 9,8% dari total jumlah keseluruhan pasien rawat inap di gayo Lues. Situasi ini juga menggambarkan hal yang sama, dimana pada pasien dengan penyakit yang perlu perawatan lebih lama, rata rata pasien laki-laki yang banyak. Selisihnya hamper 10 % dengan pasien perempuan. Kecendrungan pasien perempuan tidak betah berlama-lama karena teringan beban pekerjaan rumah juga menjadi salah satu factor yang menyebabkannya.

Gambar 4. 17 Rata-Rata Lama Rawat Inap (hari), 2018



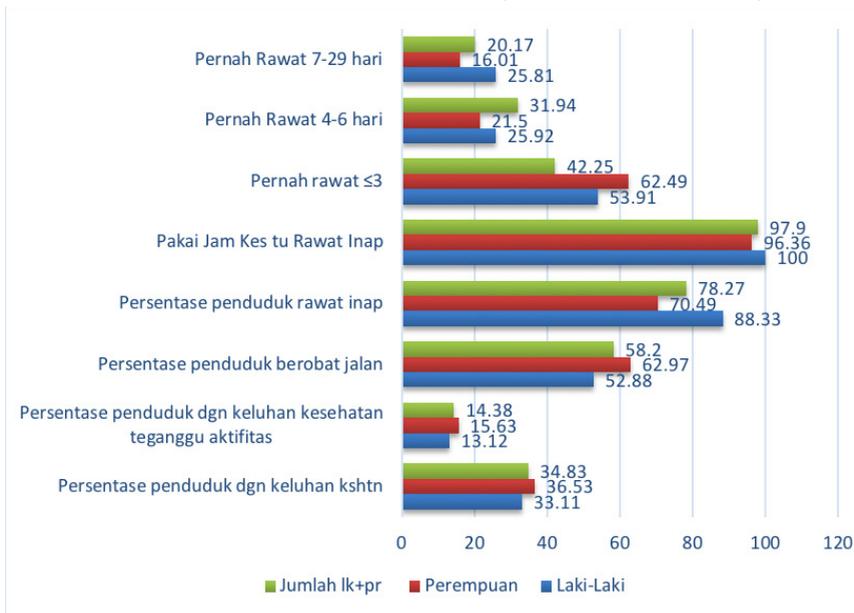
Sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2018

Grafik di atas menggambarkan Rata-Rata Lama Rawat Inap (hari). Rata rata rawat inap laki-laki 4,74%, perempuan 3,95%, total laki-laki dan perempuan adalah 4,29%, selisih antara laki-laki dan perempuan adalah 0,79%.

Rata rata ini menggambarkan hal yang senada bahwa kecendrungan laki-laki lebih lama di rawat. Meski pada rata rata ini selisihnya satu hari, namun dalam bagian per bagian telah dijelaskan di atas ada selisih yang signifikan dari jumlah hari rawat antara laki-laki dan perempuan.

Akan tetapi jika merujuk gambar gambar sebelumnya persoalan perempuan dan kesehatan di Gayo Lues, memiliki tendensi isu tersendiri, karena perempuan memiliki situasi khusus yang membuatnya tidak maksimal menikmati hasil pembangunan. Gambar berikut mengetengahkan situasi yang dihadapi perempuan di Gayo Lues.

Gambar 4.18 Situasi Penduduk dan Layanan Kesehatan Gayo Lues



Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan keluhan kesehatan baik yang terganggu atau tidak terganggu aktifitas lebih banyak dialami perempuan. Sementara yang mendapatkan layanan kesehatan rawat inap lebih dari 4 hari hingga 29 hari yang paling banyak laki-laki. Pengguna jaminan kesehatan untuk pasien rawat inap laki-laki adalah 100% sementara perempuan masih 96%. Sederhananya jika yang punya keluhan kesehatan banyak perempuan, seharusnya yang mendapatkan layanan kesehatan rawat inap yang lebih dari 3 hari juga perempuan. Akan tetapi data

menunjukkan fakta berbeda bahwa meski banyak keluhan kesehatan dialami perempuan, namun layanan kesehatan rawat inap dengan waktu yang lama justru persentasenya lebih banyak laki laki. Dan ternyata pengobatan yang persentasenya lebih tinggi perempuan adalah berobat jalan atau rawat inap dengan waktu perawatan ≤ 3 hari. Artinya berobat jalan menjadi alternative yang dianggap available oleh perempuan. Sementara yg rawat inap kalau sebentar lebih banyak perempuan, tetapi jika sudah lama jumlah perempuan sedikit. Dalam Profil Gender Aceh 2017, disebutkan: kecenderungan perempuan dengan beban pikiran pengasuhan dan beban rumah tangga menjadi salah satu factor yang menyebabkan mereka tidak betah berlama lama di rawat karena memikirkan situasi rumahnya yang diasumsikannya tidak akan termanage baik oleh suami atau keluarga lainnya. Sehingga meski belum sepenuhnya pulih beberapa perempuan memaksakan diri untuk di vonis sembuh dan bisa pulang. Situasi beban domestik perempuan ternyata berimplikasi pada kualitas layanan rawat inap bagi perempuan dengan keluhan kesehatan.

Demikianlah Bab Kesehatan ini dipaparkan sebagai pemetaan penting terkait kondisi layanan kesehatan dari perspektif gender. Pemetaan ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi perencanaan pembangunan kesehatan yang lebih adil gender dan diacu dalam pelaksanaannya. Profil gender ini juga sejogyanya menjadi base line data untuk memulai program dan menjadi dasar untuk menentukan indikator capaian pembangunan kesehatan

BAB V

GENDER DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Tahun 2008 merupakan awal pergolakan perspektif gender bidang politik di Indonesia, seiring dengan keluarnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan salah satu hal mendasar yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut yaitu syarat menjadi badan hukum atas suatu partai politik, disyaratkan bahwa untuk menjadi suatu badan hukum, partai politik harus memiliki kepengurusan, sedikitnya 60% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan. Sementara untuk kecamatan, harus memiliki kepengurusan setidaknya 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan.

Dalam masalah kesetaraan gender diatur secara tegas dengan menentukan tingkat keikutsertaan perempuan dalam aktivitas partai politik sedikitnya 30 persen, demikian pula pada jumlah kepengurusan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Redaksi keterwakilan perempuan dalam partai politik turut menjadi sebuah permasalahan, jika dilihat kembali apa yang dimaksudkan dengan keterwakilan perempuan itu sendiri tidak dibahas dalam Undang- Undang No. 2 Tahun 2008, sehingga harus ditinjau kembali dan dicari dalam perundangan lainnya.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 menyatakan bahwasannya, keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan jender. Sementara sebagian pihak memahami kata keterwakilan perempuan seolah-olah menjelaskan bahwa hak-hak perempuan dalam politik hanyalah sebuah pemberian atau hadiah.

Sehingga kemudian pergolakan terjadi agar Undang-Undang tersebut harus diverifikasi ulang dengan acuan keterwakilan perempuan bukanlah sebuah pemberian. Pada kenyataannya hingga saat ini *Affirmative Action* yang merupakan sebuah harapan agar perempuan mendapatkan setidaknya sesuai dengan ketentuan minimum 30 persen keikutsertaan pada setiap aktivitas publik dan politik, tampaknya belum mampu dipenuhi.

Dalam konteks Aceh, perempuan dijamin secara konstitusi untuk menduduki posisi jabatan politik, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif secara proporsional. (**Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**)

5.1 Perempuan di Legislatif

Setelah reformasi 98, terjadi perubahan titik sentrum politik di Indonesia yang tadinya kekuasaan lebih besar pada eksekutif menjadi pada legislatif. Perubahan ini menjadi perubahan fungsi dan peran lembaga-lembaga pemerintahan termasuk DPRK. Fungsi dan peran ini pada dasarnya yang tadinya DPRK bagian dari eksekutif berubah menjadi legislatif murni, konsekuensinya terjadi perubahan pada legislatif dan eksekutif dimana posisi legislatif sedikit lebih unggul dari eksekutif karena “apa yang dilakukan eksekutif adalah perintah dari legislatif”. (electronic theses dan dissertation UGM, Agus Reskinof, diakses pada 4 Desember 2019, pukul 19.30). Oleh sebab itu, legislatif berperan lebih dominan dan sentral melalui fungsi dan kewenangannya dalam legislasi, budgeting dan pengawasan. Berikut ini ditampilkan data yang menggambarkan situasi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di DPRK Gayo Lues.

Tabel.5.1 Jumlah Anggota DPRK Gayo Lues Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2018

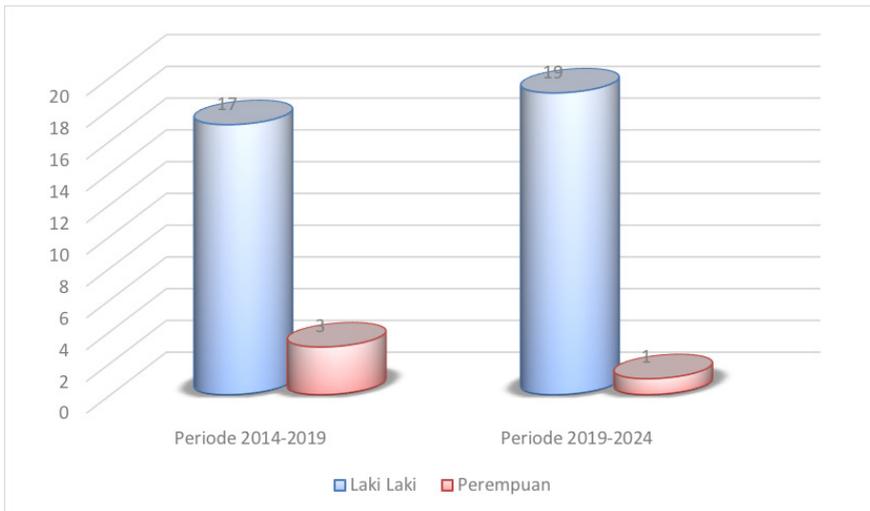
NO	Partai Politik	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai Golkar	6	-	6
2	Partai Aceh	1	1	2
3	Partai Demokrat	2	-	2
4	PPP	1	-	1

NO	Partai Politik	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
5	Partai Gerindra	1	-	1
6	PKB	2	-	2
7	HANURA	2	-	2
8	PKPI	-	2	2
9	PDI Perjuangan	1	-	1
10	PBB	1	-	1
Jumlah	17	3	20	

Sumber: Sekretariat DPRK Gayo Lues 2019

Tabel di atas menggambarkan snggota DPRK perempuan periode 2014- 2019 berjumlah 3 (tiga) orang/ 15% dan terjadi penurunan signifikan, di mana anggota yang terpilih periode 2019- 2024 dari 20 orang, hanya 1 Orang Perempuan (5%) seperti terlihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 5.1 Perbandingan Anggota DPRK Gayo Lues Periode 2014 dan 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin

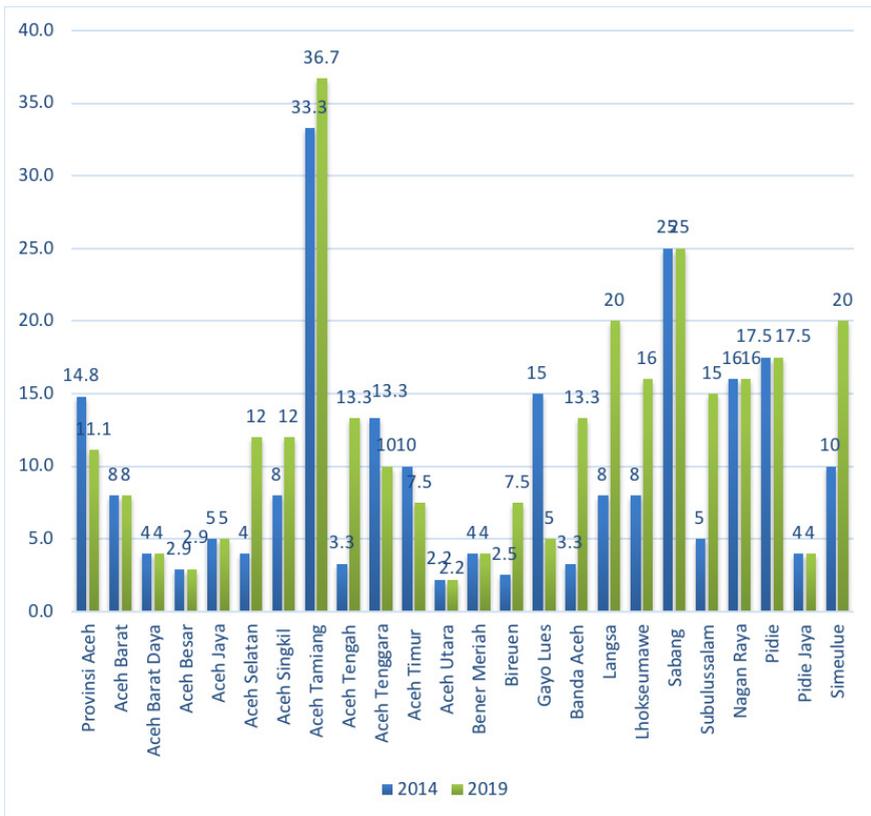


Sumber: Data diolah 2019

Fakta ini cenderung mengkhawatirkan karena di saat harapannya minimal 30% yang terjadi justru penurunan drastis. Terhadap kondisi ini diperlukan langkah-langkah khusus yang tentunya diprakarsai oleh para politisi dan Partai Politik melalui penguatan SDM perempuan seperti pengkaderan dan pendidikan politik.

Jika dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, Kabupaten Gayo Lues tergolong yang paling drastic penurunan pesentase keterwakilan perempuan di legislative dari periode pemilihan 2014 ke periode pemilihan 2019. Gambar berikut menengentahkam hal ini:

Gambar 5.2 Persentase Anleg Perempuan di DPRA dan DPRK berdasarkan Kabupaten/Kota tahun pemilihan 2014 dan 2019



Gambar di atas menunjukkan dari 23 kabupaten kota, rata rata anggota legislatifnya meningkat pesentasenya. Hanya provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Timur dan Gayo Lues yang mengalami penurunan. Yang paling drastic penurunannya adalah Gayo Lues. Situasi ini menjadi kontradiksi dengan perhatian dan dukungan banyak pihak terkait peran politik perempuan, dan berhasil meningkatkan jumlah anleg perempuan di berbagai kabupaten kota, sementara Gayo Lues malah menjadi yang sangat menurun keterwakilan perempuannya.

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan bagian indikator pemberdayaan gender (IDG). Selain itu keterwakilan perempuan di parlemen juga menjadi salah satu indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu hasil dan proses Pemilu menjadi sangat terkait dengan capaian IDI Gayo Lues. ²

Dari 28 indikator yang digunakan untuk mengukur capaian indeks demokrasi, 9 diantaranya terkait langsung dengan dinamika perpolitikan khususnya Pemilu. Kedelapan indikator tersebut adalah:

1. Indikator ke 11 : hak memilih atau dipilih terhambat
2. Indikator ke 12 : Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
3. Indikator ke 13 : Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
4. Indikator ke 14 : Voters turnout
5. Indikator ke 15 : Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi

2 BPS, 2018, Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh

6. Indikator ke 18 :Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
7. Indikator ke 19 : Kecurangan dalam Penghitungan suara
8. Indikator ke 23 : Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu
9. Indikator ke 24 : Persentase perempuan pengurus partai politik ³

Dari 9 indikator yang terkait pemilu, dua di antaranya terkait langsung dengan perempuan yaitu indikator ke 15 dan indikator ke 24 terkait persentase perempuan terpilih di DPRA dan persentase perempuan pengurus partai politik. Dengan demikian penguatan kiprah politik perempuan akan berkontribusi langsung bagi peningkatan IDI Gayo Lues. Capaian IDI merupakan tolak ukur bagi keberhasilan pembangunan demokrasi di Indonesia. Maka penguatan kiprah perempuan di legislatif, selain memberikan point significant bagi indeks pemberdayaan gender (IDG), juga berdampak bagi peningkatan capaian Indeks Demokrasi Indonesia.

5.2 Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Terlepas dari kebijakan baru Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri tentang perampingan jabatan, eselon, dalam jabatan/ golongan di lingkungan Eksekutif bukan hanya menggambarkan kapasitas dan kewenangan terhadap bawahan atau lintas instansi dalam hal pengambilan keputusan, tetapi juga menggambarkan latar belakang pendidikan, karir juga reputasi seorang Pegawai. Di sinilah kemudian pemetaan jabatan eselon menjadi penting selain jumlah pegawai itu sendiri secara keseluruhan. Hal itu dilakukan melalui keahliannya dalam menetapkan kebijakan-kebijakan atau tugas pokok dan tambahan yang akan membawa lingkungan kerjanya mencapai sasaran-sasaran jangka pendek maupun jangka panjang.

Tabel berikut menggambarkan pejabat structural eselon menurut jenis kelamin.

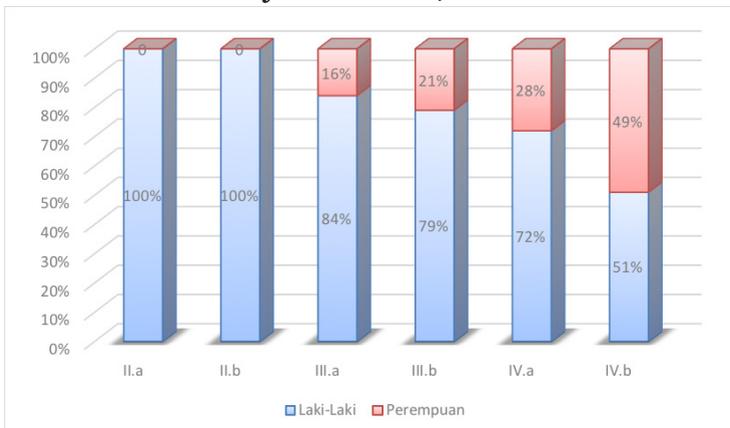
Tabel 5.2 Rekapitulasi Pejabat Struktural Eselon II s/d V Dirinci Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017

No	Eselon	Jumlah	Kelamin		Keterangan	
			Laki-Laki	Perempuan	Terisi	Kosong
1	II.a	1	1	-	1	-
2	II.b	29	29	0	29	7
3	III.a	63	53	10	63	0
4	III.b	92	73	19	92	0
5	IV.a	351	254	97	350	1
6	IV.b	43	22	21	43	0
7	V.	-	-	-	-	-
	Jumlah	579	432	147	578	8

Sumber : Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi level eselon maka semakin sedikit keterwakilan perempuan. Jumlah yang lebih balance adalah pada eselon IV.b. Untuk jelasnya perbandingan representasi perempuan, maka berikut akan diketengahkan gambarannya.

Gambar 5.3 Persentase Pejabat Struktural Eselon II s/d V Dirinci Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017



Dari gambar jelas terlihat minimnya representasi perempuan pada level pengambil kebijakan. Pada eselon II dari data BPS 2018, tidak ada satupun keterwakilan perempuan. Pada eselon III a ada 16% keterwakilan perempuan dan eselon III.b 21% persentase yang masih sangat sedikit. Situasi baru agak setara pada level eselon IV.b yaitu laki-laki 51% perempuan 49%.

Melihat gambaran jumlah anggota legislative yang menurun drastis dan minimnya keterwakilan perempuan pada level pengambil kebijakan menunjukkan sulitnya perempuan menjadi pemimpin di Gayo Lues. Apapun tantangannya seyogyanya pemerintah Gayo Lues harus melakukan affirmative action untuk mendorong kesetaraan ini. Karena hal ini berdampak pada angka capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan juga Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

BAB VI

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2008 disebutkan bahwa Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan. Secara spesifik pengertian kekerasan diuraikan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, yaitu: setiap perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, psikologis dan seksual dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik dalam maupun di luar lingkup rumah tangga.

6.1 Kekerasan Terhadap Perempuan

Setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan. Atau dapat juga diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, psikologis dan seksual dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik dalam maupun di luar lingkup rumah tangga. Untuk mengetahui kondisi kekerasan terhadap perempuan di Gayo Lues, maka berikut akan diketengahkan beberapa data data.

Gambar 6.1 Kasus Kekerasan Yang Ditangani Oleh Lembaga Layanan Kabupaten Gayo Lues



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018

Dari grafik di atas Kasus Kekerasan Yang Ditangani Oleh Lembaga Layanan Kabupaten Gayo Lues menunjukkan bahwa data penduduk Kabupaten Gayo Lues yang mengalami kasus kekerasan pada tahun 2016 ada 2 kasus, tahun 2017 ada 7 kasus, tahun 2018 ada 3 kasus.

Karakteristik data kekerasan adalah bersifat gunung es, yang hanya sedikit terungkap di permukaan, namun banyak kasus yang tidak terungkap di bawah permukaan. Keberfungsian lembaga layanan menjadi salah satu factor yang dapat meningkatkan data kasus kekerasan yang terungkap. Rendahnya angka kekerasan yang dilaporkan tidak serta merta berarti angka kekerasan rendah. Hal ini lebih menunjukkan kurang berfungsinya lembaga layanan, sehingga kasus yang tertangani hanya sedikit.

Gambar 6.2 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Gayo Lues



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019

Dari grafik Kasus Terhadap Perempuan Berdasarkan Kabupaten Gayo Lues menunjukkan bahwa data yang tersedia tentang penduduk Kabupaten Gayo Lues yang mengalami kekerasan pada tahun 2016 ada 2 kasus, tahun 2017 ada 7 kasus, tahun 2018 ada 1 kasus dan tahun 2019 (Triwulan I) ada 5 kasus.

Dari data di atas di analisis kenapa kasusnya sedikit, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan antara lain karena tidak terjangkaunya kasus kasus yang ada. Hal ini salah satunya disebabkan tidak berfungsinya badan layanan dengan baik sehingga layanan kurang menjangkau korban, masyarakat tidak paham, dan tidak mengerti bagaimana prosedur dalam membuat pelaporan tentang Kekerasan. Kedua Masyarakat tidak mengetahui lembaga mana yang menangani kasus kekerasan. Masyarakat juga mengalami kurangnya pengetahuan tentang jenis kekerasan yang mana saja yang mendapatkan layanan. Disini diperlukan sosialisasi pihak terkait untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat.

Pada gambar di atas tampak pada tahun 2019 di triwulan pertama tahun

2019 jumlah kasus yang ditangani menjadi 5. Peningkatan ini menunjukkan semakin berfungsinya lembaga layanan, sehingga untuk tri wulan pertama saja sudah mampu menjangkau 5 kasus. Lembaga layanan yang menangani hal ini adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Gayo Lues.

Gambar berikut mengetengahkan tentang kendala yang dihadapi dalam melakukan penguatan P2TP2A di seluruh kabupaten kota, termasuk Gayo Lues

Aspek	Tantangan
KELEMBAGAAN	<ul style="list-style-type: none">• P2TP2A di Aceh ada di provinsi dan kabupaten dan kota, namun tidak semua berjalan baik• Unit PPA dan APH lain sudah ada, namun terkendala perspektif• Kelembagaan komunitas yang terlibat di Aceh adalah MAA
INDIKATOR PENANGANAN	<ul style="list-style-type: none">• SPM KTPA dijalankan oleh Dinas PPPA dan mitra kerjanya, tetapi tidak semua indikator terpenuhi• Penanganan komunitas dengan mekanisme adat/agama dan tokoh masyarakat
SOP DAN MEKANISME KOORDINASI	<ul style="list-style-type: none">• Instansi vertikal punya, instansi daerah banyak yang belum punya• SOP koordinasi antar lembaga belum ada• SOP komunitas tersedia di Aceh
KEBIJAKAN DAN ANGGARAN	<ul style="list-style-type: none">• Regulasi tersedia di Aceh• Dukungan data terpadu belum tersedia sehingga advokasi kebijakan masih belum optimal• Alokasi anggaran di daerah masih sangat terbatas, terutama di Kab/Kota

Keberfungsian P2TP2A, komitmen anggaran pemerintah pada layanan, mekanisme dengan SOP yang jelas dan sinergisitas antar multi pihak menjadi empat pra syarat bagi menguatnya layanan terhadap perempuan korban kekerasan

BAB VII

KETAHANAN KELUARGA

7.1 Konsep Keluarga.

Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, mempunyai sistem sosial dan berperan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi cita-cita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga menjadi pertahanan utama dari dinamika sosial yang ada terhadap pengaruh-pengaruh negatif dilingkungannya.

Keluarga (family) merupakan sebuah konsep yang memiliki pengertian dan cakupan yang luas dan beragam. Keluarga, dalam konteks sosiologi, dianggap sebagai suatu institusi sosial yang sekaligus menjadi suatu sistem sosial yang ada di setiap kebudayaan. Sebagai sebuah institusi sosial terkecil, keluarga merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang mempunyai hubungan atas dasar pernikahan, keturunan, atau adopsi serta tinggal bersama di rumah tangga biasa (Zastrow, 2006). Sementara itu, keluarga juga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami-istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau adopsi (anak angkat/pungut) (Burgess dan Locke dalam Sunarti, 2006).

7.2 Ketahanan Keluarga.

Konsep ketahanan keluarga (family resilience) dalam perspektif psikologi dibangun berdasarkan paradigma kompeten-based dan strength-oriented family. Bagaimana ketahanan keluarga dalam menghadapi problem tahan ketika diuji dengan berbagai kesulitan. Kemampuan ini akan terlihat dimana keluarga menjadi tahan terhadap gangguan yang dihadapi akibat perubahan yang terjadi sehingga menjadi tahan terhadap gangguan situasi

persoalan kehidupan. Ketahanan keluarga menjadi isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga berfungsi untuk mengukur sejauhmana keluarga telah melaksanakan peran dan fungsi, tugas-tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggota keluarga.

Keluarga adalah unit terkecil masyarakat, merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang mempunyai hubungan atas dasar pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup dan tinggal bersama di rumah tangga. Keluarga mempunyai peran dalam memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, social budaya dan sebagai pertahanan utama yang dapat menangkak radikal bebas (pengaruh negative) dari dinamika social yang ada. Keluarga mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, pengembangan kualitas sumberdaya manusia, mencakup pengembangan kemampuannya, kemampuan menghadapi tantangan dan mencegah resiko terhadap masalah di lingkungannya. Kemampuan SDM tersebut menjadi modal upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap keluarga, perempuan dan anak sekaligus. Dalam konteks sosiologi keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki sistem tersendiri, dan ada disetiap kebudayaan.

Beberapa yang menjadi tolok ukur nilai dalam ketahanan keluarga dapat diamati pada berbagai situasi yang dihadapi sebagai bangunan karakter psikologis yang melekat pada diri seseorang. Problem keluarga menjadi perhatian banyak pihak khususnya pemerintah. Peningkatan ketahanan keluarga dalam pembangunan bertujuan mempersiapkan kemampuan keluarga menghadapi berbagai tantangan dalam menuju capaian keluarga sejahtera.

Banyaknya kasus/meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kenakalan remaja, kekerasan seksual pada anak terorisme, LGBT, narkoba, tindak pidana korupsi, permasalahan siswa disekolah, pola asuh yang bermasalah, kemampuan ekonomi, lingkungan hidup, dinilai berawal dari lemahnya kemampuan ketahanan keluarga dan menjadi tantangan dalam pembangunan. Berangkat dari itu semuanya pemerintah berkewajiban memiliki perhatian serius dalam menjadikan/menciptakan bangsa, generasi bangsa yang kuat, memiliki kesejahteraan fisik dan mental.

Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan

kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, mendefinisikan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Sementara, peran penting keluarga tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Lebih jauh lagi keluarga perlu dibangun dan ditingkatkan kualitasnya agar menjadi keluarga sejahtera serta menghasilkan sumberdaya yang efektif bagi pembangunan nasional. Ketahanan keluarga sangat erat kaitannya dengan kemampuan individu maupun keluarga itu sendiri dalam mengelola sumberdaya yang ada dalam menghadapi permasalahan hidup baik dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan fisik, psikis anggota keluarga termasuk kesejahteraan sosial.

Ketahanan keluarga pada tataran realitas adalah suatu proses yang sangat dinamis, dalam melakukan adaptasi positif memiliki kemampuan memprediksi dengan cermat dalam mengantisipasi terhadap bahaya yang mengancam keluarga baik dari luar maupun dari dalam yang berakibat konflik serta berimbas pada perpecahan keluarga. “Catatan akhir tahun 2018 belum ada perbaikan ketahanan keluarga”².

Era globalisasi, ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi ikut memberi pengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan masyarakat. Eksistensi individu dan keluarga menghadapi berbagai ancaman sebagai dampak proses transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat. Banyak keluarga mengalami perubahan baik struktur dan fungsi dan perannya. Dampak negatif transformasi sosial akan menggoyahkan eksistensi individu dan keluarga, sehingga menjadi rentan dan bahkan berpotensi tidak memiliki ketahanan.

Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga. Namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga yang tingkat kesejahteraannya lebih tinggi berpotensi lebih besar memiliki ketahanan yang lebih tangguh. Kedua rumus tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga yaitu pada pasal 1 ayat 11: Ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut maka ketahanan keluarga dapat diukur dengan menggunakan system yang meliputi komponen input (sumberdaya fisik dan non fisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannay), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: (1) Ketahanan fisik, terpenuhinya kebutuhan sandang pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) Ketahanan social yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif dan komitmen keluarga yang tinggi; (3) Ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif dan konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.

Kabupaten Gayo lues dengan ibu kotanya Blangkejeren adalah salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Aceh, memiliki dengan jumlah penduduk laki perempuan dengan rasio berimbang (99) menjadi lokasi bahasan mengenai ketahanan keluarga, berikut adalah data yang dihimpun akan dijadikan pertimbangan dalam mengukur keberadaan ketahanan keluarga di Kabupaten tersebut:

Sebelum mengetengahkan data ketahanan keluarga, pada bagian ini juga kan diketenagihkan konteks yang terkait dengan ketahanan keluarga, seperti kondisi jarak kecamatan ke pusat pememrintahan, dan jumlah penduduk. Data pendukung ini memberikan gambaran awal sebagai geografis dan demografis setting kehidupan keluarga di Gayo Lues.

Tabel 7.1 Jarak Kecamatan di Gayo Lues dengan Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi

NO	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak ke Ibu Kota Kab (Km)	Jarak ke Ibu Kota Provinsi
	-1	-2	-3	-4
1	Kuta Panjang	Kuta Panjang	12	486
2	Blang Jerango	Buntul Gemuyang	14	488
3	Blangkejeren	Blangkejeren	0	474
4	Putri Betung	Gumpang	40	514
5	Dabun Gelang	Badak Bur Jumpe	2	476
6	Blang Pegayon	Cinta Maju	3	477
7	Pining	Pining	55	529
8	Rikit Gaib	Ampa Kolak	18	456
9	Pantan Cuaca	Kenyaran	28	446
10	Terangun	Terangun	45	519
11	Tripe Jaya	Rerebe	55	529

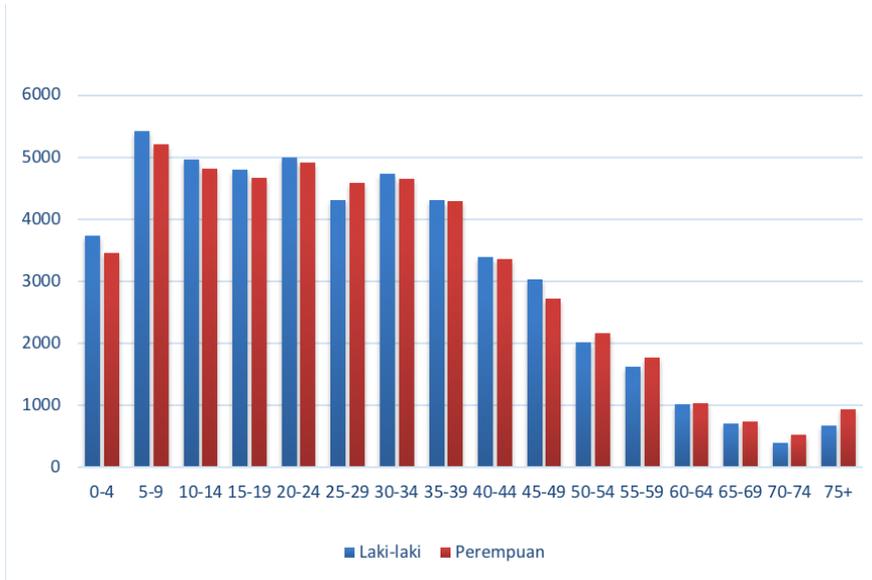
Sumber: BPS Kabupaten Gayo Lues

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Gayo Lues memiliki kecamatan kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan. Beberapa diantaranya termasuk dalam kategori desa terpencil. Pedesaan yang jauh dari pusat pemerintahan identik dengan masyarakat tradisional yang hidup sederhana. Karakteristik umumnya adalah jauh dari akses informasi dan penggunaan IT. Sehingga masyarakat dengan karakteristik pedesaan masih sangat mendominasi kehidupan keluarga di Gayo Lues.

Terkait jumlah penduduk, Badan Pusat Statistik memperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Gayo Lues pada pertengahan tahun 2018 berjumlah 92.602 jiwa, terdiri dari 46.099 laki-laki dan 46.503 perempuan dengan rasio jenis kelamin 99.³

3 BPS Gayo Lues 2018. <https://gayolueskab>

Gambar 7.1 Jumlah Registrasi Penduduk di Kabupaten Gayo Lues Menurut Kelompok Umur, Desember 2018



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues

Jumlah Kepala Keluarga (KK) update terakhir tanggal 11 agustus 2018 : 20.872 KK. ⁴

7.3 Dimensi, Variabel dan Indikator Ketahanan Keluarga Kabupaten Gayo Lues.

Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 tahun 2013 tentang pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup berbagai dimensi:

1. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga,
2. Ketahanan Fisik,
3. Ketahanan Ekonomi,
4. Ketahanan Sosial-Psikologi, dan
5. Ketahanan Sosial budaya.

⁴ Badan Pusat Statistik Gayo Lues.

Dimensi-dimensi tersebut kemudian disebut sebagai dimensi pengukur tingkat ketahanan keluarga. Selanjutnya KPPPA telah merumuskan 15 variabel dan 24 (dua puluh empat) indikator. Masing-masing dimensi mempunyai variabel dan masing-masing variabel dengan indikator. Dimensi (1) Legalitas dan Keutuhan Keluarga mempunyai 3 variabel dan 7 indikator; (2) Ketahanan Fisik, mempunyai 3 variabel, 4 indikator; (3) Ketahanan Ekonomi, 4 variabel dengan 7 indikator; (4) Ketahanan Sosial-Psikologi, 2 variabel dan 3 indikator; 5. Ketahanan Sosial budaya, 3 variabel dengan 3 indikator.

Gambar 7.2 Dimensi dan Variabel Pengukur Tingkat Ketahanan Keluarga



1. Dimensi 1 : Legalitas dan Keutuhan Keluarga mempunyai 3 variabel, yaitu :

1. Landasan legalitas (2 indikator)
2. Keutuhan keluarga (1 indikator)
3. Kemitraan gender (4 Indikator)

2. Dimensi 2 : Ketahanan Fisik mempunyai 3 variabel, yaitu :
 1. Kecukupan pangan dan gizi (2 indikator)
 2. Kesehatan keluarga (1 indikator)
 3. Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur (1 indikator)
3. Dimensi 3 : Ketahanan Ekonomi mempunyai 4 variabel, yaitu :
 1. Tempat tinggal keluarga (1 indikator)
 2. Pendapatan keluarga (2 indikator)
 3. Pembiayaan pendidikan anak (2 indikator)
 4. Jaminan keuangan keluarga (2 indikator)
4. Dimensi 4 : Ketahanan Sosial-Psikologi mempunyai 2 variabel, yaitu:
 1. Keharmonisan keluarga (2 indikator)
 2. Kepatuhan terhadap hukum (1 indikator)
5. Dimensi 5 : Ketahanan Sosial-Budaya mempunyai 3 variabel, yaitu :
 1. Kepedulian social (1 indikator)
 2. Keeratan social (1 indikator)
 3. Ketaatan beragama (1 indikator)

Gayo lues, memiliki profil dalam ketahanan keluarga dari sisi; dimensi pengukur, variable dan indikator sebagai berikut:

Dimensi I: Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Penetapan dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga didasari pada pemikiran bahwa keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila dibangun berdasarkan pilar yang kuat berupa perkawinan/pernikahan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di negara ini. Perkawinan bukan saja harus sah menurut agama/kepercayaan, tetapi juga diakui dan disahkan menurut perundang-undangan yang berlaku sehingga ada kepastian hukum tentang eksistensi pernikahan, serta adanya pengakuan dan perlindungan atas hak dan kewajiban antara suami-istri beserta anak keturunannya. Pentingnya legalitas perkawinan menurut perundang-undangan didasari pada perlunya jaminan perlindungan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan serta kejelasan asal-usul anak. Landasan legalitas keluarga dalam konteks ketahanan keluarga adalah perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya; disamping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimensi Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, dijabarkan melalui 3 (tiga) variabel dan 7 (tujuh) indikator yaitu:

Variabel 1. Landasan Legalitas.

Diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Legalitas Perkawinan, dan Legalitas Kelahiran.

Indikator 1. Legalitas Perkawinan.

Legalitas perkawinan merupakan salah satu landasan penting bagi keluarga untuk membentuk sebuah keluarga harmonis yang sejahtera lahir dan batin. Perkawinan yang tidak sah menurut hukum yang berlaku akan menjadi hambatan dalam mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga karena mengandung resiko tidak terpenuhinya hak-hak istri dan anak. Bukti perkawinan yang sah berupa dokumen pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Bagi penduduk yang beragama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Sebaliknya, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam maka dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Dokumen pencatatan perkawinan dimiliki oleh masing-masing suami dan isteri yang berisi kutipan akta perkawinan yang dapat digunakan sebagai alat bukti perkawinan yang sah, yaitu berupa buku nikah isteri dan buku nikah suami.

Pasangan perkawinan di Gayo Lues masih banyak yang tidak memiliki akta nikah. Lebih dari 4000 (empat ribuan) pasangan suami isteri di Gayo Lues Galus) belum memiliki buku nikah⁵. Diibaratkan masih bodong, tidak

5 <http://aceh.tribunnews.com/2019>. Bupati Galus, M Amru, 6 agustus 2019, 20:30.

memiliki surat-surat yang sah. Pernyataan ini disampaikan pada pembukaan isbat nikah di Balai Musara Blangkejeren bekerja sama dengan Dinas Syar'at Islam Gayo Lues. Hal ini diduga karena berbagai faktor, salah satunya warga tidak paham atau tidak mampu dan tergolong miskin, atau korban konflik, bahkan mayoritas sudah usia renta. Kepala Dinas Syari'at Islam (DSI) Gayo Lues Husin M. S. Ag menyampaikan hari ini DSI memberikan isbat nikah gratis kepada 150 pasangan suami isteri di kabupaten Galus, bahkan sebelumnya 100 pasutri. Selanjutnya untuk mengurangi bertambahnya jumlah warga yang tidak tercatat dan tidak memiliki akta nikah, bupati mengeluarkan intruksi kepada masyarakat agar tidak melayani pernikahan dibawah tangan kadi liar atau perangkat desa. Selain menikah dikantor urusan agama begitu juga bercerai harus melalui kantor Mahkamah”⁶

Indikator 2. Legalitas Kelahiran.

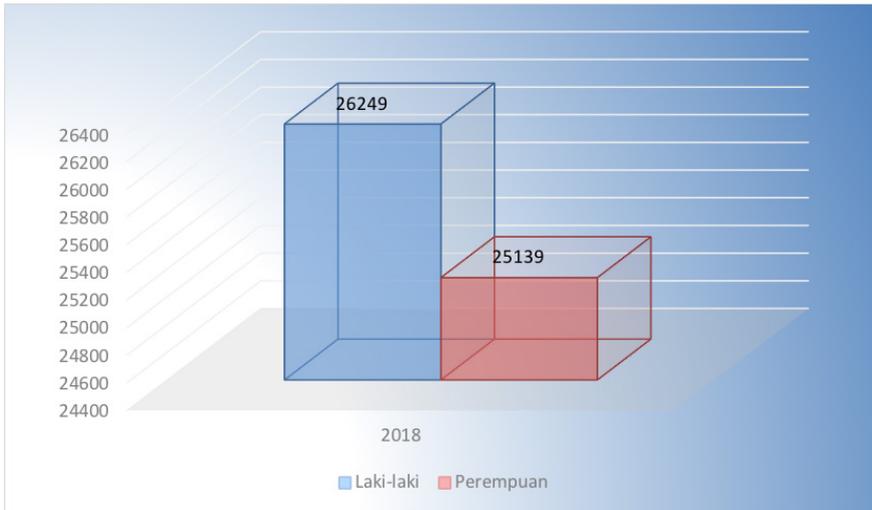
Kepemilikan akte kelahiran merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 5 pada undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Hal tersebut juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat (2) berbunyi “Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran”. Bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang dinyatakan dengan adanya akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat dari pemerintah⁷.

6 Serambinews.com, selasa, 6-8 2019. Sebagaimana dikutip tribunnnews.com.

7 Buku: Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016.

Berikut adalah data kepemilikan Akte Kelahiran di Gayo Lues:

Gambar 7.3 Banyaknya Akte Kelahiran Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Gayo Lues, 2018



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues

Variabel 2. Keutuhan Keluarga.

Diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Keberadaan Pasangan Suami-Istri yang Tinggal Bersama dalam Satu Rumah.

Keluarga yang tidak utuh akan berpotensi mempunyai ketahanan yang rendah. Keluarga yang tidak utuh akan mempunyai kemampuan lebih rendah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologis anggota keluarganya, khususnya bagi anak-anak dan orang tua. Salah satu indikasi ketidakutuhan keluarga terjadi pada keluarga yang suami dan istrinya tidak tinggal menetap dalam satu rumah sehingga pembinaan keluarga dan pengasuhan anak cenderung mengalami masalah dan berpengaruh terhadap kondisi psikologis semua anggota keluarganya. Salah satu penyebab ketidakutuhan keluarga adalah terpisahnya tempat tinggal antara suami dan istri atau orang tua dan anak dalam waktu yang relatif lama yang pada umumnya diakibatkan oleh terpisahnya rumah dengan tempat kerja dengan jarak yang sangat jauh. Jika hal tersebut terjadi, maka hampir dipastikan komunikasi dan interaksi antara

sesama anggota keluarga menjadi kurang intens yang pada akhirnya berakibat pada terganggunya proses tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, untuk menjamin keutuhan keluarga tersebut maka setiap anggota keluarga harus tinggal dan menetap dalam satu rumah sehingga terbina ikatan emosional dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban antar anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel.7.2 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Berstatus Kawin yang Pasangannya Biasa Tinggal di Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin , 2018

Kabupaten/ Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Simeulue	99,53	98,89	99,21
Aceh Singkil	99,13	98,72	98,93
Aceh Selatan	99,75	99,40	99,57
Aceh Tenggara	99,75	99,36	99,55
Aceh Timur	99,21	95,91	97,53
Aceh Tengah	99,66	99,17	99,42
Aceh Barat	98,97	98,27	98,62
Aceh Besar	99,52	99,32	99,42
Pidie	99,20	95,67	97,40
Bireuen	96,67	93,33	94,96
Aceh Utara	98,62	94,45	96,49
Aceh Barat Daya	99,67	96,93	98,27
Gayo Lues	99,80	98,38	99,09
Aceh Tamiang	98,77	96,40	97,57
Nagan Raya	99,30	99,87	99,58
Aceh Jaya	99,37	97,68	98,52
Bener Meriah	99,60	97,26	98,43
Pidie Jaya	98,98	94,67	96,76
Banda Aceh	96,04	99,73	97,85
Sabang	97,25	97,01	97,13
Langsa	99,19	95,99	97,57

Kabupaten/ Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Lhokseumawe	98,06	96,82	97,44
Subulussalam	99,43	99,88	99,66
ACEH	98,83	96,99	97,90

Dari tabel di atas diketahui bahwa di Gayo Lues, 99,09 % penduduk yang memiliki pasangan tinggal bersama dalam satu rumah. Dari segi ketahanan keluarga terkait dengan indicator keutuhan keluarga maka keadaan keluarga di Gayo Lues ini sangat baik.

Sebagai pelengkap berikut diketengahkan table yang terkait juga dengan variable keutuhan keluarga khususnya dalam hal nikah rujuk dan cerai.

Tabel 7.3 Banyaknya Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, 2018

No	Kecamatan	Nikah	Talak	Perubahan Data Nikah	Cerai	Rujuk
1	Kuta Panjang	6	2	2	6	-
2	Blang Jerango	-	2	-	-	-
3	Blangkejeren	37	16	9	40	-
4	Putri Betung	1	1	-	4	-
5	Dabun Gelang	26	-	4	3	-
6	Blang Pegayon	15	2	-	-	-
7	Pining	19	-	C	1	-
8	Rikit Gaib	35	3	-	-	-
9	Pantan Cuaca	38	-	-	-	-
10	Terangun	46	3	-	2	-
11	Tripe Jaya	51	2	-	1	-
Jumlah	2018	274	31	15	57	-
	2017	282	29	1	71	-
	2016	528	16	-	53	-
	2015	NA	32	-	56	-

Sumber : BPS 2019

Berdasarkan data tersebut jumlah dalam status nikah 274 pasangan pada tahun 2018, jika ditambah pasangan status nikah dari 2 (dua) tahun sebelumnya (2017 dan 2016) dan ditambah data pasangan perubahan data nikah (perbaiki kesalahan data dibuku nikah) 16 pasangan maka total 1,100 pasangan menunjukkan bahwa mayoritas pasangan berada/hidup dalam satu rumah. Meskipun demikian masih signifikan angka talak berjumlah 108 pasangan dan status cerai 237 maka jumlah 345 pasangan mengalami broken home. Data tersebut juga dapat disimpulkan bahwa terdapat angka yang cukup signifikan pula sekitar 32% pasangan yang mengalami broken home. Keadaan ini semestinya menjadi perhatian pihak pemerintah terkait untuk melakukan penguatan ketahanan keluarga.

Variabel 3. Kemitraan Gender.

Diukur berdasarkan 4 (empat) indikator, yaitu: Kebersamaan dalam Keluarga; Kemitraan Suami-Istri; Keterbukaan Pengelolaan Keuangan; dan Pengambilan Keputusan Keluarga.

Kemitraan gender dalam keluarga tidak dapat dipisahkan, karena problem keluarga merupakan problem bersama. Kebersamaan menjadi hal penting untuk keutuhan keluarga. Harmonis dan sejahtera bahagia adalah tujuan bersama keluarga.

Kemitraan gender (suami-isteri, anak dan anggota keluarga) secara baik tidaklah hanya sebatas pekerjaan domestik, publik dan masyarakat namun ketersediaan waktu bersama dalam berbagi peran dan melakukan peran-peran itu sendiri menjadi urgent. Kemitraan gender secara baik dalam keluarga dapat meningkatkan ketahanan keluarga.

Demikian pula dalam pengambilan keputusan atas nama keluarga adalah menjadi keputusan keluarga. Keluarga (suami, isteri, anak-anak dan anggota keluarga lainnya) adalah penerima manfaat dari sebuah keputusan apapun di dalam keluarga itu sendiri. Pemberdayaan sumber daya secara professional melalui peran-peran anggota keluarga dengan adil dan setara, baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan, dalam pengambilan keputusan menjadi keniscayaan.

Selain itu, kemitraan gender dalam keluarga juga diterapkan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga secara baik dan terbuka diantara pasangan suami dan istri dengan mengkomunikasikan

bersama pemanfaatan kelola, juga menjadi indicator penting menguatkan ketahanan keluarga.

Dimensi: Ketahanan Fisik.

Diukur dengan 3 (tiga) variable kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, Ketersediaan Tempat/Lokasi Tetap Untuk Tidur.

Kondisi fisik yang sehat, memiliki kemampuan melakukan aktifitas fisik sehari-hari. Ini merupakan syarat yang penting bagi tercapainya ketahanan keluarga. Ketahanan fisik erat kaitannya dengan kesehatan, dan pemenuhan gizi, bebas dari penyakit, keterbatasan (disabilitas). Aktivitas fisik sehari-hari, membutuhkan energy tubuh yang cukup. Energy tubuh dalam beraktifitas sangat erat dengan kecukupan asupan gizi, pemenuhan kebutuhan pangan menjadi hal pokok dan utama. Salah satu pembatas ketahanan adalah terletak pada proses pencernaan yaitu kemampuan tubuh dalam memproses makanan, menyerap kalori dan nutrisi untuk memicu aktifitas tubuh.

Apapun aktifitasnya, pengerahan tenaga maksimum tubuh memiliki keterbatasan dan membutuhkan istirahat yang cukup dan tempat/lokasi yang layak untuk tidur. Memiliki tubuh yang sehat luar-dalam tidak cukup dengan pola makan sehat dan berolah-raga saja akan tetapi juga dengan tidur yang cukup.

Variable I: Kecukupan pangan dan gizi, diukur berdasarkan 2 (dua) indikator, yaitu: Kecukupan Pangan, dan Kecukupan Gizi.

Membentuk keluarga yang mempunyai ketahanan fisik sehat, penting memperhatikan kecukupan pangan dan status gizi yang berkualitas bagi seluruh anggota keluarga. Kondisi fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas sangat ditentukan oleh status gizi yang baik. Status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi berkualitas. Kekurangan asupan pangan dan gizi dapat mengakibatkan seseorang menjadi lebih rentan terkena berbagai macam gangguan kesehatan dan penyakit. Sebaliknya, tercukupinya kebutuhan pangan dan status gizi yang baik dapat meningkatkan ketahanan fisik sehingga mampu beraktifitas secara normal dan berdampak lebih baik pada ketahanan keluarga.

Berdasarkan data berikut dibawah ini dapat diasumsikan bahwa dari data yang ada terkait bayi lahir, maka tidak ditemukan kondisi gizi buruk dari jumlah 1980 bayi lahir kecuali 17 bayi dengan berat badan rendah. Data

tersebut mengindikasikan kecukupan pangan dan ketahanan gizi keluarga menggambarkan ketahanan fisik cukup baik. Tabel dibawah ini menunjukkan gambaran kondisi kualitas asupan gizi keluarga:

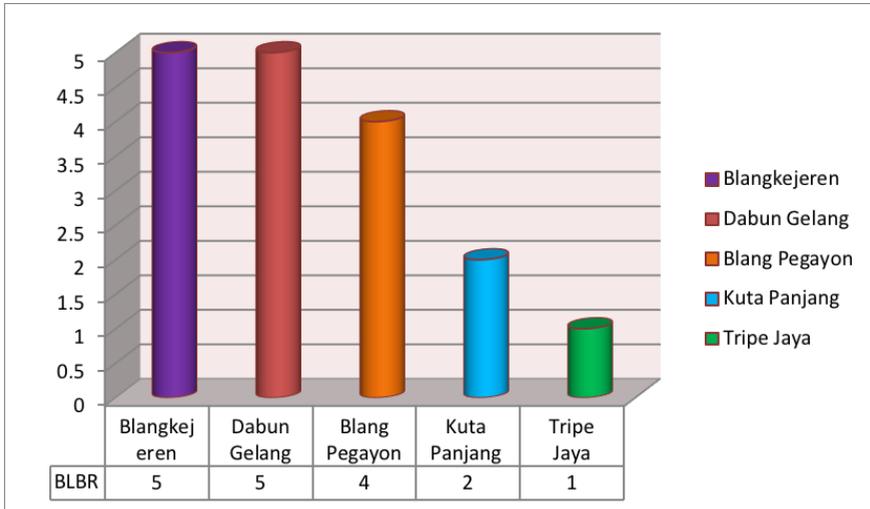
Tabel 7.4 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, 2018

No	Kecamatan <i>Subdistricts</i>	Bayi Lahir <i>Births</i>	BBLR/LBW		Gizi Buruk <i>Malnutrition</i>
			Jumlah <i>Total</i>	Dirujuk <i>Treated</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kuta Panjang	170	2	0	0
2.	Blang Jerango	158	0	0	0
3.	Blangkejeren	661	5	0	0
4.	Putri Betung	183	0	0	0
5.	Dabun Gelang	108	5	0	0
6.	Blang Pegayon	157	4	0	0
7.	Pining	74	0	0	0
8.	Rikit Gaib	109	0	0	0
9.	Pantan Cuaca	86	0	0	0
10.	Teran un	140	0	0	0
11.	Tripe Jaya	134	1	0	0
Gayo Lues		1980	17	0	0

Dari tabel di atas diketahui bahwa ada 1980 kelahiran dan 17 diantaranya adalah bayi dengan status BBLR yaitu berat badan lahir rendah atau disebut juga dengan Low Birth Weights (LBW). Tidak ada diantara bayi yang lahir BBLR harus di rujuk dan berdasarkan data yang tersedia tidak ada pula bayi dengan gizi buruk.

Untuk melihat latar kecamatan dari 17 bayi yang terlahir dengan BBLR maka gambar berikut akan mengetengahnya.

Gambar 7.4 Jumlah Bayi BLBR Menurut Kecamatan di Gayo Lues Tahun 2018



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues

Dari lima kecamatan ini tiga kecamatan adalah yang berada di pusat pemerintahan termasuk Blang Kejeran sebagai ibu kota Gayo Lues. Lainnya Dabun Gelang dan Blang Pegayong yang juga berada di sekitar pusat pemerintahan. Jumlahnya menjadi banyak terkait dengan kecamatan ini merupakan lokasi yang padat penduduk sehingga berkemungkinan untuk jumlahnya menjadi lebih tinggi. Kecamatan Kuta Panjang berjarak 12 km dari pusat kota namun juga tergolong kecamatan yang ramai penduduk. Meski jaraknya 12 km namun intensitas aktifitas masyarakatnya ke pusat kabupaten tergolong menyatu. Yang terakhir adalah Kecamatan Tripe Jaya yang mengetengahkan satu anak BLBR berjarak 55 Km dari pusat pemerintahan.

Variabel 2: Kesehatan Keluarga.

diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Keterbebasan Dari Penyakit Kronis Dan Disabilitas.

Kesehatan fisik merupakan modal dasar seseorang untuk hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Fisik

yang sehat dapat diterjemahkan sebagai kondisi jasmani yang terbebas dari penyakit dan gangguan fungsi tubuh. Orang yang sehat berpotensi lebih besar untuk dapat membangun ketahanan keluarga yang kuat. Sebaliknya, keberadaan penyakit kronis ataupun kesulitan fungsional yang diderita oleh seseorang dapat menjadi hambatan untuk melaksanakan peran dan fungsi dalam keluarga, sehingga ketahanan keluarganya menjadi rendah.

Pemerintah berkewajiban menjamin kesehatan masyarakat. Salah Jaminan kesehatan adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan. Menurut UU no. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Hal ini juga harus dijalankan dengan responsive gender agar penduduk baik laki-laki dan perempuan terjamin kesehatannya. Akan tetapi pada data kesehatan Gayo Lues dari BPS tahun 2018, diketahui Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir 33,11 % laki-laki dan perempuan 66,89. Perbandingan jumlah persentase ini masih menunjukkan angka selisih yang cukup tinggi, dan berarti ada kesenjangan gender dari segi kualitas kesehatan masyarakat dan ini akan berdampak pada ketahanan keluarga. Lebih detail terkait kondisi kesehatan dapat di cek pada Bab kesehatan di Buku Profil ini.

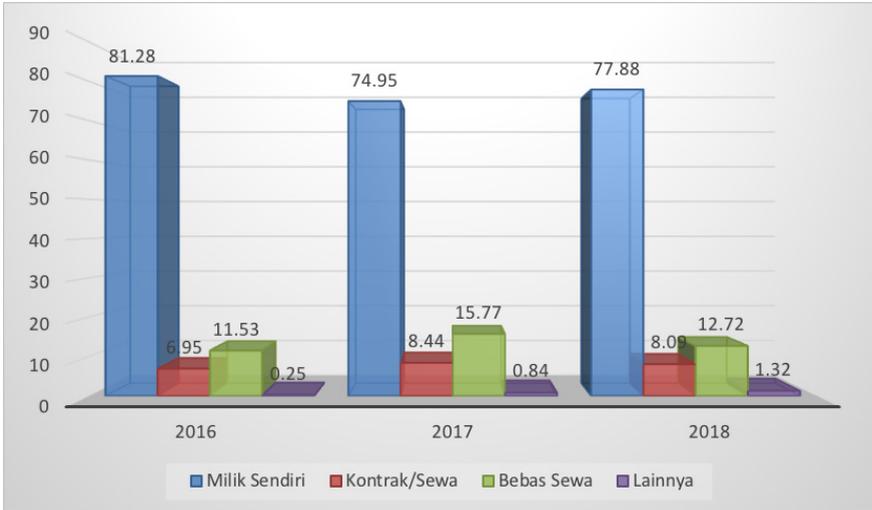
Variabel 3: Ketersediaan Tempat/Lokasi Tetap Untuk Tidur.

Diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Ketersediaan Lokasi Tetap Untuk Tidur.

Ketersediaan rumah tetap menunjukkan ketersediaan lokasi tetap untuk tidur. Ketersediaan lokasi tidur yang tetap sebagai wujud dari adanya bahagian ketenangan keluarga. Kualitas tidur sedikit banyak ikut berpengaruh dengan ketersediaan lokasi tetap. Tidur yang bertempat tetap dan cukup berimbas kesehatan dan kesegaran, memiliki vitalitas tenaga untuk mengoptimalkan aktifitas sehari-hari. Kualitas tidur yang lebih baik akan dapat meningkatkan ketahanan fisik, sehingga keluarga dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dalam kehidupan berkeluarga dan ikut menciptakan ketahanan keluarga lebih baik.

Indikator kepemilikan tempat tidur tetap erat kaitannya dengan kepemilikan rumah bagi keluarga itu sendiri. Berikut grafik tentang kepemilikan rumah sendiri pasanagan keluarga masyarakat Gayo Lues:

Gambar 7.5 Persentase Kepemilikan Rumah Kabupaten Gayo Lues, 2016-2018



Sumber BPS Kabupaten Gayo Lues, Susenas 2018

Tabel diatas menyajikan bahwa tahun 2018 mayoritas masyarakat Gayo lues memiliki tempat tidur tetap bersama keluarga dengan persentase yang tinggi kepemilikan rumah sendiri 77,88 % dan persentase kontrak sewa 8,09% rumah kontrak/sewa. Kepemilikan dan sewa/kontrak menunjukkan kondisi ketersediaan lokasi/tempat tetap untuk tidur keluarga cukup tinggi. Sementara bebas sewa 1,32% dapat diterjemahkan tidak tersedianya lokasi tetap untuk tidur dikarenakan perpindahan dapat saja terjadi dalam waktu yang singkat berpindah-pindah tempat.

Dimensi 3: Ketahanan Ekonomi.

Tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga digambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupannya secara nyaman dan berkesinambungan. Kehidupan keluarga yang nyaman akan terjadi apabila keluarga tersebut memiliki dan menempati rumah atau tempat tinggal yang kondisinya layak. Sementara itu, kesinambungan kehidupan keluarga akan terjamin ketika keluarga tersebut selalu memiliki pendapatan dalam jumlah yang mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk menjamin keberlanjutan pendidikan

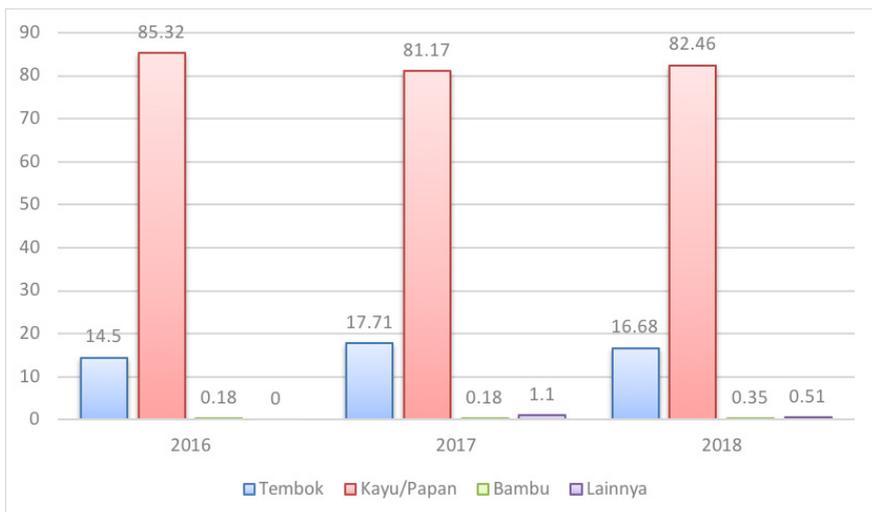
anggota keluarganya. Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi berbagai ketidakpastian hidup di masa depan, maka keluarga juga selayaknya memiliki tabungan dalam jumlah yang memadai serta memiliki jaminan kesehatan berupa asuransi kesehatan dan sebagainya.

Dimensi 3: Ketahanan Ekonomi; dijabarkan melalui 4 (empat) variable: kepemilikan rumah layak huni, Pendapatan Keluarga, Pembiayaan Pendidikan Anak, dan Jaminan Keuangan Keluarga.

Variabel 1: Tempat Tinggal Keluarga diukur berdasarkan 1 (satu) indicator yaitu Kepemilikan Rumah layak huni.

Gambar berikut memberikan gambaran kelayakan rumah penduduk Gayo Lues.

Gambar 7.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terlulus Kabupaten Gayo Lues, 2016-2018



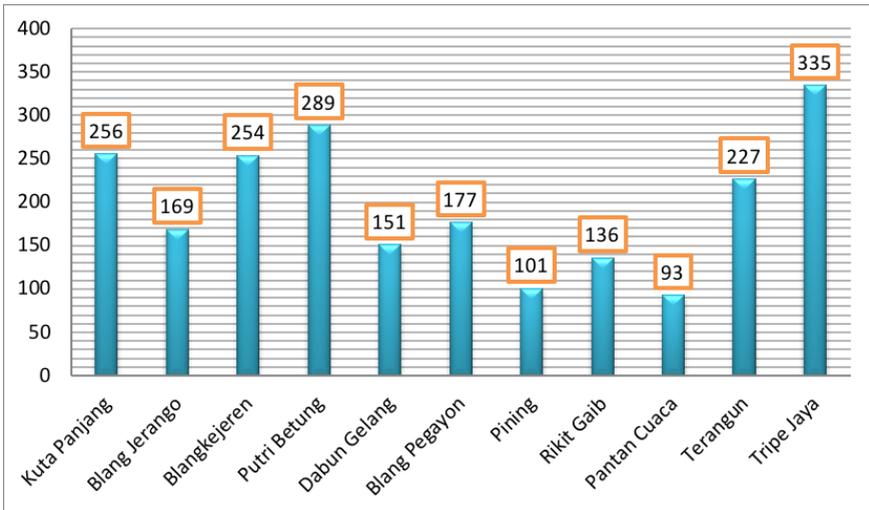
Sumber : BPS Kabupaten Gayo Lues, Susenas 2018

Persentase rumah-tangga dengan kondisi rumah bambu 0,35 % dan lainnya dalam jumlah 0,51 dipahami sebagai rumah tinggal yang termasuk pada katagori rentan dan memperhatikan yaitu 0,86 %. Sementara keadaan rumah mayoritas pada tingkat menengah 82,46 % dan 16,68 % kondisi lebih

layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat belum terbebas dari kemiskinan untuk kehidupan yang layak.

Gambar berikut akan menengahkan tentang data jumlah rumah tidak layak huni di Gayo Lues menurut kecamatan :

Gambar 7.7 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tiap Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, 2018



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Gayo Lues

Berdasarkan table diatas maka jumlah total rumah tidak layak huni tahun 2018 bagi rumah-tangga masyarakat Gayo lues adalah 2188 rumah. Persentase 0,86 % katagori tidak layak huni pada table diatas, dapat diterjemahkan keterhubungan data antar table. Kualitas menengah dan lebih baik berjumlah 99,14 % termasuk pada tipe layak huni. Kondisi ini menjadi tolok ukur dalam menilai ketahanan ekonomi rumah-tangga masyarakat Gayo Lues adalah baik. Jika dilihat sebaran kecamatannya maka kecamatan yang paling banyak rumah tidak layak huni adalah kecamatan Tripe Jaya, Putri Betung, Kuta Panjang dan Blang Kejeren. Putri Betung dan Tripe Jaya adalah dua kecamatan yang tergolong sangat jauh dari pusat pemerintahan. Sehingga perhatian dan agenda khusus penting untuk dirancang menurunkan angka rumah

tidak layak huni di kecamatan yang menjadi kantongnya.

Variabel Pendapatan Keluarga; diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Pendapatan Perkapita Keluarga, dan Kecukupan Pendapatan Keluarga.

Ketahanan ekonomi keluarga dapat diterjemahkan dari kecukupan penghasilan keluarga. Aspek ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya dinilai secara objektif saja namun juga secara subjektif. Penilaian pendapatan secara objektif beranggapan bahwa keluarga yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi akan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Sedangkan, penilaian pendapatan secara subjektif ini lebih menekankan pada kepuasan keluarga atas pendapatan yang telah didapat. Artinya keluarga yang mempunyai persepsi penghasilannya cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dinilai memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.

Faktor ekonomi sangat berpengaruh secara signifikan dalam pembangunan. Dalam mengukur capaian pembangunan manusia dari sisi ekonomi, indikator pendapatan perkapita keluarga Gayo Lues memiliki keterbatasan data, maka UNDP pada lampiran 2. IPG dan komponennya menurut provinsi dan kabupaten/kota menyajikan perkembangan pengeluaran perkapita menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Indikator pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu rupiah PPP) di Gayo Lues dapat dilihat pada data Indeks Pembangunan Manusia berbasis Gender 2018: Laki-laki Rp.12.700.- sementara perempuan Rp. 7.288.- Data tersebut terjadi kesenjangan perkapita antara laki dan perempuan, secara rata-rata pengeluaran perkapita perempuan dibawah pengeluaran perkapita laki-laki pertahun.

Indikator kecukupan pendapatan keluarga tergambar sangat rendah, berdasarkan data diatas, keadaan ini dapat diterjemahkan dibawah kecukupan, atau tergolong miskin.

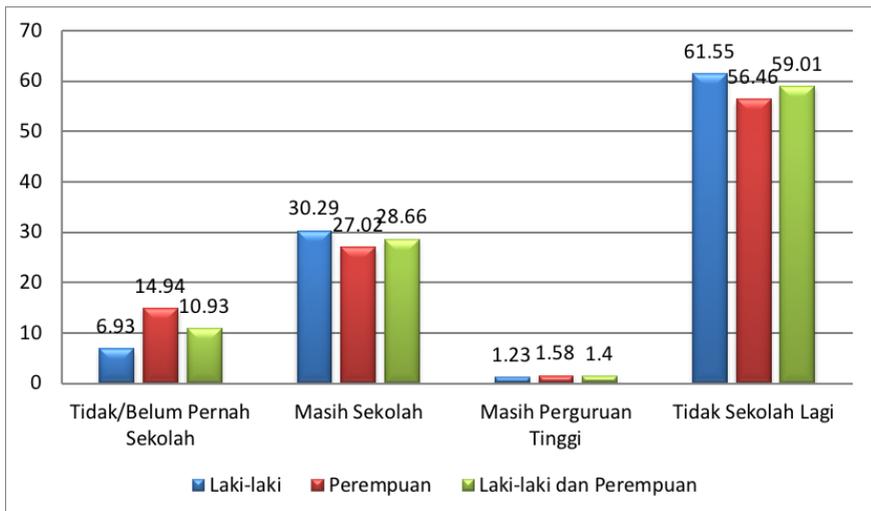
Variabel 3: Pembiayaan Pendidikan Anak diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak, dan Keberlangsungan Pendidikan Anak.

Keluarga yang mampu membiayai pendidikan anak hingga dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dinilai lebih tahan secara ekonomi

sehingga akan berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Sebaliknya, keberadaan anggota keluarga yang putus sekolah merupakan salah satu indikasi adanya masalah ekonomi dalam keluarga tersebut, walaupun penyebab putus sekolah tidak selalu karena alasan ekonomi, hal ini akan mempengaruhi daya tahan keluarga yang rendah. Sehingga, dengan kata lain keluarga yang tidak ada anak yang putus sekolah berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Selain tidak ada anak yang putus sekolah, keluarga yang mempunyai ketahanan ekonomi yang baik juga harus dapat menjamin anggota keluarganya untuk memperoleh pendidikan sehingga tidak ada anak yang tidak pernah sekolah.

Indikator kemampuan pembiayaan dan keberlangsungan pendidikan anak dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 7.8 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Partisipas Sekolah di Kabupaten Gayo Lues, 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, Maret 2018

Berdasarkan grafik tersebut bahwa angka tidak sekolah masih cukup tinggi, menunjukkan ketahanan ekonomi keluarga dari segi biaya pendidikan masih lemah. Secara lebih detail pembahasan tentang kondisi pendidikan dapat dilihat pada Bab Pendidikan di Buku ini

Variabel 4: Jaminan Keuangan Keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Tabungan Keluarga, dan Jaminan Kesehatan Keluarga.

Ketahanan ekonomi keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan keluarga dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang. Sehingga kepemilikan jaminan terhadap resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi di masa depan menjadi salah satu variabel pembangunan ketahanan ekonomi keluarga. Jaminan tersebut salah satunya yaitu dengan memiliki tabungan keluarga, dalam bentuk apapun. Selanjutnya, jaminan terhadap resiko juga dapat berupa jaminan kesehatan keluarga. Dimana suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan keluarga secara ekonomi bila memiliki asuransi keluarga, yang dalam hal ini digambarkan melalui kepemilikan BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, asks/asabri/jamsostek, jamkesmas/PBI, jamkesda, asuransi swasta, serta jaminan kesehatan dari perusahaan/kantor.

Dimensi 4: Ketahanan Sosial Psikologis.

Keluarga mempunyai ketahanan sosial psikologis yang baik yaitu apabila keluarga tersebut mampu menanggulangi berbagai masalah non-fisik seperti pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan), kepedulian suami terhadap istri dan kepuasan terhadap keharmonisan keluarga (Sunarti dalam Puspitawati (2015)). Oleh karena itu, keluarga yang memiliki ketahanan sosial psikologis yang baik berpotensi untuk mempunyai ketahanan keluarga yang tangguh pula. Dimensi ketahanan sosial psikologis dijabarkan melalui 2 (dua) variabel dan 3 (tiga) indikator yaitu:

Variabel 1: Keharmonisan Keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Sikap Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak.

Keluarga yang memiliki sikap anti kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak maka keluarga tersebut cenderung akan memiliki ketahanan keluarga yang relatif tinggi, begitu pula sebaliknya. Dimana sikap anti kekerasan terhadap perempuan tercermin pada sikap dimana kepala rumah tangga/pasangannya yang tidak membenarkan tindakan suami memukul istri dengan alasan apapun. Sementara itu, perilaku anti kekerasan terhadap anak tercermin dalam cara mendidik dan mengasuh anaknya yang tidak menggunakan kekerasan dalam jenis apapun. Pembahasan lebih lanjut tentang hal ini dapat dilihat pada bagian kekerasan terhadap perempuan dalam

buku ini

Variabel 2 : Kepatuhan Terhadap Hukum diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Penghormatan Terhadap Hukum.

Keluarga yang patuh pada hukum hingga tidak pernah melakukan tindakan kriminalitas atau pelanggaran hukum maka dapat dikatakan keluarga tersebut memiliki ketahanan yang baik, begitu pula sebaliknya. Karena keterbatasan data maka di proxy dengan rumah tangga yang pernah mengalami tindak kejahatan (korban tindak pidana). Pendekatan korban tindak pidana ini dianggap dapat mewakili variabel kepatuhan terhadap hukum karena bila keluarga tersebut tidak pernah menjadi korban tindak pidana, maka dapat diasumsikan keluarga tersebut memiliki ketahanan yang baik.

Dimensi 5: Ketahanan Sosial Budaya.

Ketahanan sosial budaya merupakan salah satu dimensi yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga dilihat dari sudut pandang hubungan keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya. Keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial. Dimensi ketahanan sosial budaya dijabarkan melalui 3 (tiga) variabel dan 3 (tiga) indikator yaitu:

1) Variabel Kepedulian Sosial diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Penghormatan Terhadap Lansia.

Keluarga yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap anggota keluarga yang telah berusia lanjut berupa perhatian dan perawatan pada lansia akan memiliki ketahanan yang cukup tinggi. Kepedulian sosial yang diukur dengan indikator penghormatan terhadap lansia ini selanjutnya diwakili dan diukur menggunakan pendekatan keberadaan lansia di dalam rumah tangga. Penggunaan pendekatan ukuran ini didasarkan pada asumsi bahwa seorang lansia yang tinggal bersama anggota keluarga di dalam rumah tangga maka lansia tersebut sehari-harinya akan menerima perhatian dan perawatan dari anggota keluarga lainnya secara memadai.

2) Variabel Keeratan Sosial diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Partisipasi Dalam Kegiatan Sosial Di Lingkungan

Keeratan sosial secara langsung akan berpengaruh terhadap upaya penduduk untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dalam lingkup

keluarga, khususnya yang terkait dengan keselarasan dan rasa kekeluargaan antar anggota masyarakat. Ketahanan keluarga dapat dicerminkan dari kondisi keluarga yang kuat dan sukses yaitu keluarga memiliki dukungan yang bersifat formal ataupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya secara berimbang. Sehingga, suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang cukup tinggi bila anggota keluarga selalu berperan serta ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan sosial yang diadakan di lingkungan sekitar.

3) Variabel Ketaatan Beragama diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Partisipasi Dalam Kegiatan Keagamaan Di Lingkungan.

Ketaatan beragama menjadi salah satu komponen pembentuk keluarga yang berkualitas. Kondisi mental dan spiritual serta penerapan nilai-nilai agama merupakan dasar untuk mencapai keluarga yang berkualitas yang selanjutnya akan membentuk keluarga yang sejahtera. Ketaatan beragama dapat berupa kesadaran individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya didasarkan pada kerelaan individu untuk hadir, terlibat, dan berperan secara langsung dalam kegiatan keagamaan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Sehingga, suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang cukup tinggi bila anggota keluarga selalu ikut berpartisipasi pada kegiatan keagamaan

BAB VIII

REKOMENDASI

Gender dan Pendidikan

Angka partisipasi murni pendidikan Gayo Lues menunjukkan angka yang berindikasi putus sekolah cukup tinggi dimana pada tingkat sekolah dasar 100 % anak laki laki dan perempuan usia SD telah bersekolah, lalu 90,71 % yang melanjutkan ke SMP, akan tetapi hanya 70,17 % yang melanjutkan ke SMA. Ada 75,8% siswa laki laki yang melanjutkan sampai ke SMA, tetapi hanya 59,43% siswa perempuan yang melanjutkan sampai SMA. Atas dasar ini maka direkomendasikan untuk meningkatkan sosialisasi dan pendampingan tentang pentingnya pendidikan bagi laki-laki dan perempuan.

Selain itu, jumlah guru Gayo Lues menunjukkan adanya kesenjangan gender dimana guru perempuan jauh lebih banyak dari guru laki-laki. Karenanya perlu ada affirmative action untuk mendorong bertambahnya jumlah guru laki-laki sehingga figur pendidik bisa disuritauladani dengan seimbang oleh siswa.

Pembelajaran yang responsive gender merupakan kebutuhan siswa laki-laki dan perempuan sehingga hasil pendidikan mampu menunjukkan capaian yang baik bagi laki-laki dan perempuan. Karenanya pelaksanaan pendidikan Gayo Lues sudah sepatutnya menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Gender dan Kesehatan

Jumlah penduduk Gayo Lues dengan keluhan kesehatan baik yang terganggu atau tidak terganggu aktifitas lebih banyak dialami perempuan. Sementara yang mendapatkan layanan kesehatan rawat inap lebih dari 4 hari

hingga 29 hari yang paling banyak laki-laki. Pengguna jaminan kesehatan untuk pasien rawat inap laki-laki adalah 100% sementara perempuan masih 96%. Pengobatan yang persentasenya lebih tinggi perempuan adalah berobat jalan atau rawat inap dengan waktu perawatan ≤ 3 hari. Artinya berobat jalan menjadi alternatif yang dianggap available oleh perempuan. Sementara yg rawat inap kalau sebentar lebih banyak perempuan, tetapi jika sudah lama jumlah perempuan sedikit. Ada situasi social budaya perempuan yang berimplikasi pada kualitas layanan rawat inap bagi perempuan dengan keluhan kesehatan. Oleh karenanya direkomendasikan untuk menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dalam bidang kesehatan sehingga terpetakan kendala yang menyebabkan terhalangnya baik laki-laki atau perempuan untuk memaksimalkan hasil pembangunan.

Gender dan Pengambilan Keputusan

Minimnya perempuan di legislatif dan pengambil kebijakan eksekutif, mengindikasikan sulitnya perempuan menjadi pemimpin dan anggota legislative di Gayo Lues. Karenanya direkomendasikan untuk melakukan affirmative action untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif dan eksekutif. Hal ini akan berdampak langsung pada pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Kekerasan Terhadap Perempuan

Minimnya data KTP yang tersedia di Gayo Lues mengindikasikan belum maksimalnya fungsi lembaga layanan. P2TP2A menjadi lembaga pemberi layanan yang seharusnya mampu mempeluas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Oleh karenanya direkomendasikan agar Pemerintah Gayo Lues memperkuat komitmen politik dan komitmen anggaran untuk mengoptimalkan keberfungsian P2TP2A sebagai lembaga pemberi layanan. Sehingga kekerasan yang terjadi bisa ditangani dan masyarakat mendapat peningkatan pengetahuan untuk mengurangi angka kekerasan, serta berpartisipasi dalam mencegah terjadinya kekerasan.

Gender dan Ketahanan Keluarga

Kondisi ketahanan keluarga merupakan benteng yang harus diperkuat untuk mendapatkan masyarakat yang kuat, kerentanan keluarga di Gayo Lues pada beberapa indicator merupakan bagian yang harus segera

di tangani. Oleh karenanya direkomendasikan kepada pemerintah Gayo Lues untuk membangun ketahanan keluarga secara sinergis lintas dinas dan berkelanjutan. Mengingat penguatan keluarga berdasarkan variable dan indikator ketahanan keluarga meliputi bidang pendidikan, hukum, kesehatan, dan lainnya.

Data Terpilah

Pengalaman proses pengumpulan data yang kesulitan mendapatkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, maka sangat direkomendasikan kedepannya Pemerintah Gayo Lues memperkuat pembangunan Sistem Informasi Gender Anak (SIGA) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan system data di Gayo Lues. Sehingga ketersediaan data terpilah dapat dimaksimalkan dan bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang responsive gender.

DAFTAR RUJUKAN

- Indonesia Investmen Newsletter, diakses pada 21 Desember 2019
- Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender
- BPS, Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2018
- BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh, 2018.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2018
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2018
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2017
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016
- Kunandar, GuruProfesional, Jakarta:RajaGrafindo, 2007
- niep.data.kemdikbud, Kab.Gayo Lues 2019, diakses pada 3 Desember 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
- Survei Sosial Ekonomi Nasional, Hasil Survey Maret 2018
- UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Warni Tune Sumar, Implementasi Kesetaran Gender dalam Bidang Pendidikan, Jurnal Musawa, vol7,no.1 juni2015

<http://aceh.tribunnews.com/2019>. Bupati Galus, M Amru,6 agustus 2019,20:30

<https://www.kompasiana.com>

<https://kumparan.com>. diakses pada 28 Februari2019

Serambinews.com, selasa, 6-8 2019. Sebagaimana dikutip tribunnews.com

